RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan efektif, terdapat berbagai tantangan, peluang, dan kendala. Beberapa di antaranya meliputi: Globalisasi dan krisis keuangan global mempengaruhi ekonomi pasar secara signifikan. Kebijakan otonomi daerah memerlukan adaptasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program TIK, Demokratisasi dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia memengaruhi kebijakan dan regulasi di sektor TIK, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat skala usaha dan efisiensi di berbagai sektor. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan memerlukan solusi TIK yang ramah lingkungan, Energi dan sumber daya alam lainnya perlu dikelola dengan bijaksana. Penggunaan sumber daya yang handal dan berkelanjutan menjadi kunci dalam pemerataan pembangunan TIK di seluruh nusantara. Dengan mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut, konsep pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat terus diperbaiki dan disesuaikan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Renja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Makale, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaranan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 22

3.3. Program dan Kegiatan 24

BAB IV Penutup 25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Rensta Perangkat Daerah dan RPJMD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Keja Anggaran (RKA) perangkat daerah unuk menyusun Anggaran Belanja

Penapatan Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 pada

dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Produk-produk hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021- 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Tana Toraja Selatan Tahun 2024.
5. Sebagai acuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TAHUN 2023

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 telah melaksanakan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    b. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
    a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Aplikasi Informatika
    a. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan capaian sasaran sebagai berikut:

Tujuan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi serta Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel			
Indikator Tujuan	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian Sasaran (%)**
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi	%	73		100
Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi			
Indikator Sasaran	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian Sasaran (%)**
Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	%	40	60	150
Skor indeks KAMI (keamanan informasi)	%	20	26,79	130

Sasaran 2	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat			
Indikator Sasaran	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian Sasaran (%)**
Cakupan layanan telekomunikasi	%	73	85	116
Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik	%	60	40	66

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana pada tabel T-C.29 yang terlampir.

2.1.1. Rencana Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tentunya tidak terlepas dari tersedianya anggaran sebagai faktor utama dalam menjalankan roda pembangunan di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Adapun sumber dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berasal dari APBD Kabupaten Tana Toraja.

Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

No	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.853.737.000,00**
B	**Belanja Langsung**	**2.254.800.000,00**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**335.401.000,00**
	a. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	47.600.000,00
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.970.000,00
	c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.800.000,00
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.831.000,00
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.200.000,00
2	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**190.900.000,00**
	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	190.900.000,00

3	**Program Aplikasi Informatika**	**1.705.250.000,00**
	a. Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.705.250.000,00
4	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**23.249.000,00**
	a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.249.000,00
	Total	**4.108.537.000,00**

2.1.2. Analisis Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

Pagu anggaran perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.108.537.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.853.737.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.254.800.000,00 bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 1.649.531.948,00 atau sebesar 88,98%. Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung adalah Rp. 2.242.171.243,00 atau sebesar 99,43%, sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 3.891.703.191,00 atau sebesar 94,72% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Relisasi Fisik (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.853.737.000,00**	**1.649.531.948,00**	**88,98%**	**100,00**
B	**Belanja Langsung**	**2.254.800.000,00**	**2.242.171.243,00**	**99,43%**	**100,00**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**335.401.000,00**	**331.587.923,00**	**98,86%**	**100,00**
	a. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	47.600.000,00	47.115.000,00	98,98%	99,66
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.970.000,00	128.531.000,00	98,13%	100,00
	c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.800.000,00	55.650.000,00	99,73%	100,00
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.831.000,00	36.098.000,00	98%	100,00
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.200.000,00	64.193.923,00	99,99%	100,00
2	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**190.900.000,00**	**190.460.000,00**	**99,75%**	**100,00**
	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	190.900.000,00	190.460.000,00	99,75%	100,00
3	**Program Aplikasi Informatika**	**1.705.250.000,00**	**1.697.858.320,00**	**99,56%**	**97,50**

	a. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.705.250.000,00	1.697.858.320,00	99,56%	97,50
4	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**23.249.000,00**	**22.265.000,00**	**95,76**	**100**
	a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.249.000,00	22.265.000,00	95,76	100
	Total	**4.108.537.000,00**	**3.891.703.191,00**	**94,72**	**99,37**

Realisasi fisik program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja mencapai 99,37% sementara realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,72%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik serta persandian telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, dapat dijabarkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan statistik dan urusan pemerintahan persandian yang menjadi kewenagan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Tana Toraja.

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

1. Rincian tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:
   a. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

b. Mengoordinasikan perumusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
c. Mengoordinasikan perumusan kebijakan administrasi dinas.
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
e. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
f. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
g. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
h. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan bidang persandian dan statistik.
i. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan bidang persandian dan statistik.
j. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan bidang persandian dan statistik.
k. Menyelenggarakan dan memberi dukungan fasilitasi pelayanan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan bidang persandian dan statistik.
l. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan bidang persandian dan statistik.
m. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas.

n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
o. Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan.
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:
   a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik urusan pemerintahan bidang persandian.
   b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik urusan pemerintahan bidang persandian.
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik urusan pemerintahan bidang persandian.
   d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik urusan pemerintahan bidang persandian.
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana pada tabel T-C.30 yang terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Rendahnya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Belum meratanya penyebaran jaringan komunikasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Kurangnya pelatihan terhadap SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi karena pihak penyedia jaringan komunikasi kurang berminat mendirikan menara telekomunikasi pada daerah yang blankspot layanan telekomunikasi karena letak geografis yang sulit, keterbatasan daya listrik, aksesibilitas daerah terpencil dan jumlah penduduk yang kurang sehingga pengguna jasa telekomunikasi dianggap belum mempunyai prospek ekonomi.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi Infomatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam pengembangan pelayanan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE pemerintah daerah.
2. Belum maksimalnya layanan komunikasi infomasi publik kepada masyarakat.

Adapun peluang Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Tana Toraja dalam pengembangan pelayanan, sebagai berikut:

1. Komitmen kepala daerah yang menjadikan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tana Toraja sebagai urat nadi komunikasi dan pengelolaan media informasi daerah.
2. Dukungan dari pemerintah pusat melalui program Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Dukungan dari pemerintah provinsi melalui program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Koordinasi yang baik dengan provider telekomunikasi Indonesia.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi Covid-19.

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang starategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Kebijakan pengembangan smartcity di Indonesia melalui program Gerakan Maju 100 Smartcity Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan statistik serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, harus menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan persandian serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan wajib menyelenggarakan penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Komitmen kepala daerah untuk memantapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai urat nadi komunikasi dan pengelolaan media informasi daerah.
6. Pemanfaatan TIK yang semakin pesat terutama di masa pasca pandemi Covid-19.
7. Keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi publik.
8. Maraknya berita hoaks.

9. Keberadaan/penyebaran penduduk di wilayah Kabupaten Tana Toraja tidak merata sehingga pihak penyedia jaringan telekomunikasi kurang berminat mendirikan menara telekomunikasi pada daerah yang blankspot layanan telekomunikasi karena penduduknya sangat kurang sehingga pengguna jasa telekomunikasi dianggap belum mempunyai prospek ekonomi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

.....

....., sebagaimana pada tabel T-C.31 yang terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja senantiasa menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum Perangkat Daerah.

Pada tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi dan Perguruan Tinggi, usulan yang disampaikan hanya bersifat masukan maupun harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, sebagaimana pada tabel T-C.32 yang terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tujuan dan sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Tujuan utama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:
    a. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
    b. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital.
    c. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.
2. Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.

b. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.

c. Meningkatnya konektivitas layanan pos.

d. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.

e. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.

f. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.

g. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.

h. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.

i. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

j. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya penyebaran informasi publik dan inplementasi e-goverment pemerintah dareah Provinsi Sulaweis Selatan
2. Integrasi data statistik sektoral	Terwujudnya data statistik sektoral
3. Mewujudkan tata kelola dan manajemen keamanan informasi pemerintah daerah yang konprehensif, efektif dan efiasien	Terwujudnya fungsi identifikasi, proteksi, penaggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien
4. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencana dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

3.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Tana Toraja

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja, harus mendukung pewujudan visi Kabupaten Tana Toraja periode Tahun

2021-2026, yakni **“Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan baru”.**

Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Toraja dengan program pembangunan daerah yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

Misi RPJMD Kabupaten Tana Toraja	**Program Pembangunan Daerah yang Berkaitan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**
1. Mengoptimalkan tatanan kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli, berbasis kinerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (e- govermancel).	
Tujuan 1: *Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.*	
Sasaran 3: *Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik*	Program perbaikan sistem pelayanan perizinan dan layanan informasi publik lainnya di semua level pemerintahan dengan penerapan teknologi e-government
	Program pemantapan Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai urat nadi komunikasi dan pengelolaan media informasi daerah
2. Memantapkan sistem pencegahan, penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan.	
3. Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar mengajar	
4. Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya.	
Tujuan 1: *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat*	
Sasaran 1: *Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan*	Program pengembangan pusat pelayanan informasi pasar komoditas dengan teknologi internet dalam rangka

dan ketahanan pangan	penyediaan kemudahan dan perluasan akses informasi pasar ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional
5. Mengembangkan potensi pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup.	
6. Membangun, memperbaiki dan memelihara infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase) serta sarana prasarana publik vital.	
Tujuan 1: *Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital*	
Sasaran 1: *meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital*	Program perluasan jangkauan jaringan seluler ke seluruh wilayah hingga ke lembang-lembang terpencil, bekerjasama dengan penyedia layanan seluler (PT Telkom, Indosat dan lain-lain)
	Perluasan akses jaringan seluler/ internet menjangkau minimal 80% wilayah
7. Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerti dan sikap saling menghormati.	
Tujuan 2: *Menegakkan perundang-undangan dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat*	
Sasaran 1: *Terwujudnya penegakan perundang-undangan ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat*	Pembentukan dan penguatan lembaga penyiaran daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan misi, disusunlah tujuan yang berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dan indikator kinerja tujuan yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan

misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi serta Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi
	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat

Alur logis tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target 2024
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi serta Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel		Persentase perangkat daerah yang mengiplementasikan teknologi informasi	83%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE pemerintah daerah	Level 3 (60%)
			Skor indeks KAMI (keamanan informasi)	30%
		Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat	Cakupan layanan telekomunikasi	75%

			Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik	80%

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai tugas membantu Bupati Tana Toraja sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan statistik dan urusan pemerintahan persandian di Kabupaten Tana Toraja, maka program dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.928.050.880,00.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, sebagaimana pada tabel T-C.33 yang terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA dan DPA Tahun 2024, pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Makale, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
Kabupaten Tana Toraja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tepat Waktu**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**

2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	126	21	21	21	**100%**	21	21	17%
2.16.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	6	1	1	1	**100%**	1	0	0%
2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	72	12	12	12	**100%**	12	12	17%
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	120	0	0	0	**#DIV/0!**	24	0	0%
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	37	5	5	5	**100%**	7	0	0%
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!

2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	4	4	4	**100%**	4	4	17%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	1	1	1	**100%**	1	1	17%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2287	340	340	340	**100%**	369	369	16%
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0	0	0	0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	0	0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	0	0	0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31	6	5	5	**100%**	5	5	16%

2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72	12	12	12	**100%**	12	12	17%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	12	12	12	**100%**	12	12	17%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	12	12	12	**100%**	12	12	17%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**190%**	**190%**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	1	1	1	**100%**	1	1	17%

2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	4	4	4	**100%**	4	4	17%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	8	10	10	**100%**	10	10	17%
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	0	0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!
02.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**90%**		**70%**	**70%**	**100%**	**70%**	**140%**	**156%**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**	**90%**		**70%**	**70%**	**100%**	**70%**	**140%**	**156%**
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1	0	1	0	**0%**	0	0	0%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	5	1	0	0	**#DIV/0!**	1	0	0%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	6	1	1	1	**100%**	1	0	0%

2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5	1	0	0	**#DIV/0!**	1	0	0%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	1	1	1	1	**100%**	1	1	100%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	468	0	0	52	**#DIV/0!**	104	0	0%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	6	1	1	1	**100%**	1	1	17%
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	4	0	0	0	**#DIV/0!**	1	0	0%
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**	**100%**		**63%**	**63%**	**100%**	**63%**	**127%**	**127%**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase website pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**

2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5	0	1	0	**0%**	1	0	0%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	178	19	19	19	**100%**	53	0	0%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government**	**100%**		**63%**	**63%**	**100%**	**63%**	**127%**	**127%**
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6	1	1	1	**100%**	1	0	0%
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1	1	1	1	**100%**	0	1	100%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	16	1	1	1	**100%**	3	1	6%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	5	0	0	0	**#DIV/0!**	1	1	20%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	6	1	1	1	**100%**	1	1	17%

2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang dimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	1	1	1	**100%**	0	0	0%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	5	0	0	0	**#DIV/0!**	1	0	0%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	300	0	60	0	**0%**	60	60	20%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**#DIV/0!**			
2.20.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembanguan daerah**	**100%**		**13%**	**13%**	**100%**	**13%**	**27%**	**27%**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral**	**100%**		**13%**	**13%**	**100%**	**13%**	**27%**	**27%**
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	5	0	1	0	**0%**	1	0	0%

2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	241	0	33	0	**0%**	52	0	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						**#DIV/0!**			
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian**	**77%**		**10%**	**10%**	**100%**	**10%**	**19%**	**25%**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	560	0	160	0	**0%**	100	100	18%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	52	0	0	0	**#DIV/0!**	52	0	0%

2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang telah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah**	**80%**		**10%**	**10%**	**100%**	**10%**	**20%**	**25%**
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komununikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubungan dalam jaringan komunikasi sandi	52	0	0	0	**#DIV/0!**	52	0	0%

Makale, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase perangkat daerah yang mengiplementasikan teknologi informasi			63%	73%	83%	92%	100%	100%	63%	73%	83%	92%	100%	100%	
2	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah			Level 1 (20%)	Level 2 (40%)	Level 3 (60%)	Level 3 (60%)	Level 4 (80%)	Level 4 (80%)	Level 1 (20%)	Level 3 (60%)	Level 3 (60%)	Level 3 (60%)	Level 4 (80%)	Level 4 (80%)	
3	Skor indeks KAMI (keamanan informasi)			10%	20%	20%	30%	30%	30%	10%	10%	27%	30%	30%	30%	
4	Cakupan layanan telekomunikasi			70%	73%	75%	77%	80%	80%	70%	85%	85%	77%	80%	80%	
5	Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik			20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	40%	40%	80%	100%	100%	

Makale, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tana Toraja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar**	**95%**	**2.144.975.880**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar**	**95%**	**2.144.975.880**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu**	**95%**	**1.828.050.880**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu**	**95%**	**1.828.050.880**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makale	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.828.050.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makale	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.828.050.880	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makale	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makale	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Dokumen	-	
2	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**	**95%**	**-**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**	**95%**	**-**	
a	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makale	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	- Dokumen	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makale	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	- Dokumen	-	
b	Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makale	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 laporan	-	Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makale	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 laporan	-	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**	**95%**	**12.600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**	**95%**	**12.600.000**	

a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Makale	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	18 Stel	12.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Makale	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	- Paket	12.600.000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makale	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makale	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- Orang	-	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar**	**95%**	**192.592.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar**	**95%**	**192.592.000**	
a	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makale	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	15.450.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makale	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	15.450.000	
b	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makale	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makale	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	1.800.000	
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makale	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	237 Laporan	175.342.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makale	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	237 Laporan	175.342.000	
d	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makale	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	- Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makale	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	- Dokumen	-	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi**	**95%**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi**	**95%**	**-**	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makale	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	- Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makale	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	- Unit	-	
b	Pengadaan Mebel	Makale	Jumlah paket mebel yang disediakan	- Paket	-	Pengadaan Mebel	Makale	Jumlah paket mebel yang disediakan	- Paket	-	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makale	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makale	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	-	

6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**95%**	**27.033.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**95%**	**27.033.000**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	14.181.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	14.181.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12.000.000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- Laporan	-	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	852.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makale	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	852.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**95%**	**84.700.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**95%**	**84.700.000**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makale	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makale	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	20.000.000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makale	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makale	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	20.000.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makale	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	44.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makale	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	44.700.000	

B	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**75%**	**114.480.000**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**75%**	**114.480.000**	
1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**	**75%**	**114.480.000**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**	**75%**	**114.480.000**	
a	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik (peraturan daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	1 Dokumen	-	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik (peraturan daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	1 Dokumen	-	
b	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik (pelatihan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR))	1 Dokumen	-	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik (pelatihan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR))	1 Dokumen	-	
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bulentin)	1 Dokumen	-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bulentin)	1 Dokumen	-	
d	Pelayanan Informasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik (sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))	1 Dokumen	-	Pelayanan Informasi Publik	Makale	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik (sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))	1 Dokumen	-	
e	Layanan Hubungan Media	Makale	Jumlah layanan hubungan media (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	1 Layanan	46.880.000	Layanan Hubungan Media	Makale	Jumlah layanan hubungan media (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	1 Layanan	46.880.000	

f	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Makale	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya (bintek pengelolaan informasi)	3 Orang	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Makale	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya (bintek pengelolaan informasi)	3 Orang	-	
g	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tana Toraja	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan (layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas)	1 Dokumen	67.600.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tana Toraja	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan (layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas)	1 Dokumen	67.600.000	
h	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Toraja	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (menara telekomunikasi dan jaringan internet)	- Unit	-	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Toraja	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (menara telekomunikasi dan jaringan internet)	- Unit	-	
C	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**	**73%**	**1.562.600.000**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**	**73%**	**1.562.600.000**	
1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase website pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**	**100%**	**-**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase website pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**	**100%**	**-**	
a	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Makale	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	- Dokumen	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Makale	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	- Dokumen	-	
b	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Makale	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah (penyaluran berita dari dan ke pusat)	- Unit	-	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Makale	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah (penyaluran berita dari dan ke pusat)	- Unit	-	

2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government**	**73%**	**1.562.600.000**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government**	**73%**	**1.562.600.000**	
a	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Makale	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (pelatihan portal web OPD, kecamatan, kelurahan dan lembang)	1 Dokumen	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Makale	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (pelatihan portal web OPD, kecamatan, kelurahan dan lembang)	1 Dokumen	-	
b	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Makale	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) lima tahunan)	1 Dokumen	-	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Makale	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) lima tahunan)	1 Dokumen	-	
c	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Makale	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (pengelolaan aplikasi website dan pengadaan aplikasi anjungan infomasi)	1 Unit	15.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Makale	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (pengelolaan aplikasi website dan pengadaan aplikasi anjungan infomasi)	1 Unit	15.000.000	
d	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Makale	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah (layanan internet OPD)	1 Dokumen	1.500.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Makale	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah (layanan internet OPD)	- Dokumen	1.500.000.000	
e	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Makale	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 Paket	-	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Makale	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 Paket	-	
f	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Tana Toraja	Jumlah dokumen program inovasi yang dimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	- Dokumen	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Tana Toraja	Jumlah dokumen program inovasi yang dimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	- Dokumen	-	

g	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Makale	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah (bintek IT dan diklat Persandian)	1 Dokumen	-	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Makale	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah (bintek IT dan diklat Persandian)	1 Dokumen	-	
h	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Makale	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	47.600.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Makale	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	47.600.000	
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembanguan daerah**	**33%**	**73.274.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembanguan daerah**	**33%**	**73.274.000**	
1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral**	**33%**	**73.274.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral**	**33%**	**73.274.000**	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makale	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	- Dokumen	31.322.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makale	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	- Dokumen	31.322.000	
b	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Makale	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	- Orang	41.952.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Makale	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	- Orang	41.952.000	
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian**	**19%**	**32.721.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian**	**19%**	**32.721.000**	

1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian**	**100%**	**24.140.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian**	**100%**	**24.140.000**	
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Makale	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (literasi keamanan informasi pemerintah daerah)	1 Laporan	24.140.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Makale	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (literasi keamanan informasi pemerintah daerah)	1 Laporan	24.140.000	
2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase perangkat daerah yang telah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	**100%**	**8.581.000**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase perangkat daerah yang telah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah**	**100%**	**8.581.000**	
a	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terhubungan dalam jaringan komunikasi sandi	45 OPD	8.581.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terhubungan dalam jaringan komunikasi sandi	45 OPD	8.581.000	
Jumlah					**3.928.050.880**	**Jumlah**				**3.928.050.880**	

Makale, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tana Toraja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Makale, 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tana Toraja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar**		**95%**	**2.144.975.880**			**95%**	**2.359.473.468**
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu**		**95%**	**1.828.050.880**			**95%**	**2.010.855.968**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Makale	21 Orang/ bulan	1.828.050.880	APBD		21 Orang/ bulan	2.010.855.968
2	**16**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**		**95%**	**-**			**95%**	**-**

2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Makale	12 laporan	-	APBD		12 laporan	-
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja**		**95%**	**12.600.000**			**95%**	**13.860.000**
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Makale	- Paket	12.600.000	APBD		24 Paket	13.860.000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar**		**95%**	**192.592.000**			**95%**	**211.851.200**
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Makale	1 Paket	15.450.000	APBD		1 Paket	16.995.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Makale	1 Paket	1.800.000	APBD		1 Paket	1.980.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makale	245 Laporan	175.342.000	APBD		245 Laporan	192.876.200
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi**		**95%**	**-**			**95%**	**-**
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Makale	6 Unit	-	APBD		6 Unit	-

2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**		**95%**	**27.033.000**			**95%**	**29.736.300**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Makale	12 Laporan	14.181.000	APBD		12 Laporan	15.599.100
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Makale	12 Laporan	12.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Makale	12 Laporan	852.000	APBD		12 Laporan	937.200
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		**95%**	**84.700.000**			**95%**	**93.170.000**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Makale	1 unit	20.000.000	APBD		1 unit	22.000.000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Makale	4 unit	20.000.000	APBD		4 unit	22.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Makale	18 Unit	44.700.000	APBD		18 Unit	49.170.000

2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**		**75%**	**114.480.000**			**75%**	**125.928.000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik**		**75%**	**114.480.000**			**75%**	**125.928.000**
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik (peraturan daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	Makale	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik (pelatihan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR))	Makale	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik (sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))	Makale	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	Makale	1 Layanan	46.880.000	APBD		1 Layanan	51.568.000

2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya (bintek pengelolaan informasi)	Makale	3 Orang	-	APBD		3 Orang	-
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan (layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas)	Tana Toraja	1 Dokumen	67.600.000	APBD		1 Dokumen	74.360.000
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**		**73%**	**1.562.600.000**			**73%**	**1.718.860.000**
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government**		**73%**	**1.562.600.000**			**73%**	**1.718.860.000**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (pelatihan portal web OPD, kecamatan, kelurahan dan lembang)	Makale	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) lima tahunan)	Makale	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-

2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (pengelolaan aplikasi website dan pengadaan aplikasi anjungan infomasi)	Makale	1 Unit	15.000.000	APBD		1 Unit	16.500.000
2	16	3	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Makale		1.500.000.000	APBD			1.650.000.000
2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Makale		-	APBD			-
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah (bintek IT dan diklat Persandian)	Makale	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Makale	1 Dokumen	47.600.000	APBD		1 Dokumen	52.360.000
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah**			**73.274.000**				**80.601.400**
2	**20**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral**			**73.274.000**				**80.601.400**

2	20	2	0,1	1	Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Makale		31.322.000				34.454.200
2	20	2	0,1	2	Peningkata Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitas dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Makale		41.952.000				46.147.200
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian**		**19%**	**32.721.000**			**19%**	**35.993.100**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian**		**100%**	**24.140.000**			**100%**	**26.554.000**
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (literasi keamanan informasi pemerintah daerah)	Makale	1 Laporan	24.140.000	APBD		1 Laporan	26.554.000
2	**21**	**2**	**0,1**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang telah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah**			**8.581.000**				**9.439.100**

2	21	2	0,1	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubungan dalam jaringan komunikasi sandi	Makale	45 OPD	8.581.000			45 OPD	9.439.100
Jumlah									**3.928.050.880**				**4.320.855.968**

Makale, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671011 200312 1 002

RENJA T.A 2024

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA

I N S P E K T O R A T

JL. R.A.KARTINI NOMOR 6 MAKALE
KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang sedang dirancang. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis. Koreksi dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

A. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2024, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui

OPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tana Toraja, Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja menyusun Rancangan Renja OPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD diawali dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-data/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja OPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja OPD.

Rancangan awal Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rancangan Awal Rencana Kerja OPD ini dibahas dalam forum OPD atau forum gabungan OPD.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan forum OPD atau gabungan forum OPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum OPD/Forum Gabungan OPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja OPD.

Rancangan rencana kerja OPD disusun oleh masing-masing OPD dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan rencana kerja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Rancangan rencana kerja OPD yang telah diverifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir rencana kerja OPD yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja OPD oleh Bupati.

c. Keterkaitan Renja OPD dengan RKPD, Renstra OPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja OPD yang telah disahkan oleh Bupati nantinya merupakan bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja OPD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD.

Proses perencanaan tahunan OPD diawali dengan menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang RKPD) dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan Rencana Kerja OPD yang kemudian dikoordinasikan dalam upaya penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi OPD untuk menyusun RKA-OPD.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

m. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Kerja Inspektorat Daerah

C. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap OPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang perlu segera ditangani.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat
B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Total Anggaran Belanja langsung merupakan kegiatan yang didalamnya khusus memuat gaji dan tunjangan pegawai. Anggaran belanja tidak langsung Inspektorat Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 10.411.291.000,- terealisasi sebesar Rp9.343.992.644,- atau sebesar 92,85 %. Tingkat capaian tersebut dicapai dikarenakan pagu anggaran Belanja Gaji dan tunjangan di atas mengalami perubahan terkait mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai Renstra 2021-2026 di dalam tahun anggaran 2022 dan 2023, sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningkat /Menurun
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	%

Tahun Anggaran 2022, target indikator ini adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Realisasi WDP, indikator ini tercapai 80%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023, target indiKator ini adalah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Realisasi WTP, indikator ini tercapai 100%

b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningkat /Menurun
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	80%	63,14%	85%	65 %	

Tahun Anggaran 2022 pencapaian sebesar 63,14% atau dari target 80% direalisasikan 63,14%, .Tahun Anggaran 2023 pencapaian sebesar 62%, atau dari target 85% direalisasikan 62%.

Adanya penambahan jumlah LHP Kinerja yang diterima awal tahun 2022 menjadi penyebab menurunnya persentase Tindak Lanjut tahun 2023 ke 2024.

c. Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningkat /Menurun
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Level Kapabilitas APIP	III	II	III	II	-

Tahun Anggaran 2022, target indikator ini adalah Level Kapabilitas APIP pada Level III dengan Realisasi pada Level II. sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023, target indikator ini adalah Level Kapabilitas APIP pada Level III dengan Realisasi pada Level II, indikator ini tercapai 67%,

Pencapaian target tersebut tercapai atas konsekuensi Inspektorat daerah dalam meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara rutin melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui *Quality Assurance* (QA).

d. Persentase APIP bersertifikat Auditor/PPUPD

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningkat /Menurun
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Jumlah APIP	40%	40%	45%	56%	40%

Tahun Anggaran 2022, target indikator ini adalah jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sebanyak 40% bersertifikat Auditor/PPUPD, dengan Realisasi 40%, indikator ini tercapai 100%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023, target indikator ini adalah Level 45% dengan Realisasi 56%, indikator ini tercapai 140%,

Dari keempat Indkator Kinerja Utama tersebut, terdapat peningkatan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023. Secara keseluruhan pencapaian kinerja di tahun 2023 meningkat secara signifikan. Namun peningkatan capaian tersebut sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2022-2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.

Adapun capaian indikator kinerja utama maupun capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sasaran	Indikator	Nilai Capaian	
			2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Opini BPK	100	80
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	126	117
		Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	67	67
		Persentase APIP bersertifikat Auditor/P2UPD	100	140
	JUMLAH		**98,25**	**101**

Dari tabel tersebut tergambar peningkatan nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 yaitu meningkat 2,75 Point.

Berdasarkan tabel, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Tana Toraja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dari 3 (tiga) Program yang terdiri atas 11 (Sebelas) Kegiatan, diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan fungsinya. Pertama, kegiatan dengan fungsi sebagai penunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama yaitu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kedua, kegiatan dengan fungsi yang melekat pada Inspektorat sebagai APIP Daerah yaitu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Analisa mandiri

a. Terhadap indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka dilakukan analisis mandiri. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa penyebab tercapainya kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

   Sumber Daya Manusia:

   - APIP Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan paham akan tugas serta fungsinya.
   - Jabatan fungsional Auditor, memaksa setiap ASN untuk dapat menunjukkan kinerjanya dalam rangka memenuhi angka kredit jabatan fungsional.

b. Terhadap indikator kinerja yang masih belum maksimal dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja, yaitu Opini BPK dan Level Kapabilitas APIP. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa penyebab belum maksimalnya kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia:

- Belum maksimalnya perangkat daerah menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
- Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- Belum diterapkannya Pengawasan Internal berbasis Risiko;

Sarana Prasarana:

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang seperti Gedung Kantor dan Penggunaan Teknologi Informasi penunjang pelaksanaan pengawasan.

Anggaran:

- Tidak terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan.

Atas hal tersebut diperlukan solusi untuk perbaikan di masa mendatang diantaranya:

- Mengoptimalkan peran *Stakeholder* dalam membina Perangkat Daerah menerapkan Pengendalian Internal untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- Terus meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui Bimbingan Teknis, Diklat Teknis Substantif dan Diklat Fungsional dengan BPKP dan Lembaga lain yang kompeten.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja

Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah agenda pemerintah pusat dan daerah. Berbagai regulasi telah dikeluarkan dan dilakukan penyempurnaan mulai dari pusat hingga daerah.

Kemudian untuk menjamin pelaksanaan pemerintah yang baik (*good Governance*) perlu penjaminan akan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penerapan Manajemen Risiko organisasi. Dalam hal ini diharapkan Level SPIP Pemerintahan Daerah berada level berkembang atau level III.

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (penjaminan mutu) dan *Consulting Activity*, APIP dituntut untuk meningkatkan kapabilitas sebagai agenda utama Inspektorat Daerah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan target nasional yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten ditargetkan mencapai level 3 pada tahun 2022 namun belum dipenuhi.

Saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja sedang dalam tahap penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan serta mensosialisasikan berbagai sarana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menampung dan menindaklanjuti berbagai aduan dan aspirasi masyarakat.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat terus berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), tenaga fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, maka hingga saat Inspektorat Kabupaten Tana Toraja senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut.

Sampai saat ini, telah ada 32 (tiga puluh Dua) auditor telah bersertifikat dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan pertimbangan professional terhadap beban kerja, masih dibutuhkan setidaknya 10 (sepuluh) orang auditor, sedangkan PPUPD sampai saat ini, telah ada 4 (Empat). Dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan jabatan fungsional auditor, dan PPUPD diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Selain tantangan di atas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja yaitu pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024. Dalam Rancangan awal RKPD, Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja mengusulkan anggaran sebesar

Rp16.501.568.000,- *(enam belas milyar limaratus satu juta lima ratus enam puluh Delapan ribu rupiah)* yang direncanakan dipergunakan untuk keperluan belanja operasional terdiri dari belanja barang/jasa dan belanja modal untuk mencapai sasaran Strategis tahun 2024.

Dari total Rancangan anggaran tersebut, sebesar Rp2.000.000.000,- *(dua milyar rupiah direncanakan untuk digunakan dalam belanja rehabilitasi berat Gedung kantor inspektorat),* untuk keperluan kegiatan inti dalam mencapai target kinerja Perangkat Daerah. Dengan besaran anggaran tersebut, rencana capaian kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. 1 Dokumen Renja
2. 1 Dokumen RKA
3. 1 Dokumen RKA Perubahan
4. 1 Laporan Evaluasi, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
4. 1 Tahun Gaji dan Tunjangan ASN
5. 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. 1 Laporan Keuangan Semesteran
7. 4 Jenis Diklat
8. 3 Kali PKS
9. 12 Bulan Penyediaan Barang Pakai Habis
11. 1 Tahun Rapat Koordinasi dilaksanakan/diikuti
12. 1 Paket aset tak berwujud
13. 2 Jenis Benda Pos dan Jasa Pengiriman
14. 3 Jenis Rekening terbayarkan
15. 12 Bulan Tersedia jasa pelayanan umum kantor
16. 3 Unit Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 terpelihara
17. 3 Unit Roda 4 dan 20 Unit Roda 2 terpelihara

18. 3 Unit Peralatan terpelihara
19. 1 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
20. 30 Laporan Pengawasan Kinerja
21. 1 Laporan Pengawasan Keuangan
22. 29 Laporan Reviu Laporan Kinerja
23. 2 Laporan Reviu Laporan Keuangan
24. 8 Laporan Pengawasan Desa
25. 3 Laporan Joint Audit
26. 8 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi TL LHP APIP
27. 5 Laporan Penanganan Penyelesaian Perugian Negara/Daerah
28. 24 Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
29. 2 Dokumen Peraturan/Keputusan Kepala Daerah
30. 10 Dokumen Keputusan
31. 8 Laporan Hasil Konsultasi
32. 2 Laporan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB
33. 4 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi
34. 12 Laporan Penegakan Integritas

Berikut digambarkan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN TANA TORAJA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg / Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
A	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	1.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5.000.000	
B	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN	50 ASN	6.500.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	1.000.000	
C	***Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapanny a yang tersedia			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya		Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapanny a yang tersedia	50 ASN	268.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg / Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah ASN yang di nilai Kinerjanya oleh atasan langsung			Monitoring,Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah ASN yang di nilai kinerjanya oleh atasan langsung	50 ASN	54.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Diklat Bidang Pengawasan yang diikuti			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Diklat Bidang Pengawasan yang diikuti	4 Jenis	1.495.785.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	3 Kali PKS	800.000	
D	***Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah***										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Listrik yang disediakan			Peny.Komp. Instalasi Listrik/Penera ngan Bang.Kantor		Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	1 Tahun	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	65.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Bulan dilaksanakanny a Koordinasi dan Konsultasi			Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Bulan dilaksanakanny a Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	316.900.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg / Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	***Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***										
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah KDOS diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah KDOS diadakan	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	20.000.000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud			Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud	1 Paket	20.000.000	
F	***Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jenis Benda Pos dan Jasa Pengiriman			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jenis Benda Pos dan Jasa Pengiriman	2 Jenis	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan tersedianya Komunikasi SDA, dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan tersedianya Komunikasi SDA, dan Listrik	12 Bulan	42..000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	74.715.000	
G	***Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	3 Unit	174,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg / Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	20 Unit Roda	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara	3 Unit	5.600.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dilakukan Rehabilitasi Berat			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dilakukan Rehabilitasi Berat	1 Paket	2.000.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
H	***Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal***										
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	798.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jml. Lap. Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jml. Lap. Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	58.300.000	
	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah			Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	35 Laporan	931.000.000	
	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah			Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	116.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg / Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	473.600.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan Internal			Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan Internal	3 Laporan	116.600.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah laporan atas pemeriksaan TL BPK dan APIP			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah laporan atas pemeriksaan TL BPK dan APIP	9 Laporan	478.800.000	
I	***Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tetentu***										
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah		Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi			Penanganan Penyelesaian		Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi	6 Laporan	117.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	19 Laporan	1.010.800.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
J	***Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan***										
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Regulasi Pengawasan			Perumusan Kebijakan Teknis di Bid. Pengawasan		Jumlah Regulasi Pengawasan	2 Dokumen	12.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Jumlah Dokumen Keputusan			Perumusan Kebijakan Teknis di Bid.Fasilitas		Jumlah Dokumen Keputusan	10 Dokumen	10.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg / Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	***Kegiatan : Kegiatan Pendampingan dan Asistensi***										
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pendampingan urusan Pemerintah Daerah			Pendampingan & Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pendampingan urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	123.120.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi & Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 Laporan	116.600.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Koordinasi, Monitoring & Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Laporan Hasil Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	245.700.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Laporan	128.400.000	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh Inspektorat.

Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tana Toraja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, maka arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.
2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:
   a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
   b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
   c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:

a) Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

1) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;

2) penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan

3) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

c) Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:

1) Kinerja Rutin Pengawasan

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta

meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;`
3. reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5. reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;

7. reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
8. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
9. monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
10. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

2) Pengawasan Prioritas Nasional
   1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
   3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan

sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4. Pengawasan dana desa :
   - daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
   - daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. bantuan operasional sekolah (BOS):
   - inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran: (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan (2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
   - inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
    a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
    b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: 1) sistem pengendalian intern pemerintah; 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; 4) penilaian internal zona integritas; 5) penanganan benturan kepentingan; 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
    a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
    b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
    a. Penerapan Manajemen Risiko;
    b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
    c. Audit Kinerja;
    d. Audit Investigasi;
    e. Pemeriksaan DAK Fisik;

f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional PPUPD dan Auditor; dan
g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan dan sasaran renja 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja mengacu pada Rancangan Rencana Strategis 2021-2026 yaitu **"**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel" dengan sasaran "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan Pemerintah". Indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tana Toraja tersebut terdiri dari :

a. Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b. Persentase Hasil Pemeriksaan APFP ditindaklanjuti.
c. Maturitas SPIP dan Penerapan Manajemen Risiko OPD.
d. Kapabilitas APIP.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program penunjang urusan pemerintah daerah dapat dicapai melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   b. Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
   c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
   d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   b. Pengadaan Aset Tak Berwujud
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program penyelenggaaraan pengawasan dapat dicapai melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :
    a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    c. Reviu Laporan Kinerja
    d. Reviu Laporan Keuangan
    e. Pengawasan Desa
    f. Kerjasama Pengawasan Internal
    g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tetentu, dengan sub kegiatan :
    a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah
    b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dapat dicapai melalui kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, dengan sub kegiatan :
    a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
    a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
    b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasarkan rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, kemudian diuraikan output kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dalam tabel berikut.

PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN ANGARAN 2025

OPD : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

KODE					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	BIDANG URUSAN	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	**01**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	**2.01**	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	1 Dokumen	1.550.000	APBD		1 Dokumen	1.600.000
6	01	01	**2.01**	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahannya	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	2 Dokumen	1.000.000	APBD		2 Dokumen	1.350.000
6	01	01	**2.01**	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Kinerja Inspektorat	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	5 Dokumen	5.000.000	APBD		5 Dokumen	5.550.000
6	01	01	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan perangkat Daerah**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	**2.02**	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	50 ASN	6.500.000.000	APBD		50 ASN	6.600.000.000
6	01	01	**2.02**	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	2 Paket	1.000.000	APBD		2 Paket	1.500.000
6	01	01	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	**2.05**	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	50 ASN	268.800.000	APBD	-	50 ASN	268.800.000
6	01	01	**2.05**	03		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jenis Diklat Diikuti	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	4 Jenis	1.495.785.000	APBD		4 Jenis	1.595.785.000
6	01	01	**2.05**	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN dinilai kinerjanya oleh atasan langsung	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	50 ASN	54.000.000	APBD		54 ASN	54.600.000
6	01	01	**2.05**	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan disosialisasikan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	5 Peraturan	800.000	APBD		5 Peraturan	1.000.000

KODE					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	BIDANG URUSAN	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	**01**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum inspektorat**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	-	-	APBD		2 Jenis	10.000.000
6	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	-	-	APBD		15 Jenis	5.000.000
6	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	5 Jenis	2.500.000	APBD		5 Jenis	2.600.000
6	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK, barang cetak dan penggandaan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	30 Jenis	65..000.000	APBD		30 Jenis	65.000.000
6	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	1 Tahun	316.900.000	APBD		1 Tahun	326.800.000
6	01	01	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	**2.07**	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	-	-	APBD		2 Kendaraan Roda 2	70.000.000
6	01	01	**2.07**	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	2 Paket	20.000.000	APBD		3 Paket	30.000.000
6	01	01	**2.07**	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Layanan Konsultasi Online	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
6	01	01	**2.07**	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	-	-	APBD		1 paket	
6	**01**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan ATK	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	2 Jenis	1.000.000	APBD		2 Jenis	1,500.000
6	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening kantor	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	3 Jenis Rekening	42.000.000	APBD		3 Jenis Rekening	50.000.000
6	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan dan jasa kebersihan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	12 Bulan	74.715.000	APBD		12 Bulan	75.000.000

KODE					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	BIDANG URUSAN	TAHUN ANGGARAN 2023			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	**01**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	3 Unit	174.000.000	APBD		3 Unit	174.000.000
6	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	20 Unit	20.000.000	APBD		25 Unit	25.000.000
6	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	5 Jenis	5.600.000	APBD		7 Jenis	5.600.000
6	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya ruang kerja pegawai	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	1 Paket	2.000.000.000	APBD	Kontrak 2024	1 Paket	2.000.000.000
6	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Terselenggaranya Pengawasan Daerah**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	**01**	**02**	**2.01**			**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terlaksananya Pengawasan Internal**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	15 Laporan	798.000.000	APBD		35 Laporan	799.000.000
6	01	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	1 Laporan	58.300.000	APBD		1 Laporan	59.500.000
6	01	02	2.01	03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	35 Laporan	931.000.000	APBD		35 Laporan	932.000.000
6	01	02	2.01	04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	3 Laporan	116.600.000	APBD		3 Laporan	117.600.000
6	01	02	2.01	05		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Lembang	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	8 Laporan	473.600.000	APBD		8 Laporan	475.600.000
6	01	02	2.01	06		Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	3 Laporan	116.600.000	APBD		3 Laporan	117.900.000
6	01	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	9 Laporan	478.800.000	APBD		8 Laporan	479..800.000

KODE					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	BIDANG URUSAN	TAHUN ANGGARAN 2023			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	**01**	**02**	**2.02**			**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu dan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	02	2.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	6 Laporan	117.000.000	APBD		5 Laporan	118.000.000
6	01	02	2.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	19 Laporan	1.010..800.000	APBD		24 Laporan	1.011.800.000
6	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tersedianva Kebiiakan Teknis. Pendampingan dan Asistensi**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	**01**	**03**	**2.01**			**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Tersedianya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Adanya kebijakan Teknis di bidang pengawasan (JATEKWAS) tahunan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	2 Dokumen	12.000.000	APBD		2 Dokumen	13.000.000
6	01	03	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Adanya kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	10 Dokumen	10.000.000	APBD		10 Dokumen	15.000.000
6	**01**	**03**	**2.02**			**Asistensi dan Pendampingan**	**Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan**	**Inspektorat**		**100%**		**APBD**		**100%**	
6	01	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Konsultansi	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	12 Laporan	123.120..000	APBD		8 Laporan	124.050..000
6	01	03	2.02	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Penilaian RB	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	2 Laporan	116.600.000	APBD		2 Laporan	117.500.000
6	01	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pencegahan Korupsi	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	4 Laporan	245.700.000	APBD		4 Laporan	245.700.000
6	01	03	2.02	04		Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Penegakan Integritas	Inspektorat	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH	10 Laporan	128.400.000	APBD		12 Laporan	129.400.000
J U M L A H											**15.906.170.000**				**16.145.535.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana dalam Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 serta menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih.

Tana Toraja, Juni 2023

INSPEKTUR,

DAMORIS SEMBIRING, A.P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740707 199412 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024



KABUPATEN TANA TORAJA

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenaanya, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat terwujud. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dan menjadi pedoman untuk menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Tana Toraja, 2 Agustus 2023

Pj. Sekretaris Daerah

Muhammad Safar, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 197704091996121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam Periode Tahun Anggaran 2024 dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Sekretarit Daerah Kabupaten Tana Toraja. Sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disesuaikan

dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026.

Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan yang dijabarkan dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahapan :

1. *Penyusunan rencana*
2. *Penetapan rencana*
3. *Pengendalian pelaksanaan rencana*
4. *Evaluasi pelaksanaan rencana*

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah maka perlu dilakukan suatu Perencanaan Strategis (Renstra) yang di dalamnya memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan Strategis ini dilaksanakan untuk pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Rencana Strategis Sekretariat Daerah diaplikasikan dalam Rencana Kerja yang dibuat setiap tahunnya. Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah yang menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah.

Demikian pula dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang disusun setiap tahunnya juga merupakan breakdown atau turunan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah penjabaran tahun Pertama dari Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah memuat program kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas dan pembangunan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) haruslah berdasar dan mempunyai landasan hukum yang menjadi acuan dan pilar. Oleh karena itu maka penyusunan Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

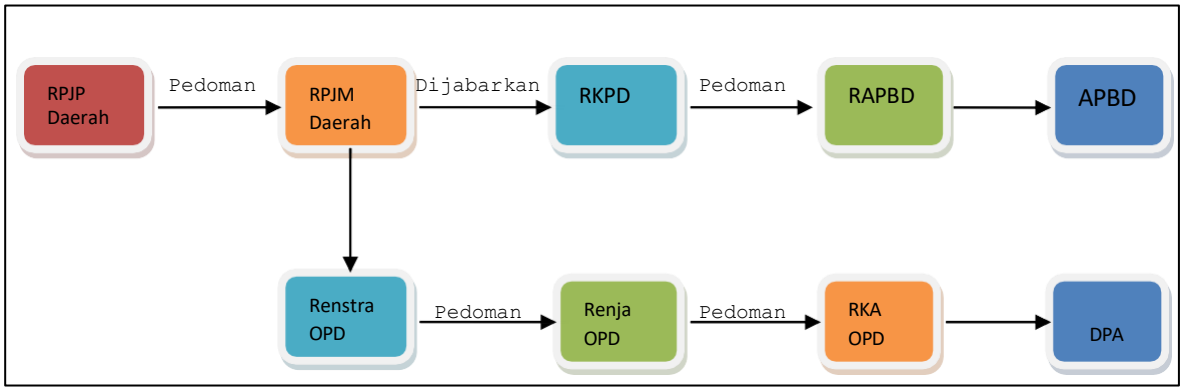
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 3 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dama Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 29) ;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja.

C. Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Lainnya

Rencana Kerja yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan atau hubungan dengan dokumen lainnya. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini merupakan paparan rencana program kegiatan tahunan untuk pelaksanaan atau implementasi dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah setiap tahunnya. Lebih jauh keterkaitan Renja dengan dokumen lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Dari gambar di atas terlihat jelas hubungan antara beberapa dokumen perencanan daerah mulai dari RPJP yang waktunya 25 Tahun, kemudian RPJM dengan jangka waktu berlaku selama 5 tahun dan RKPD jangka berlaku 1 (satu) tahun yang selanjutnya diturunkan pada Renja yang merupakan perencanaan dengan cakupan lebih kecil yakni OPD dengan waktu berlaku selama 1(satu) tahun. Renja ini kemudian berkaitan dokumen penganggaran berupa RKA OPD yang nantinya akan berproses menjadi bagian untuk dokumen anggaran daerah berupa RAPBD. Yang pada akhirnya akan berujung pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dimana program dan kegiatan serta belanja akan terinci sesuai dengan kebutuhan dan target pada perencanaan.

D. Maksud dan Tujuan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian dalam penyusunan Rencana Kerja berupaya untuk merangkum semua program dan kegiatan yang dalam bidang koordinasi dari 10 (sepuluh) bagian yang ada yang telah disatukan dalam bentuk Renstra. Secara umum penyusunan rencana kerja diperuntukkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Bertolak dari hal ini maka secara rinci maksud dari penyusunan rencana kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
2. Rencana Kerja merupakan pedoman dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja

Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja bertujuan untuk :

a. Guna menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kegiatan teknis, penyelenggaraan

urusan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

b. Mengarahkan program kegiatan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis serta memberikan masukan bagi perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah mengikuti kaidah penulisan atau sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Lain

D. Maksud Dan Tujuan

E. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (MATRIKS KEGIATAN)

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 memuat beberapa program dan kegiatan. Capaian target kinerja pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

(look at File EVALUASI RENJA SETDA 2023 MATRIKS)

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang dihadapi khususnya pada Sekretariat Daerah tidak terlepas dari permasalahan pembangunan daerah secara umum dan yang tengah menjadi masalah mengemuka dan dihadapi di Kabupaten Tana Toraja. Merujuk dari hal tersebut maka berikut dapat diuraikan permasalahan yang diidentifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

1. Untuk reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan khususnya dalam pemberlakuan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan yang diberikan belum optimal dalam hal kualitas. Hal ini sangat kuat hubungannya dengan sarana prasarana pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Terkait dengan standar baku yang digunakan untuk penilaian dan tolak ukur dari pelayanan.
2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang ada pada Sekretariat Daerah belum memadai. Sebagai penggerak dan fungsi koordinasi, integritas dan sinkronisasi Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, seyogyanya aparatur yang ada lebih ditingkatkan kualitasnya dengan peningkatan kapasitas melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, bimbingan teknis dan pendidikan serta menambah kuantitas aparatur yang ada pada semua bagian sesuai dengan keahlian dan spesifikasi

pendidikan masing-masing bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

3. Permasalahan yang terakhir adalah tidak terlepas dari hal Pendanaan atau Anggaran. Program dan kegiatan yang direncanakan dan tersebar pada 10 (sepuluh) bagian tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dialokasikan.

4. Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan dengan OPD di bawah koordinasi masing-masing bagian.

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan Dan Sasaran Kegiatan Pembangunan Daerah

Secara umum bahwa esensi dari tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan ini menjadi tujuan pembangunan di segala bidang dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Tidak terkecuali pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang termasuk dalam kelompok Bidang Otonomi Daerah sebagai fungsi koordinasi, integritas dan sinkronisasi. Dimana bahwa tujuan pembangunan Sekretariat Daerah tidak terlepas dari tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari misi Sekretariat Daerah yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tujuan pembangunan ini bersifat idealis dan mempunyai jangkauan ke depan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Proses dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat Daerah lebih dominan diarahkan pada **pembangunan non-fisik.** Program kegiatan lebih diarahkan pada penyiapan rancangan-rancangan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan pelaksanaan penyelenggaraaan tata kelola pemerintah daerah.

Sekretariat Daerah secara struktural terdiri dari 10 (sepuluh) bagian yang dikoordinir dan dibawahi oleh 3 (tiga) Asisten, adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian:
   - Bagian Pemerintahan
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat
   - Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan 3 (tiga) Bagian :
   - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   - Bagian Administrasi Pembangunan
   - Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian:
   - Bagian Umum
   - Bagian Perencanaan dan Keuangan
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kesepuluh Bagian ini masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidang urusan. Pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi koordinasi, integritas dan sinkronisasi dari masing-masing bagian sehingga pembangunan dalam program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Sekretariat Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan

dicapai secara nyata. Obyek utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun yang terpenting bahwa dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan berorientasi pada hasil pencapaian. Adapun sasaran secara terinci yang telah dan terus akan diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 adalah :

1. Terbentuknya unit-unit/perangkat daerah dengan struktur yang memadai sesuai kondisi dan potensi daerah;
2. Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparat Sekretariat Daerah;
3. Meningkatnya pelayanan, baik terhadap perangkat daerah maupun kepada masyarakat;
4. Tersusunnya uraian tugas yang jelas pada setiap unit kerja;
5. Tersusunnya peraturan daerah sebagai landasan hukum dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat;
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari keenam sasaran pembangunan di atas ini setiap tahunnya telah diupayakan pencapaiannya atau penajaman dari sasaran tersebut apabila tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu hanya 1 (satu) tahun.

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Sekretariat Daerah

Guna pencapaian sasaran yang ada yang berorientasi pada hasil setiap tahunnya maka Sekretariat Daerah menurunkan dalam beberapa program kegiatan yang diharapkan dapat mengakomodir percepatan pencapaian pembangunan sesuai bidang koordinasi, integritas dan sinkronisasi. Selain program kegiatan rutin untuk keberlangsungan administrasi kepemerintahan maka terdapat program yang diharapkan dapat lebih menstimulasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada Sekretariat Daerah.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2024 program kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :

1. ***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD ;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD Sekda ;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. **Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah :**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :**
    a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut lainnya;
    b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
    c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah :**
    a. Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor.
    b. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;
    d. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan;
    e. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    g. Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD.

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah:**
    a. Pengadaan Mebel;
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin.

6. **Penyediaan Jasa Urusan Penunjang pemerintah Daerah**
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang dipakai;
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan;
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

8. **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:**

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut serta Kelengkapannya;
   c. Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. **Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah :**

   a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah ;
   b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.

10. **Penataan Organisasi :**

    a. Pengelolaan Kelembagaan Analisis dan Jabatan;
    b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksanan;
    c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
    d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

a. Fasilitas Keprotokolan;
b. Fasilitas Komunikasi Pimpinnan;
c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT*:*

1. Administrasi Tata Pemerintahan

a. Penataan Administrasi Pemerintahan ;
b. Pengelolaan Administrasi Kewilayaan;
c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat :

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual.
b. Pelaksanaan Kebijakan evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial ;
c. Pelaksanaan Kebijakan evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

3. *Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*

a. Fasilitas Penyususnan Produk Hukum Daerah
b. Fasilitasi Bantuan Hukum
c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Infromasi Hukum.

4. Fasilitas Kerja Sama Daerah :

a. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

a. Koordinasi , sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
d. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;
e. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Pengelolaan Pengadaan Brang dan Jasa :

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
c. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/Jasa.

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam :

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan, dan Lingkungan Hidup;
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
c. Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja sebagai penetapan target yang akan dicapai ke depan yang diaplikasikan dalam program dan kegiatan tidak bisa dipisahkan dan harus berbanding lurus dengan pendanaan atau anggaran. Program dan kegiatan dapat berjalan apabila tersedia pendanaan. Demikian juga sebaliknya tetap mengupayakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dengan ketersediaan dana yang ada. Untuk itu maka Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Matriks Kegiatan Pembangunan berikut ini :

(look at File RENJA SETDA 2024 MATRIKS)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024.

5. 1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Sulawesi Selatan, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

2. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat

Daerah Kabupaten Tana Toraja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan pencapaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD untuk tahun 2021 - 2026 dan menjadi kewajiban kita bersama untuk pencapaian dari Visi Misi tersebut. Rencana kerja menjadi acuan untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Lingkungan kerja Sekretariat Daerah.

Dengan harapan bahwa rencana kerja ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan setiap kebijakan terutama dalam hal penganggaran untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian di Sekretariat Daerah.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja, semoga apa yang direncanakan ini dapat terealisasi sesuai dengan cita-cita luhur Reformasi Birokrasi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

OPD : Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	MENINGKATNYA KUALI-TAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI DENGAN STANDAR																					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu																					
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	1	50.000.000	1	3.492.000	1	3.780.000	-		-	-	-	3.500.000	1	-	1	3.500.000	2	6.992.000	200	14	Setda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koor-dinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	50.000.000	1	6.340.000	1	4.220.000	-	-	-	-	-	4.220.000	1	-	1	4.220.000	2	10.560.000	200	21	Setda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen peruba-han RKA-SKPD	1	50.000.000	1	4.840.000	1	4.220.000	-	-	-	4.220.000	-	-	1	-	1	4.220.000	2	9.060.000	200	18	Setda
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98**	**200**	**98**			
			Predikat kinerja															**ST**	**ST**					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi Keu-angan Kinerja Sekretariat Dae-rah Kabupaten Tana Toraja Tepat Waktu**																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	12.000.000.000	14	8.586.890.000	#	9.061.244.996	3	1.274.944.623	4	2.327.683.623	4	2.353.196.310	3	2.909.543.669	14	8.865.368.225	28	17.452.258.225	200	145	Setda

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyesunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	2.110.000		-		-		-	1	2.110.000	1	2.110.000	1	2.110.000		100	
		Koordinasi dan Penyesunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran					1	5.930.000		-		-		2.800.000	1	3.130.000	1	5.930.000	1	5.930.000		100	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**97,84**					
			Predikat kinerja															**ST**	**ST**					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pegawai Sekreta-riat Daerah Kabu-paten Tana Toraja**																					
		Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6	34.100.000	6	62.700.000	6	12.800.000	-	-	-	-	-	-	3	12.800.000	3	12.800.000	9	75.500.000	150	221	Setda
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					#	182.140.000	-	-	-	-	-	-	573	163.225.000	573	163.225.000	573	163.225.000	#DIV/0!		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					#	36.200.000				10.100.000		26.100.000	270		270	36.200.000	270	36.200.000	#DIV/0!		
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**50**	**100,00**					
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupa-ten Tana Toraja berjalan sesuai standar**																					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalas Listriki/ penerangan bangunan	Jumlah Paket Komponen Instala-si Listrik/enerangan bangunan Kantor yang disediakan	24	350.000.000	24	488.000.000	#	3.000.000	-	-	1	264.300	6	164.500	17	418.800	24	847.600	48	488.847.600	200	140	Setda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Per-lengkapan Kantor yang disediakan	12	650.000.000	12	1.089.152.000	12	311.646.000	-	-	-	-	3	127.021.585	6	165.265.000	9	292.286.585	21	1.381.438.585	175	213	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan					25	160.800.000				8.814.000		32.518.600	25	119.455.400	25	160.788.000	25	160.788.000			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	-	12	63.626.600	12	103.533.600	-	-	2	8.814.000	6	32.518.600	4	48.161.000	12	89.493.600	24	153.120.200	200	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	255.000.000	12	27.000.000	12	12.600.000	-	-	-	-	8	3.960.000	4	8.640.000	12	12.600.000	24	39.600.000	200	16	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12	2.500.000.000	12	1.243.850.000	12	1.274.925.000	-	-	2	71.445.000	3	351.090.000	5	475.345.000	10	897.880.000	22	2.141.730.000	183,33	86	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	4.500.000.000	24	3.236.342.000	24	3.023.460.000	-	-	5	779.708.643	7	745.695.273	8	953.192.430	20	2.478.596.346	44	5.714.938.346	183,33	127	
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**90,28**	**76,81**					
									Predikat kinerja									**ST**	**T**					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi**																					
		Pengadaan Kendaraaan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	-		-	0	-	-	-	-	-		-		-	0	-	0	-	0	0	Setda
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	24	-		230.000.000	24	245.500.000	-	-	-	-		90.000.000	20	155.371.900	20	245.371.900	20	475.371.900	83,333	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		-		-	12	103.100.000						6.993.000	10	91.950.000	10	98.943.000	10	98.943.000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	18	-		710.358.000	18	63.500.000	-	-	2	-	2	39.949.200	14	23.500.000	18	63.449.200	18	773.807.200	100	0	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**88,89**	**98,61**					
			Predikat kinerja															**T**	**ST**					
		Penyediaan Jasa Penun-jang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	120.000.000	12	184.890.000	12	129.829.000	-	-	2	18.342.000	4	32.270.000	6	61.055.000	12	111.667.000	24	296.557.000	200	247	Setda
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik yang dipakai	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	950.000.000	24	453.808.000	24	495.000.000	-	-	12	214.631.481	6	123.530.277	6	97.444.355	24	435.606.113	48	889.414.113	133,33	94	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	350.000.000	-	312.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.556.000	0	89	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24	5.459.958.000	24	1.328.300.000	24	1.036.365.000	-	-	4	109.455.000	8	390.007.420	12	350.630.909	24	850.093.329	48	2.178.393.329	200	40	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**85,35**					
			Predikat kinerja															**ST**	**T**					
		Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**																					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliha-raan dan Pajak Kendaraan Per-orangan, dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	1.200.000.000	56	854.183.400	56	1.187.035.000	-	-	18	266.319.067	18	241.572.055	20	282.291.829	56	790.182.951	112	1.644.366.351	224	137	Setda
		Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	2	42.264.500	1	-		-		-		-		-		-	-	-	1	-	50	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	-	-	-	44	38.390.000	-	-	15	6.299.500		-	29	16.515.500	44	22.815.000	44	22.815.000	73,333		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendu-kung gedung kantor atau bangu-nan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50	-		-	20	788.172.000	-	-	3	6.229.500	7	29.287.000	10	326.068.000	20	361.584.500	20	361.584.500	40		
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**66,57**					
			Predikat kinerja															**ST**	**S**					
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase administrasi keuangan dan Operasional KD dan WKD Kabupa-ten Tana Toraja Tepat Waktu**																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Menerimah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah	24	165.000.000	24	650.534.000	28	166.313.778	6	35.568.372	10	59.280.580	6	35.932.272	6	35.204.472	28	165.985.696	52	816.519.696	216,67	495	Setda
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)	28	-	28	63.000.000	20	80.000.000		-		-	-	-	20	70.000.000	20	70.000.000	48	133.000.000	171,43	0	
		Medical Chek Up-Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	600.000.000	28	150.000.000	6	160.000.000	-	-	1	8.435.100	2	12.269.200	3	65.637.600	6	86.341.900	34	236.341.900	121,43	39	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerimah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	1.700.000.000	0	-	24	480.000.000		-	12	160.000.000	6	160.000.000	6	160.000.000	24	480.000.000	24	480.000.000	100	28	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**80,42**					
			Predikat kinerja															**ST**	**T**					
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD dan WKD Kabupaten Tana Toraja yang disediakan**																					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12	1.100.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	-	-	-	-	-	-	12	720.000.000	12	720.000.000	24	1.440.000.000	200	131	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12	1.000.000.000	12	480.000.000	12	480.000.000	-	-	5	160.000.000	3	160.000.000	4	160.000.000	12	480.000.000	24	960.000.000	200	96	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12	7.000.000.000	0	-				-		-		-		-	-	-	-	-	0	0	Setda
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia		80.000.000		-		-		-		-		-		-			-	-	0	0	
		Pengadaan Alat -Alat Studio /Dokumentasi	Jumlah alat-alat studio/dokumentasi yang diadakan		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	0	0	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**100**					
			Predikat kinerja															**ST**	**ST**					
		Penataan Organisasi	**Jumlah Persentase Kelembagaan yang Terlaksana**																					
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	32.920.000	1	115.850.000	1	247.650.000	-	-	-	-	-	-	1	231.875.000	1	231.875.000	2	347.725.000	200	1056	Setda
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	71.820.000	0	-	3	16.750.000	-	-	-	-	2	5.235.000	1	3.000.000	3	8.235.000	3	8.235.000	300	11	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Refirmasi Birokrasi	1	91.904.500	0	-	1	14.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyususnan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	19.070.000	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**67**	**47,60**					
									Predikat kinerja									**S**	**SR**					
		Pelaksanaan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah Fasilitasi Keprotokoleran dan Dokumentasi yang Tersedia**																					
		Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	24	59.312.000	24	623.847.000	12	66.264.000	4		5	28.531.200	6	11.052.000	9	26.341.200	12	65.924.400	36	689.771.400	150	1163	Setda
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	886.836.000	12	-	12	13.869.000		-		-	-	-	12	12.669.000	12	12.669.000	24	12.669.000	200	1	
		Pendokumen-tasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24	44.186.000	24	36.996.000	24	27.373.000		-		6.680.400	8	9.560.000	14	10.493.000	22	26.733.400	46	63.729.400	191,67	144	
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**97,22**	**96,17**					
									Predikat kinerja									**ST**	**ST**					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**CAKUPAN PERSENTASE JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIFASILITA-SI, DIMONITORING**																					
		Administrasi Tata Pemerintah	**Persentase Tata Kelolah Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan**																					
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	24	357.000.000	24	246.250.000	#	554.528.200	-	-	-	-	6	342.725.000	18	204.632.274	24	547.357.274	48	793.607.274	200	222	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					6	135.500.000							6	135.447.600	6	135.447.600					Setda
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	2.867.619.000	12	-	#	123.050.000	-	-	4	37.775.000	3	31.379.200	5	46.826.400	12	115.980.600	24	115.980.600	200	4	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**97,64**					
			Predikat kinerja															**ST**	**ST**					
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Kebijakan Kese-jahteraan Rakyat yang diimplemen-tasikan**																					
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	2.941.725.000	12	4.945.000.000	12	3.518.225.000	-	-	6	-	2	244.725.000	4	3.245.720.000	12	3.490.445.000	24	8.435.445.000	200	287	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejah-teraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmig-rasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengenda-lian Penduduk dan KB	12	301.066.000	12	2.000.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.000.000	100	1	Setda
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capai-an Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata.	12	98.000.000	-	-	6	19.550.000		-	-	-	2	4.500.000	4	13.050.000	6	17.550.000	6	17.550.000	50	18	
		Fasilitasi Penyu-sunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	12	60.500.000	12	15.010.000	25	154.650.000		-		78.375.000		16.600.000	75	19.044.000	75	114.019.000	87	129.029.000	725	213	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**50**	**49,61**					
			Predikat kinerja															**SR**	**SR**					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**																					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum	12	80.090.000	12	161.900.000	2	366.650.000		-		-	-	16.200.000	1	219.750.000	1	235.950.000	13	397.850.000	108,33	497	Setda
		Pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bagi masyarakat	12	114.000.000	12	51.250.000	1	9.675.000		-		-	1	9.675.000		-	1	9.675.000	13	60.925.000	108,33	53	Setda
		Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peningkatan kualitas produk hukum daerah (Ranperda, Perbup, Keputusan Bupati)	12	180.000.000	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	0	-	0	0	
		Fasilitas Kerja Sama Daalm Negeri	Jumlah peningkatan kualitas produk hukum daerah (Ranperda, Perbup, Keputusan Bupati)			-	-	2	11.725.000		-		-	1	7.710.400	1	3.917.000	2	11.627.400	2	11.627.400	0	0	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**83,33**	**87,84**					
			Predikat kinerja															**T**	**T**					
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Diimplementasikan**																					
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah Kebijak-an Perekonomian yang Diimplemen-tasikan**																					
		Koordinasi, Singkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebija-kan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Koordinasi, Singkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	30.000.000	1	19.292.000	1	17.821.800	-	-	-	2.692.000	1	13.231.800		670.000	1	16.593.800	2	35.885.800	100	120	Setda
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Pereko-nomian (Rastra)	24	125.000.000	12	52.692.000	12	72.392.000	-	-	2	8.890.800	4	24.380.000	6	39.101.200	12	72.372.000	24	125.064.000	100	100	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan dan Pengawa-san Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Perencana-an dan Pengawa-san Ekonomi Mikro Kecil	12	150.000.000	12	34.874.000	12	16.244.000	-	-	-	14.566.000		430.000		1.078.000	12	16.074.000	24	50.948.000	200	34	
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**100**	**97,35**					
									Predikat kinerja									**ST**	**ST**					
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Tersedianya Laporan Bidang Pembangunan sesuai dengan Rencana**																					
		Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan	Tersedianya Laporan Bidang Pembangunan	1	35.000.000	1	6.119.600	1	810.000		-		-		-		810.000	1	810.000	2	6.929.600	200	20	Setda
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Pengelola-an Evaluasi dan Pe-laporan Pelaksana-an Pembangunan	1	70.000.000	1	7.128.000	1	2.208.000		-		-		864.000		1.344.000	1	2.208.000	2	9.336.000	200	13	
		Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	1	330.000.000	1	290.020.000	1	245.645.000		-		7.840.000		124.950.000		112.855.000	1	245.645.000	2	535.665.000	200	162	
		Pengelolaan Layanan Penga-daan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	190.000.000	12	-	1	3.000.000		-		-		-		2.952.600	-	2.952.600	12	2.952.600	100	2	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	1	150.000.000	1	39.345.000	1	25.850.000		-		-		-		23.410.000	1	23.410.000	2	62.755.000	200	42	
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**100**	**97,64**					
									Predikat kinerja									**ST**	**ST**					
		Pemantauan Kebijakan SDA	**Jumlah Pemantauan Kebijakan SDA yang terlaksana**																					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebija-kan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12	140.000.000	12	529.027.631	12	318.900.230		-	1	20.778.800	1	7.356.000	10	285.040.025	12	313.174.825	24	842.202.456	200	602	Setda

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sin-kronisasi dan Evaluasi Kebija-kan Pertamba-ngan dan Ling-kungan hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan hidup	12	135.000.000		-		-									-	-	0	-	0	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	45.000.000		-		-	-		-		-		-		-	-	0	-	0	0	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98,20**					
			Predikat kinerja															**ST**	**ST**					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	**Cakupan Persentase Pembinaan Kepemudaan**																					
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Jumlah Pengem-bangan Kapasi-tas kepemudaan yang terlaksana**																					
		Koordinasi, Singkronisasi, dan Pengemba-ngan Pemuda dan Kepemu-daan Terhadap Pemuda Pelopor	Jumlah Koordinasi, Singkronisasi, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	1	98.860.000	1	-		-	-	-	-		-		-		-	-	1	-	100	0	Setda
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**-**	**-**					
			Predikat kinerja															**SR**	**SR**					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**49.731.231.000**		**28.126.463.231**		**26.358.944.604**		**1.310.512.995**		**4.426.170.994**		**5.872.368.692**		**12.111.742.163**		**23.728.834.844**		**50.868.254.975**			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																		**####**	**81,95**					
PREDIKAT KINERJA																		**T**	**T**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: terdapat sisa alokasi dana DAK non fisik tahun 2022 yang dapat digunakan pada tahun 2023 untuk kegiatan-kegiatan administrasi kependudukan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Lambatnya DPA SKPD keluar dan untuk kegiatan-kegaiatan yang melalui penyedia masih dalam proses pengadaan.

Makale, Februari 2024

SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH,

dr. RUDHY ANDI LOLO, M.Kes,.Sp.An
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. : 19720218 200312 1 004

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	**4**	**01**	**01**				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR**	**Kabupaten Tana Toraja**		**26.340.926.930**			**100%**	**27.058.577.900**
	4	**01**	**01**	**2.01**			**1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**	**Kabupaten Tana Toraja**		**32.740.000**			**100%**	**32.740.000**
	4	01	01	2.01	0001		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	22.370.000	APBD		1 Dokumen	22.370.000
	4	01	01	2.01	0002		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Tana Toraja	10 Dokumen	4.260.000	APBD		10 Dokumen	4.260.000
	4	01	01	2.01	0003		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Tana Toraja	10 Dokumen	4.260.000	APBD		10 Dokumen	4.260.000
	4	01	01	2.01	0006		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tana Toraja	1 Laporan	1.850.000	APBD		1 Laporan	1.850.000
	4	**01**	**01**	**2.02**			**2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja**	**Kabupaten Tana Toraja**		**9.682.971.000**				**9.679.211.000**
	4.	01	01	2.02	0001		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimah Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tana Toraja	110 OB	9.679.211.000	APBD		110 OB	9.679.211.000

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4.	01	01	2.02	0005		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tana Toraja	1 Laporan	1.850.000	APBD		1 Laporan	1.850.000
	4.	01	01	2.02	0007		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kabupaten Tana Toraja	1 Laporan	1.910.000	APBD		1 Laporan	1.910.000
	4	**01**	**01**	**2.05**			**3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaiian Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja		**1.069.385.000**				**1.096.645.000**
	4.	01	01	2.05	0002		1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kabupaten Tana Toraja	24 Paket	219.000.000	APBD		24 Paket	236.260.000
	4.	01	01	2.05	0009		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Tana Toraja	12 Orang	339.360.000	APBD		12 Orang	344.360.000
	4.	01	01	2.05	0010		3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Tana Toraja	1330 Orang	367.365.000	APBD		1330 Orang	367.365.000
	4.	01	01	2.05	0011		4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tana Toraja	306 Orang	143.660.000	APBD		306 Orang	148.660.000
	4	**01**	**01**	**2.06**			**4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja berjalan sesuai standar	Kabupaten Tana Toraja		**5.637.538.000**				**5.700.584.000**
		01	01	2.06	0001		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	2 Paket	73.060.000	APBD		2 Paket	75.366.000
	4	01	01	2.06	0002		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	8 Paket	459.160.000	APBD		8 Paket	461.160.000

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		01	01	2.06	0003		3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	2 Paket	150.000.000	APBD		2 Paket	150.000.000
	4	01	01	2.06	0005		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	8 Paket	200.118.000	APBD		8 Paket	210.898.000
	4	01	01	2.06	0006		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	125.000.000	APBD		1 Dokumen	130.000.000
	4	01	01	2.06	0008		6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tana Toraja	25 Laporan	830.000.000	APBD		25 Laporan	835.000.000
	4	01	01	2.06	0009		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tana Toraja	10 Laporan	3.800.200.000	APBD		10 Laporan	3.838.160.000
	4	**01**	**01**	2.07			**5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi	Kabupaten Tana Toraja	100%	**2.837.800.000**			100%	**2.302.230.000**
		01	01	2.07	0001		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	2 Unit	880.000.000	APBD		2 Unit	880.000.000
	4	01	01	2.07	0002		2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	17 Unit	970.100.000	APBD		17 Unit	416.000.000
	4	01	01	2.07	0005.		3. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	9 Paket	200.000.000	APBD		9 Paket	200.000.000
	4	01	01	2.07	0006.		4. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	9 Unit	407.700.000	APBD		9 Unit	426.230.000
	4	01	01	2.07	0011.		5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	10 Unit	380.000.000	APBD		10 Unit	380.000.000

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4	**01**	**01**	**2.08**			**6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	**2.043.219.000**			100%	**2.094.669.100**
	4	01	01	2.08	01		1. Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tana Toraja	10 Laporan	217.008.000	APBD		10 Laporan	261.706.000
	4	01	01	2.08	02		2. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	2 Laporan	644.500.000	APBD		2 Laporan	644.500.000
	4	01	01	2.08	03		3. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	10 Laporan	160.190.000	APBD		10 Laporan	166.690.000
	4	01	01	2.08	04.		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	3 Laporan	1.021.521.000	APBD		3 Laporan	1.021.773.100
	4	**01**	**01**	**2.09**			**7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kabupaten Tana Toraja	100%	**2.230.960.000**			100%	**2.256.185.000**
	4.	01	01	2.09	01		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Tana Toraja	50 Unit	1.232.500.000	APBD		50 Unit	1.245.000.000
	4.	01	01	2.09	02		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Tana Toraja	5 Unit	64.800.000	APBD		5 Unit	69.800.000
	4.	01	01	2.09	06		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	91.160.000			Kabupaten Tana Toraja	94.635.000
	4.	01	01	2.09	09		4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Tana Toraja	20 Unit	840.000.000			20 Unit	844.000.000

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4.	01	01	2.09	11		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Tana Toraja	5 Unit	2.500.000			5 Unit	2.750.000
	4.	**01**	**01**	**2.11**			**8 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase administrasi keuangan dan Operasional KD dan WKD Kabupaten Tana Toraja Tepat Waktu	Kabupaten Tana Toraja	100%	**1.606.313.800**			100%	**1.606.313.800**
	4.	01	01	2.11	01		1 Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerimah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah	Kabupaten Tana Toraja	2 OB	166.313.800	APBD		2 OB	166.313.800
	4.	01	01	2.11	02		2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	18 Paket	800.000.000	APBD		18 Paket	800.000.000
	4.	01	01	2.11	03		3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Tana Toraja	6 Orang	160.000.000	APBD		6 Orang	160.000.000
	4.	01	01	2.11	04		4 Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerimah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Tana Toraja	2 OB	480.000.000	APBD		2 OB	480.000.000
	4.	**01**	**01**	**2.12**			**9 Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat daerah**	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD dan WKD Kabupaten Tana Toraja yang disediakan		100%	**1.200.000.000**			100%	**1.200.000.000**
	4.	01	01	2.12	01		1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	1 Paket	720.000.000	APBD		Paket	720.000.000
	4.	01	01	2.12	02		2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	1Paket	480.000.000	APBD		Paket	480.000.000

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4.	**01**	**01**	**2.13**			**10 Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi terlaksana dengan baik**	Kabupaten Tana Toraja	**100%**	**750.000.000**			**100%**	**750.000.000**
	4.	01	01	**2.13**	01		1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Tana Toraja	30 Dokumen	300.000.000	APBD		30 Dokumen	300.000.000
	4.	01	01	2.13	02		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Tana Toraja	1 Laporan	250.000.000	APBD		1 Laporan	250.000.000
	4.	01	01	2.13	03		3. Peningkatan Kinerja dan Refirmasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Refirmasi Birokrasi	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
	4.	**01**	**01**	**2.14**			**11 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik**		**100%**	**310.000.000**			**100%**	**340.000.000**
	4.	01	01	2.14	01.		1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Tana Toraja	12 Laporan	120.000.000	APBD		12 Laporan	130.000.000
	4.	01	01	2.14	02.		2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Tana Toraja	11 Laporan	90.000.000	APBD		11 Laporan	100.000.000
	4.	01	01	2.14	03.		3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Tana Toraja	18 Laporan	100.000.000	APBD		18 Laporan	110.000.000
	4	**01**	**02**			**Mewujudkan Tata Kehidupan Sosial yang Harmonis, Toleran dan Saling Menghormati**	**2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN DAERAH**	**CAKUPAN PERSENTASE JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIFASILITASI, DIMONITORING DAN DIEVALIASI.** **PERSENTASE KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DIIMPLEMENTASIKAN SESUAI RENCANA**			**8.736.860.000**				**8.736.860.000**
	4	**01**	**02**	**2,01**			**1 Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Tata Kelolah Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan**	**Kabupaten Tana Toraja**		**2.200.000.000**				**2.200.000.000**

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4.	01	02	**2.01**	01		1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	1.200.000.000	APBD		1 Dokumen	1.200.000.000
	4.	01	02	2.01	02		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000
	4.	01	02	2.01	03		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Tana Toraja	3 Dokumen	500.000.000	APBD		3 Dokumen	500.000.000
	4	**01**	**02**	**2.02**			**2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan**			**5.400.000.000**	**APBD**			**5.400.000.000**
	4	01	02	2.02	01		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Tana Toraja	100 Dokumen	5.000.000.000	APBD		100 Dokumen	5.000.000.000
	4	01	02	2.02	02		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Tana Toraja	20 Dokumen	200.000.000	APBD		20 Dokumen	200.000.000
	4	01	02	2.02	03		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan , trantibum Limnas		20 Dokumen	200.000.000	APBD		20 Dokumen	200.000.000
	4	**01**	**02**	**2.03**			**3 Fasilitas dan Koordinasi Hukum**	Persentase terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum			**936.860.000**				**936.860.000**

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4	01	02	2.03	01		1. Fasilitas Penyususnan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Kabupaten Tana Toraja	6 Dokumen	143.500.000	APBD		6 Dokumen	143.500.000
	4	01	02	2.03	02		2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Tana Toraja	4 Kasus	771.350.000	APBD		4 Kasus	771.350.000
	4	01	02	2.03	03		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	Kabupaten Tana Toraja	2 Dokumen	22.010.000	APBD		2 Dokumen	22.010.000
	4	**01**	**02**	**2.04**			**4 Fasilitas Kerja Sama Daerah**	Persentase Kerjasama dalam Negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama			200.000.000				200.000.000
	4	01	02	2.04	03		1 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Tana Toraja	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
	4	**01**	**03**			**Mengoptimalkan Tata Kelolah Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**	**3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN SESUAI RENCANA.**			**2.333.207.000**				**2.190.927.700**
	4	**01**	**03**	**2.01**			**1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pengembangan Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti**			**565.000.000**				**605.000.000**
	4	01	03	2.01	01		1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	75.000.000
	4	01	03	2.01	02		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Tersussunnya Standar Harga	Kabupaten Tana Toraja	2 Laporan	250.000.000	APBD		2 Laporan	250.000.000
	4	01	03	2.01	03		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	185.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4	01	03	2.01	04		4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
	4	01	03	2.01	05		5. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
	4	**01**	**03**	**2.02**			**2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan			161.000.000				181.000.000
	4	01	03	2.02	02		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Tana Toraja	2 Dokumen	140.000.000	APBD		2 Dokumen	160.000.000
	4	01	03	2.02	02		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan HasilPengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Tana Toraja	12 Laporan	11.000.000	APBD		12 Laporan	11.000.000
	4	01	03	2.02	03		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Tana Toraja	4 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	10.000.000
	4	**01**	**03**	**2.03**			**3 Pengelolaan Pengadaan Brang dan Jasa**	**Persentase Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**			**777.207.000**				**854.927.700**
	4	01	03	2.03	01		1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Tana Toraja	3 Dokumen	517.500.000	APBD		3 Dokumen	569.250.000
	4	01	03	2.03	02		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	120.000.000	APBD		1 Dokumen	132.000.000
	4	01	03	2.03	06		3. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/Jasa	Kabupaten Tana Toraja	100 Orang	139.707.000	APBD		100 Orang	153.677.700

NO.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
	4	**01**	**03**	**2.04**			**4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pemantauan Kebijakan SDAyang dikoordinasikan**			**830.000.000**				**550.000.000**
	4	01	03	2.04	01		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja serta Pelaksanaan pemantauan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	530.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
	4	01	01	2.04	02		2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan, dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan urusan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kabupaten Tana Toraja	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
	4	01	01	2.04	03		3 Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Tana Toraja	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
JUMLAH											**37.410.993.930**				**37.986.365.600**

Makale 2 Agustusi 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Muhammad Safar, S.STP

NIP. 19770409 199612 1 001

RENCANA KERJA TAHUN 2024

RENJA

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA





DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **4**

2.1 Analisis Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 4
2.2 Faktor Keberhasilan dan Permasalahan 16
2.3 Implikasi terhadap Kebijakan dan Target Capaian Tahun 2024 16

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA **17**

3.1 Tujuan 17
3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 17
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 19

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **20**

4.1 Rencana Kerja dan Program Prioritas 20
4.2 Indikator Kinerja dan Target Capaian 20
4.3 Kebutuhan dan Alokasi Pendanaan 20
4.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 20

BAB V. PENUTUP **33**

5.1 Rangkuman dan Catatan Penting Pelaksanaan Renja 33

5.2 Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut 33

5.3 Penutup 34

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha kuasa, atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renja ini merupakan amanat dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2021–2026, serta selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2026 dengan visi *"Tana Toraja Bangkit, Produktif, dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru."*

Renja Tahun 2024 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata daerah, membangun karakter dan daya saing pemuda, serta mendorong prestasi olahraga di Kabupaten Tana Toraja.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui saran, masukan, maupun kerja sama yang baik selama proses berlangsung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati setiap langkah dan upaya kita dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Tana Toraja.

Makale, 2 Agustus 2023

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan, Dan Olahraga
Kabupaten Tana Toraja

ADELHEID SOSSANG, SP., MH.
NIP. 19690906 200212 2 004

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Renja ini memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena menerjemahkan arah kebijakan strategis jangka menengah ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan yang lebih operasional, terukur, dan realistis.

Renja juga berperan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024, serta sebagai instrumen sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Tana Toraja agar selaras dengan sasaran RPJMD 2021–2026.

Penyusunan Renja Tahun 2024 dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan mempertimbangkan arah kebijakan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan dilaksanakan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga memiliki peranan strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah yaitu *“Tana Toraja yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.”* Sektor pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi berbasis budaya dan alam, sedangkan bidang kepemudaan dan olahraga berkontribusi dalam penguatan karakter, kreativitas, serta prestasi generasi muda. Oleh karena itu, Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2026.
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berjalan, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahunan.
2. Menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dengan RPJMD dan RKPD.
3. Menetapkan indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan tahun berjalan.
4. Menjadi bahan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. **Bab II Evaluasi** Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, memuat hasil capaian kinerja, analisis faktor keberhasilan dan kendala, serta arah kebijakan tahun berikutnya.
3. **Bab III Tujuan dan Sasaran Renja,** memuat keterkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah, serta indikator kinerja yang SMART.
4. **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan**, berisi rincian program, kegiatan, indikator, target, pagu indikatif, serta sumber pendanaan.
5. **Bab V Penutup**, berisi kesimpulan umum dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Analisis Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja secara umum berjalan baik dengan capaian kinerja yang tinggi pada sebagian besar indikator program dan kegiatan. Realisasi kegiatan telah mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan kepemudaan, dan pembinaan olahraga prestasi.

Pengukuran capaian kinerja selain berfungsi sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, juga digunakan sebagai sistem pelacakan performa dinas (*performance tracking system*). Dengan kata lain, pengukuran kinerja merupakan elemen penting dalam manajemen pelaksanaan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong peningkatan hasil kerja organisasi secara terarah dan berkesinambungan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja dilakukan sebagai bagian integral dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah. Pengukuran ini berperan sebagai **umpan balik (feedback)** untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya, serta menjadi bahan evaluasi dalam penetapan kebijakan strategis di tahun perencanaan selanjutnya.

Melalui pengukuran kinerja yang dilakukan secara periodik, keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi secara objektif. Hasil pengukuran ini menjadi tolok ukur capaian keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2026.

Capaian utama Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / *Kegiatan (output)*	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (s/d 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rennstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	*4*	5		6		7		12= 8 + 9 + 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya daya saing pemuda melalui olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pembinaan kepemudaan	74	800.000.000	88,92	711.352.400	100	1.260.000.000	86,58	1.090.861.200	225,28	1.802.213.600	304,43	1.802.213.600		
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda kader yang diberdayakan	75	700.000.000	90,95	636.652.400	100	1.000.000.000	97,89	978.861.400	230,79	1.615.513.800	307,72	1.615.513.800		
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Meningkatnya Pemuda Kader yang Diberdauatakan	100	625.005.000	101,86	636.652.400	100	1.000.000.000	97,89	978.861.400	258,48	1.615.513.800	258,48	1.615.513.800		
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembedayaan Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa*	75	100.000.000	74,70	74.700.000	60	260.000.000	43,08	111.999.800	186,70	186.699.800	248,93	186.699.800		
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pembedayaan Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa*	100	100.000.000	74,70	74.700.000	60	260.000.000	43,08	111.999.800	186,70	186.699.800	186,70	186.699.800		

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	*Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga*	65	840.000.000	136,68	1.148.098.000	53 %	1.390.000.000	59,93	833.028.000	235,85	1.981.126.000	362,84	1.981.126.000		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi*	67	205.000.000	496,63	1.018.098.000	66 %	753.762.000	26,53	199.990.000	594,19	1.218.088.000	886,85	1.218.088.000		
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	100	160.000.000	75,28	120.452.000	53 %	395.362.000	-	-	75,28	120.452.000	75,28	120.452.000		
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	*Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi*	100	100.000.000	897,65	897.646.000	80 %	358.400.000	55,80	199.990.000	1097,64	1.097.636.000	1097,64	1.097.636.000		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet BerprestasiKabupaten	100	350.000.000	-		100	326.238.000	100,00	326.238.000	93,21	326.238.000	93,21	326.238.000		
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	100	200.000.000	-		100	186.238.000	100,00	186.238.000	93,12	186.238.000	93,12	186.238.000		
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahrgawan Berprestasi Kab/Kota	100	150.000.000	-		100	140.000.000	100,00	140.000.000	93,33	140.000.000	93,33	140.000.000		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga	100	250.000.000	40,00	100.000.000	53	278.000.000	100,00	278.000.000	151,20	378.000.000	151,20	378.000.000		
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya Dokumen Hasil Kerjasama Organisasi Keolhargaan	100	250.000.000	40,00	100.000.000	100	278.000.000	100,00	278.000.000	151,20	378.000.000	151,20	378.000.000		

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	60	35.000.000	85,71	30.000.000	53	32.000.000	90,00	28.800.000	168,00	58.800.000	280,00	58.800.000		
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	60	35.000.000	85,71	30.000.000	53	32.000.000	90,00	28.800.000	168,00	58.800.000	280,00	58.800.000		
2	Meningkatnya kualitaslembaga pemuda yanginovatif, kompetitif danberkarakter	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	*Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan*	100	175.000.000	131,43	230.000.000	60	350.000.000	90,43	316.521.920	312,30	546.521.920	312,30	546.521.920		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan Organiasi Kepramukaan	100	175.000.000	131,43	230.000.000	100	350.000.000	90,43	316.521.920	312,30	546.521.920	312,30	546.521.920		
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Pembinaan Organiasi Kepramukaan	100	75.000.000	133,00	100.000.000	100	130.000.000	99,46	129.300.000	305,73	229.300.000	305,73	229.300.000		
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Pembinaan Organiasi Kepramukaan	100	100.000.000	130,00	130.000.000	100	220.000.000	85,10	187.221.920	317,22	317.221.920	317,22	317.221.920		
3	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*						4.384.680.000		4.063.545.235		6.456.195.434		6.456.195.434		
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	2.000.000	96.784,72	1.935.694.353	100	750.000	68,67	515.000	25,75	515.000	25,75	515.000	Dinas Pariwisata	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA- Dinas Pariwisata	100	2.000.000	-	-	100	750.000	68,67	515.000	25,75	515.000	25,75	515.000		

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Tepat Waktu	100	10.084.000.000	19,20	1.935.694.353	100	3.875.940.000	91,11	3.531.348.095	54,22	5.467.042.448	54,22	5.467.042.448		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	100	10.000.000.000	18,83	1.882.854.353	100	3.840.300.000	91,03	3.495.708.095	53,79	5.378.562.448	53,79	5.378.562.448		
		Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Jumlah ASN	100	84.000.000	62,90	52.840.000	100	35.640.000	100,00	35.640.000	105,33	88.480.000	105,33	88.480.000		
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pegawai Dinas Pariwisata yang Dilayanai	100	10.000.000	-	-	100	3.500.000	99,90	3.496.500	34,97	3.496.500	34,97	3.496.500	-	
		Peningkatan Sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang berdisiplin baik	100	10.000.000	-		100	3.500.000	100	3.496.500	34,97	3.496.500	34,97	3.496.500		
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi umum Dinas Pariwisata berjalan sesuai standar	100	2.040.000.000	14,07	287.017.536	100	304.438.000	96,92	295.060.186	28,53	582.077.722	28,53	582.077.722		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100	150.000.000			1	38.038.000		37.008.000	24,67	37.008.000	24,67	37.008.000		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	100	40.000.000	29,32	11.728.000	100	7.500.000	37,33	2.800.000	36,32	14.528.000	36,32	14.528.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata yang terselenggara	100	2.000.000.000	13,76	275.289.536	100	258.900.000	98,59	255.252.186	26,53	530.541.722	26,53	530.541.722		
		PENYEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINDAH DAERAH	Persentase penunjung urusan perangkat daerah		50.000.000		-	100	24.000.000	-	23.910.000	-	23.910.000	27	23.910.000		

		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		50.000.000		-	1	24.000.000		23.910.000		23.910.000	26,53	23.910.000		
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	80.700.000	59,30	47.858.696	100	44.462.000	182,18	80.999.460	159,68	128.858.156	159,68	128.858.156		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	100	58.700.000	54,46	31.970.000	100	31.962.000	93,12	29.762.000	105,17	61.732.000	105,17	61.732.000		
		Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	100	22.000.000	72,22	15.888.696	100	12.500.000	79,02	9.877.460	117,12	25.766.156	117,12	25.766.156		
		Pernyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan	100	160.000.000		-		43.800.000		41.360.000		41.360.000	0,00	41.360.000		
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	414.000.000	29,49	122.079.614	100	131.590.000	97,44	128.215.994	60,46	250295608	60,46	250.295.608		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100	100.000.000	18,23	18.233.376	100	32.000.000	93,18	29.816.611	48,05	48.049.987	48,05	48.049.987		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	64.000.000	47,34	30.298.238	100	54.500.000	97,82	53.309.383	130,64	83.607.621	130,64	83.607.621		

		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	100	250.000.000	29,42	73.548.000	100	45.090.000	100,00	45.090.000	47,46	118.638.000	47,46	118.638.000		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata	100	26.300.000.000	36,23	9.528.714.444	100	4.116.813.000	95,00	3.911.142.590	50,65	13.320.476.590	50,65	13.320.476.590		
		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	100	20.000.000.000	45,53	9.105.562.000	100	646.893.000	100,00	646.893.000	48,76	9.752.455.000	48,76	9.752.455.000		
		Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Kawasan Daya tarik Wisata Kabupaten Tana Toraja	100	20.000.000.000	45,53	9.105.562.000	100	646.893.000	100,00	646.893.000	48,76	9.752.455.000	48,76	9.752.455.000		
		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	100	5.100.000.000	2,34	119.380.444	100	3.197.000.000	95,97	3.068.049.590	60,16	3.068.049.590	60,16	3.068.049.590		
		Perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	100	300.000.000		-		97.000.000		96.500.000	32,17	96.500.000	32,17	96.500.000		
		Pengembangan Kawasan Strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan pariwisata strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100	4.500.000.000		119.380.444		3.000.000.000		2.871.549.590	66,47	2.990.930.034	66,47	2.990.930.034		
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah laopran hasil Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	100	300.000.000		-		100.000.000		100.000.000	33,33	100.000.000	33,33	100.000.000		
		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA	Cakupan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100	1.200.000.000	25,31	303.772.000	100	272.920.000	71,89	196.200.000	41,66	499.972.000	41,66	499.972.000		

		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabuoaten/Kota	100	1.200.000.000	25,31	303.772.000	100	272.920.000	71,89	196.200.000	41,66	499.972.000	41,66	499.972.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Objek Wisata yang dipromosikan	100	6.000.000.000	31,30	1.877.900.800	100	1.285.000.000	118,72	1.525.488.674	52	3.144.589.474	52,41	3.144.589.474		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang dipromosikan	100	6.470.000.000	10,43	1.877.900.800		1.550.000.000	98,42	1.525.488.674	52,60	3.403.389.474	52,60	3.403.389.474		
		Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	100	120.000.000	-	-		65.000.000	91,54	59.500.000	49,58	59.500.000	49,58	59.500.000		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100	6.000.000.000	31,30	1.877.900.800	100	1.285.000.000	98,57	1.266.688.674	52,41	3.144.589.474	52,41	3.144.589.474		
		Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	100	350.000.000	-	-		200.000.000	99,65	199.300.000	56,94	199.300.000	56,94	199.300.000		

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap daerah Tujuan Wisata (DTW/Objek Wisata)	100	5.400.000.000	22,76	1.229.293.400	100	200.000.000	100,00	200.000.000	26,5	1.429.293.400	26,47	1.429.293.400		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap daerah Tujuan Wisata (DTW/Objek Wisata)	100	5.400.000.000		1.229.293.400		200.000.000	100,00	200.000.000	26,5	1.429.293.400	26,47	1.429.293.400		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelatihan Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100	400.000.000	-	186.986.400	100	50.000.000	100,00	50.000.000	-	236.986.400	-	236.986.400		
		Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100	5.000.000.000	20,85	1.042.307.000	100	150.000.000	100,00	150.000.000	23,85	1.192.307.000	23,85	1.192.307.000		

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	100	39.515.000.000	100,00	14.725.359.044	100	12.986.493.000	91,95	11.940.587.619	72,58	28.680.416.418	72,58	28.680.416.418		
Realisasi Capaian Kinerja (%)							91,95							
Predikat Kinerja							K							

Makale, 02 Agustus 2023
KEPALA DINAS

ADELHEID SOSANG, SP..M.H
NIP. 19650814 199312 1 000

Adapun evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda melalui pembinaan kepemudaan yang sistematis dan berkelanjutan. Capaian kinerja program ini tergolong tinggi, yaitu 86,58% dari target 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.090.861.200 dari Rp 1.260.000.000. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Penyadaran dan pemberdayaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dengan capaian 97,89%,
- Penyelenggaraan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, dengan capaian 97,89%,
- Pemberdayaan organisasi kepemudaan, dengan capaian 43,08%,
- Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, dengan capaian 43,08%.

Kegiatan ini telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi dan kesadaran pemuda dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah, serta tumbuhnya komunitas wirausaha muda. Namun, keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-organisasi menjadi faktor yang perlu diperbaiki di tahun berikutnya.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan tingkat kinerja 59,93% dari target 53% dan realisasi anggaran Rp 833.028.000. Capaian tertinggi diperoleh pada kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi serta pemberian penghargaan olahraga, yang masing-masing mencapai 100% capaian kinerja.

Kegiatan ini berdampak nyata terhadap peningkatan prestasi atlet Kabupaten Tana Toraja di berbagai kejuaraan tingkat daerah dan provinsi. Meskipun demikian, pembinaan cabang olahraga baru dan penyediaan sarana prasarana masih perlu ditingkatkan.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 90,43% dengan realisasi anggaran Rp 316.521.920 dari Rp 350.000.000. Kegiatan seperti pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan serta penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah terlaksana dengan baik.

Faktor keberhasilan utama program ini adalah partisipasi aktif Kwartir Cabang dan dukungan masyarakat sekolah terhadap kegiatan kepramukaan. Tantangan yang dihadapi berupa keterbatasan fasilitas dan perlunya peningkatan kapasitas pelatih dan pembina pramuka di tingkat sekolah.

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan daya tarik dan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja program ini mencapai 95%, dengan realisasi keuangan Rp 3.911.142.590 dari Rp 4.116.813.000.

Kegiatan prioritas meliputi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengembangan kawasan strategis pariwisata, serta pengelolaan destinasi wisata.
Hasilnya, beberapa destinasi unggulan mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, namun masih terkendala pada perbaikan infrastruktur dan kebersihan lingkungan destinasi.

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini menunjukkan capaian 118,72%, dengan realisasi anggaran Rp 1.525.488.674 dari Rp 1.285.000.000. Keberhasilan ini didorong oleh optimalisasi promosi digital, kegiatan festival wisata, serta kemitraan dengan pelaku industri pariwisata. Namun, masih diperlukan diversifikasi media promosi dan peningkatan kualitas konten publikasi agar mampu menarik wisatawan mancanegara.

6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif. Capaian kinerja mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp 200.000.000. Pelaksanaan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar telah berhasil meningkatkan kesadaran wisata dan memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata lokal.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang administrasi, perencanaan, dan keuangan dilaksanakan dengan capaian rata-rata 91,11% dan realisasi anggaran Rp 3.531.348.095 dari Rp 3.875.940.000.

Pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah berjalan sesuai standar pelayanan minimal. Namun, masih ditemukan kendala dalam efisiensi pelaporan dan ketersediaan SDM teknis di bidang administrasi perencanaan.

2.2 Faktor Keberhasilan dan Permasalahan

Faktor Keberhasilan:

1. Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan prioritas.
2. Koordinasi dan sinergi lintas bidang (pariwisata, kepemudaan, olahraga) yang semakin baik.
3. Tingginya partisipasi masyarakat, komunitas pemuda, dan organisasi olahraga dalam kegiatan pembinaan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan publikasi pariwisata.

Faktor Permasalahan:

1. Terbatasnya sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan pada bidang teknis.
2. Infrastruktur pariwisata dan olahraga di beberapa lokasi masih belum memadai.
3. Keterbatasan anggaran untuk perluasan kegiatan pembinaan pemuda dan pelatihan olahraga.
4. Minimnya data statistik pariwisata dan kepemudaan yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan.

2.3 Implikasi terhadap Kebijakan dan Target Capaian Tahun 2024

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja Renja Tahun 2023 dapat dijadikan dasar dalam penetapan target dan arah kebijakan tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program berbasis data dan indikator kinerja.
2. Mengoptimalkan sinergi antarbidang untuk mendorong integrasi antara pariwisata, kepemudaan, dan olahraga sebagai satu ekosistem pembangunan daerah.
3. Meningkatkan efektivitas promosi wisata berbasis digital dan memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku usaha.
4. Memperkuat pembinaan kepemudaan dan keolahragaan melalui pengembangan sarana, pelatihan berkelanjutan, serta pemberian penghargaan berbasis prestasi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa wisata sebagai ujung tombak pengelolaan destinasi.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah:

Adapun tujuan Renja Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata daerah dan memperluas promosi pariwisata yang efektif, efisien, serta berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat.
2. Melestarikan dan mengembangkan seni, budaya, situs sejarah, dan adat istiadat sebagai identitas lokal yang bernilai ekonomi dan mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.
3. Membangun karakter, kreativitas, dan jiwa kompetitif pemuda agar berdaya saing, berinovasi, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatkan prestasi olahraga dan memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga melalui pembinaan yang konsisten dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kepariwisataan.

3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja menetapkan sasaran strategis yang bersifat SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*), sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Base Lane 2020	Target 2024
1	2	3	4	5	6		10
	Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Agamis,Toleran dan Ramah			Meningkatnya Daya saing Pemuda melalui Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga		7 Cabang
			Meningkatkan kualitas pemuda yang inovatif dan berkarakter		Cangkupan Pembinaan Kepemudaan		50%
		Terwujudnya Pranata Sosial yang Kokoh dan Solid yang Mengayomi Seluruh Elemen Masyarakat		Meningkatnya kualitas lembaga pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter	Pesentase Peningkatan SDM kepramukaan		65%
	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi wisata Daerah				Kontribusi PAD sektor kepariwisataan terhadap Jumlah Total PAD Kabupaten	0,86%	2,50%
					Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.032	10.000
					Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	93.545	1.200.789
					Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara	**2**	5
					Jumlah DTW yang di promosikan	14	20
					Jumlah Produk ekonomi kreatif yang terdaftar	Na	3
					Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibentuk	11	20
					Jumlah Desa Wisata Yang di SK kan	14	22

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Secara umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis budaya dan alam Toraja sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat pembinaan kepemudaan dan olahraga agar berdaya saing tinggi, berkarakter, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan pariwisata untuk memperluas manfaat ekonomi kreatif.
4. Mengoptimalkan kerja sama lintas sektor dan promosi digital untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat nasional dan internasional.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan program agar selaras dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2026. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, serta disusun sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Renja ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga berjalan searah dengan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta rencana pendanaan yang akan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi dinas. Dengan demikian, Renja ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjabarkan strategi dan kebijakan pembangunan ke dalam langkah-langkah kegiatan tahunan yang konkrit, terukur, dan realistis.

Rencana Kerja merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya guna mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur, disertai dukungan pendanaan yang memadai, dokumen ini menjadi alat kendali, koordinasi, dan evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Setiap kegiatan yang tertuang di dalamnya merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2026, maka upaya pencapaiannya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang mendukung langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

I. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
   1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
   2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

II. Urusan Pariwisata

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

III. Urusan Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KABUPATEN TANA TORAJATAHUN 2025
OPD : DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	KODE REK					PRIORTITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025				PERUBAHAN RENCANA THUN 2025	
					SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11	12	13	14	15	16
							DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		TANA TORAJA	100%	15.079.000.000,00	APBD		100%	7.231.993.450
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		TANA TORAJA	100%	2.621.000.000,00	APBD		100%	942.200.000
	2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		TANA TORAJA	100%	2.621.000.000,00	APBD		100%	942.200.000
1	2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	presentase Cakupan Pembinaan Kepemudaan	TANA TORAJA	100%	380.000.000,00	APBD		100%	792.200.000

	2	**19**	**02**	**2.01**		**04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata Mewujudkan Tata Kehidupan Sosial yang Harmonis, Toleran dan Saling Menghormati**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Presentase pemuda pelopor, wirausaha muda dan wirausaha yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya**	**TANA TORAJA**	**100%**	**300.000.000,00**	APBD		**100%**	**9.400.000**
	2	19	02	2.01	0010		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	2	19	02	2.01	0011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	**TANA TORAJA**	40 Orang	130.000.000,00	APBD		40 Orang	-
	2	19	02	2.01	0012		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	**TANA TORAJA**	5 Orang	30.000.000,00	APBD		5 Orang	-
	2	19	02	2.01	0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	**TANA TORAJA**	1 Kegiatan	30.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	9.400.000
	2	19	02	2.01	0014		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	**TANA TORAJA**	2 Orang	20.000.000,00	APBD		2 Orang	

	2	1 9	02	2.0 1	0015		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	**TANA TORAJA**	4 Orang	10.000.000,00	APBD		4 Orang	
	2	1 9	02	2.0 1	0016		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	**TANA TORAJA**	1 Unit	30.000.000,00	APBD		1 Unit	
	2	**1 9**	**02**	**2.0 2**			**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah oragnisasi kepemudaan yang di bina dan di kembangkan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**80.000.000,00**	APBD		**100%**	**107.800.000**
	2	1 9	02	2.0 2	0003		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	**TANA TORAJA**	1 Organisasi	30.000.000,00	APBD		28 organisasi	107.800.000
	2	1 9	02	2.0 2	0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	**TANA TORAJA**	5 Orang	50.000.000,00	APBD		5 Orang	-
2	**2**	**1 9**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.006.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**-**
	2	**1 9**	**03**	**2.0 1**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sara dan prasaran olahraga yang dipelihara**	**TANA TORAJA**	**100%**	**270.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	2	1 9	03	2.0 1	0004		Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di	**TANA TORAJA**	1 Unit	130.000.000,00	APBD		1 Unit	-

								tingkat kabupaten/kota							
	2	1 9	03	2.0 1	0005		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	**TANA TORAJA**	1 Unit	130.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	2	1 9	03	2.0 1	0006		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	2	**1 9**	**03**	**2.0 2**			**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase Kejuaraan Tingkat kabupaten Yang di selenggarakan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**250.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	2	1 9	03	2.0 2	0004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Kegiatan	100.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	-
	2	1 9	03	2.0 2	0005		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	**TANA TORAJA**	1 Kegiatan	100.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	-
	2	1 9	03	2.0 2	0006		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	**TANA TORAJA**	10 Orang	50.000.000,00	APBD		10 Orang	-
	2	**1 9**	**03**	**2.0 3**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**	**Presentase atlet yang mendapatkan Pembinaan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**180.000.000,00**	APBD		**100%**	**69.000.000**

							Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
	2	1 9	03	2.0 3	0006		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	**TANA TORAJA**	10 Orang	30.000.000,00	APBD			-
	2	1 9	03	2.0 3	0007		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	**TANA TORAJA**	1 Orang	30.000.000,00	APBD		19 atlet	69.000.000
	2	1 9	03	2.0 3	0008		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	terlaksananya pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolaharagaan	**TANA TORAJA**	50 orang	100.000.000,00	APBD		50 orang	-
	2	1 9	03	2.0 3	0009		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	**TANA TORAJA**	2 Orang	10.000.000,00	APBD		2 Orang	-
	2	1 9	03	2.0 3	0010		pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	2	**1 9**	**03**	**2.0 4**			**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Presentase cabang olahraga yang dibina**	**TANA TORAJA**	**100%**	**110.000.000,00**	APBD		**100%**	**600.000.000**
	2	1 9	03	2.0 4	0005		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	2	1 9	03	2.0 4	0006		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1 Dokumen	600.000.000
	2	**1 9**	**03**	**2.0 5**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Presentase cabang olahraga yang dikembangkan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**196.000.000,00**	APBD		**100%**	**6.000.000**

	2	19	03	2.05	0006		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	2	19	03	2.05	0007		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	TerlaksananyaPengembanganOlahragaWisata,TantangandanPetualangan	**TANA TORAJA**	**1 cabor**	5.000.000,00	APBD		**1 cabor**	-
	2	19	03	2.05	0008		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	2	19	03	2.05	0009		Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	**TANA TORAJA**	1 Unit	150.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	2	19	03	2.05	0010		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	**TANA TORAJA**	1 Lembaga	30.000.000,00	APBD		1 Lembaga	6.000.000
3	**2**	**19**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.235.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**150.000.000**
	2	**19**	**04**	**2.01**			**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Presentase Jumlah Anggota Pramuka Aktif yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.235.000.000,00**	APBD		**100%**	**150.000.000**
	2	19	04	2.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-

	2	1 9	04	2.0 1	0002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	**TANA TORAJA**	1 Organisasi	10.000.000,00	APBD		1 Organisasi	-
	2	1 9	04	2.0 1	0003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	**TANA TORAJA**	10 Orang	5.000.000,00	APBD		10 Orang	-
	2	1 9	04	2.0 1	0004		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	**TANA TORAJA**	1 Unit	1.050.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	2	1 9	04	2.0 1	0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	**TANA TORAJA**	1 Laporan	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	150.000.000
	2	1 9	04	2.0 1	0006		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	**TANA TORAJA**	1 Unit	55.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	2	1 9	04	2.0 1	0007		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	**TANA TORAJA**	1 Unit	10.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	2	1 9	04	2.0 1	0008		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		**TANA TORAJA**	1 Organisasi	50.000.000,00	APBD		1 Organisasi	-
	3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**TANA TORAJA**	**100%**	**12.458.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**6.289.793.450**
	3	**2 6**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		**TANA TORAJA**	**100%**	**12.458.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**6.289.793.450**
4	**3**	**2 6**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase capaian kinerja perangkat daerah**	**TANA TORAJA**	**100%**	**5.643.500.000,00**	**APBD**		**100%**	**4.283.613.200**

	3	**26**	**01**	**2.01**		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**TANA TORAJA**	**100%**	**7.500.000,00**	APBD		**100%**	**3.201.000**
	3	26	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**TANA TORAJA**	2 Dokumen	2.000.000,00	APBD		2 dokumen	1.613.000
	3	26	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	500.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	**TANA TORAJA**	5 Laporan	1.000.000,00	APBD		5 Laporan	-

								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	3	26	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	1.588.000
	3	**26**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**administrasi keuangan yang tepat waktu**	**TANA TORAJA**	**100%**	**4.014.000.000,00**	APBD		**100%**	**4.068.379.000**
	3	26	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**TANA TORAJA**	40 Orang/bulan	4.000.000.000,00	APBD		38 orang	4.068.379.000
	3	26	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	01	2.02	0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	**TANA TORAJA**	18 Laporan	1.000.000,00	APBD		18 Laporan	-

								Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	3	**26**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentaseadmintrasi BMD yang tersusun**	**TANA TORAJA**	**100%**	**5.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	3	26	01	2.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.03	0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	01	2.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	01	2.03	0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	**26**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pegawai yang mendapat layananan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**68.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	3	26	01	2.05	0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**TANA TORAJA**	1 Unit	1.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	26	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**TANA TORAJA**	34 Paket	34.000.000,00	APBD		34 Paket	-
	3	26	01	2.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-

								Administrasi Kepegawaian							
	3	2 6	01	2.0 5	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	2 6	01	2.0 5	0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	2 6	01	2.0 5	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**TANA TORAJA**	3 Orang	30.000.000,00	APBD		3 Orang	-
	3	**2 6**	**01**	**2.0 6**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase adminitasi umum yang berjalan sesuai standar**	**TANA TORAJA**	**100%**	**240.000.000,00**	APBD		**100%**	**65.307.200**
	3	2 6	01	2.0 6	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Paket	1.000.000,00	APBD		1 Paket	-
	3	2 6	01	2.0 6	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Paket	10.000.000,00	APBD		1 paket	2.276.000
	3	2 6	01	2.0 6	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Paket	10.000.000,00	APBD		1 Paket	936.000
	3	2 6	01	2.0 6	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Paket	5.000.000,00	APBD		1 Paket	-
	3	2 6	01	2.0 6	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Paket	5.000.000,00	APBD		1 Paket	6.645.200
	3	2 6	01	2.0 6	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-

								Undangan yang Disediakan							
	3	26	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Paket	1.000.000,00	APBD		1 Paket	-
	3	26	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**TANA TORAJA**	1 Laporan	5.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**TANA TORAJA**	1 Laporan	200.000.000,00	APBD		1 Laporan	55.450.000
	3	26	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	01	2.06	0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	**26**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase BMD yang terpenuhi**	**TANA TORAJA**	**100%**	**699.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	3	26	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	40.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	26	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	600.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	26	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	10.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	26	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	4.000.000,00	APBD		1 Unit	-

	3	26	01	2.07	0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	5.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	26	01	2.07	0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	10.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	26	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Unit	30.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	**26**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase jasa penunjang yang tersedia**	**TANA TORAJA**	**100%**	**120.000.000,00**	APBD		**100%**	**51.748.000**
	3	26	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**TANA TORAJA**	1 Laporan	30.000.000,00	APBD		1 laporan	9.748.000
	3	26	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Laporan	30.000.000,00	APBD		1 laporan	12.000.000
	3	26	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Laporan	30.000.000,00	APBD			-
	3	26	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**TANA TORAJA**	1 Laporan	30.000.000,00	APBD		1 laporan	30.000.000
	3	**26**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase BMD yang terpelihara**	**TANA TORAJA**	**100%**	**490.000.000,00**	APBD			**94.978.000**
	3	26	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**TANA TORAJA**	1 Unit	30.000.000,00	APBD		1 unit	32.000.000

	3	26	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**TANA TORAJA**	16 Unit	50.000.000,00	APBD		16 unit	57.500.000
	3	26	01	2.09	0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**TANA TORAJA**	1 Unit	10.000.000,00	APBD			-
	3	26	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**TANA TORAJA**	1 Unit	10.000.000,00	APBD		7 unit	2.970.000
	3	26	01	2.09	0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	**TANA TORAJA**	1 Unit	10.000.000,00	APBD			-
	3	26	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**TANA TORAJA**	1 Unit	50.000.000,00	APBD			-
	3	26	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**TANA TORAJA**	1 Unit	300.000.000,00	APBD		1 unit	2.508.000
	3	26	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**TANA TORAJA**	1 Unit	30.000.000,00	APBD		1 Unit	-
5	**3**	**26**	**02**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**3.575.500.000,00**	**APBD**			**1.500.680.250**

	3	**26**	**02**	**2.01**		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata Mengembangkan Potensi Pariwisata dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**persentase peningkatan lokasi daya tarik wisata**	**TANA TORAJA**	**100%**	**120.500.000,00**	APBD			**83.270.000**
	3	26	02	2.01	0005		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	**TANA TORAJA**	4 Lokasi	10.000.000,00	APBD		6 Lokasi	83.270.000
	3	26	02	2.01	0006		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	2 Lokasi	500.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.01	0007		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	10 Laporan	30.000.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.01	0008		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	**TANA TORAJA**	4 Orang	50.000.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.01	0009		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD			-
	3	**26**	**02**	**2.02**			**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata**	**TANA TORAJA**	**100%**	**28.000.000,00**	APBD			**967.250.000**

	3	26	02	2.02	0001		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	4 Dokumen	1.000.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.02	0002		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.02	0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Unit	1.000.000,00	APBD		6 unit	817.250.000
	3	26	02	2.02	0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Lokasi	1.000.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.02	0008		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	**TANA TORAJA**	4 Orang	5.000.000,00	APBD			-
	3	26	02	2.02	0009		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	2 Laporan	10.000.000,00	APBD		3 laporan	150.000.000
	3	**26**	**02**	**2.03**			**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**persentase Destinawi wisata yang dikelola**	**TANA TORAJA**	**100%**	**3.416.000.000,00**	APBD			**450.160.250**
	3	26	02	2.03	0001		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	**TANA TORAJA**	1 Lokasi	1.000.000,00	APBD			-

	3	2 6	02	2.0 3	0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	**TANA TORAJA**	2 Lokasi	3.400.000.000,00	APBD		2 lokasi	447.160.250
	3	2 6	02	2.0 3	0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Laporan	5.000.000,00	APBD		1 Lokasi	-
	3	2 6	02	2.0 3	0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Lokasi	5.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	2 6	02	2.0 3	0010		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**TANA TORAJA**	1 Laporan	5.000.000,00	APBD		**100%**	3.000.000
	3	**2 6**	**02**	**2.0 4**			**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**TANA TORAJA**	**100%**	**11.000.000,00**	APBD		1 Laporan	**-**
	3	2 6	02	2.0 4	0011		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	2 6	02	2.0 4	0012		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	**TANA TORAJA**	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
6	**3**	**2 6**	**03**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.640.000.000,00**	**APBD**			**305.500.000**

	3	**26**	**03**	**2.01**			**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.640.000.000,00**	APBD			**305.500.000**
	3	26	03	2.01	0003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 dokumen	106.000.000
	3	26	03	2.01	0004		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	03	2.01	0005		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 dokumen	1.500.000
	3	26	03	2.01	0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	**TANA TORAJA**	4 Kegiatan	1.500.000.000,00	APBD		4 Kegiatan	-
	3	26	03	2.01	0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	**TANA TORAJA**	1 Promosi	110.000.000,00	APBD		1 paket	198.000.000
7	**3**	**26**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN**	**Persentase Produk yang pendapatkan pemanfaatan dan perlindungan hak**	**TANA TORAJA**	**100%**	**212.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**-**

	3	**26**	**04**	**2.01**			**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**kekayaan intelektual**								
	3	**26**	**04**	**2.01**			**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**presentase prasarana yang tersedia**	**TANA TORAJA**	**100%**	**50.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	3	26	04	2.01	0001		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	**TANA TORAJA**	1 Unit	50.000.000,00	APBD		1 Unit	-
	3	**26**	**04**	**2.02**		04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata Mengembangkan Potensi Pariwisata dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**presentase Pelaku Usaha yang di bina dan Dikembangkan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**162.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	3	26	04	2.02	0003		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	04	2.02	0005		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	04	2.02	0009		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	04	2.02	0011		Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	**TANA TORAJA**	5 Pelaku Usaha	10.000.000,00	APBD		5 Pelaku Usaha	-
	3	26	04	2.02	0013		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	**TANA TORAJA**	1 Pelaku Usaha	10.000.000,00	APBD		1 Pelaku Usaha	-

	3	26	04	2.02	0016		Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	04	2.02	0017		Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	**TANA TORAJA**	1 Promosi	10.000.000,00	APBD		1 Promosi	-
	3	26	04	2.02	0018		Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	04	2.02	0019		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	**TANA TORAJA**	1 Kebijakan	10.000.000,00	APBD		1 Kebijakan	-
	3	26	04	2.02	0020		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	04	2.02	0021		Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	-
	3	26	04	2.02	0022		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	TerlaksananyaPencatatanatasHakCiptadanHakTerkait,PendaftaranHakKekayaanIndustrikepadaPelakuEkonomiKreatif,sertaPemanfaatanKekayaanIntelektualkepada Pelaku Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	4 haki	30.000.000,00	APBD		4 haki	-
8	**3**	**26**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.387.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**200.000.000**

								Wisata (DTW)/Objek Wisata)								
	3	**26**	**05**	**2.01**		**04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata Mengembangkan Potensi Pariwisata dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**TANA TORAJA**	**100%**	**1.342.000.000,00**	APBD		**100%**	**200.000.000**
	3	26	05	2.01	0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	05	2.01	0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Orang	1.000.000,00	APBD		1 Orang	-
	3	26	05	2.01	0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	**TANA TORAJA**	200 Orang	900.000.000,00	APBD		200 Orang	-
	3	26	05	2.01	0009		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	**TANA TORAJA**	120 Orang	400.000.000,00	APBD		90 orang	200.000.000
	3	26	05	2.01	0010		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi	**TANA TORAJA**	1 Orang	10.000.000,00	APBD		1 Orang	-

								Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								
	3	26	05	2.01	0011		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Laporan	30.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	**26**	**05**	**2.02**			**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**TANA TORAJA**	**100%**	**45.000.000,00**	APBD		**100%**	**-**
	3	26	05	2.02	0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	30 Orang	30.000.000,00	APBD		30 Orang	-
	3	26	05	2.02	0002		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	**TANA TORAJA**	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	-
	3	26	05	2.02	0007		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	**TANA TORAJA**	1 Orang	5.000.000,00	APBD		1 Orang	-
JUMLAH											**15.079.000.000**				**7.231.993.450**

Makale, 02 Agustus 2023
KEPALA DINAS

ADELHEID SOSANG, SP.,M.H
NIP. 19650814 199312 1 000

BAB V

PENUTUP

5.1 Rangkuman dan Catatan Penting Pelaksanaan Renja

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas bidang pariwisata, kepemudaan, serta olahraga. Sebagian besar program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik dari aspek **kinerja (output/outcome)** maupun **realisasi anggaran**. Beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

- Tingginya komitmen dan koordinasi lintas bidang dan antar pemangku kepentingan;
- Dukungan pemerintah daerah dalam pembiayaan dan kebijakan;
- Partisipasi aktif masyarakat, pelaku pariwisata, serta organisasi kepemudaan dan olahraga.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknis, fluktuasi anggaran, serta kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan nasional dan dinamika ekonomi yang memengaruhi capaian target.

5.2 Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun perencanaan berikutnya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja akan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan program berbasis hasil (*result-based planning*);
2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program strategis terutama yang bersinggungan antara sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga;
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan;
4. Pengembangan inovasi daerah guna meningkatkan daya tarik wisata dan pemberdayaan pemuda secara berkelanjutan;
5. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi agar capaian kinerja dapat diukur lebih objektif dan terpantau secara periodik.

Langkah-langkah tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan menjadi dasar perumusan Renja pada tahun-tahun berikutnya.

5.3 Penutup

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2021–2026 serta selaras dengan visi daerah "Tana Toraja Bangkit, Produktif, dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru."

Renja ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dengan adanya dokumen Renja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pariwisata yang berdaya saing, pemberdayaan pemuda yang kreatif dan inovatif, serta peningkatan prestasi olahraga yang membanggakan daerah.

Renja ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, atau penyesuaian anggaran, maka dokumen ini akan menjadi acuan dalam melakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan **Kabupaten Tana Toraja yang Bangkit, Produktif, dan Tangguh.**

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal: 2 Agustus 2023

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan, Dan Olahraga
Kabupaten Tana Toraja

ADEL HEID SOSSANG, SP., MH.
NIP. 19690906 200212 2 004

DISDUK CAPIL
TANA TORAJA

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disusun dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024, sebagai konsinstensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini disadari dengan sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan dapat menjadi bahan acuan sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Makale, 04 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



ANDARIAS SARANGA, S.PI
NIP. 19780310 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i

DAFTAR ISI…….. ii

BAB I PENDAHULUAN…… 1

1.1 Latar Belakang…… 1

1.2 Landasan Hukum…… 2

1.3 Maksud dan Tujuan…… 5

1.4 Sistematika Penyusunan Renja…….. 5

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN…… 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD…… 8

2.3 Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 24

2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD…….. 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…. 28

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…… 29

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…….. 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD…….. 31

3.3 Program dan Kegiatan…….. 32

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……. 36

BAB 5 PENUTUP…….. 48

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasisfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang menkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2021- 2026;
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENJA OPD

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2024
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses penyusunan renja, Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Hukum;

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja OPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun lalu (tahun n– 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang Menyangkut Arah dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program,kegiatan serta subkegiatan yang akan dilaksanakan serta menentuakan indicator kinerja untuk setiap program dan kegiatan dan merinci kebutuhan dan alokasi pendanaan untuk setiap kegiatan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Bab 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana Pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja melaksanakan sebanyak 5 (lima) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Perubahan Tahun 2022 sejumlah Rp. 4.081.110.000 (Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 3.652.602.004 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Empat Rupiah) atau sebesar 89,50%.

Pelaksanaan Program-Program Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Indikator Kinerjanya adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri 14(empat belas) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dukcapil dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 5 (lima) lima kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.382.223.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.958.610.954,- (87,47%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 5 (lima) kegiatan dan 11(sebelas) sub kegiatan sebagai berikut :

   A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

         Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang dibayarkan gajinya dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 2.839.983.678,- terserap sebesar Rp. 2.437.676.733,- atau sebesar 85,83%.

   B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 49.805.000,- terserap sebesar Rp. 48.940.000,- atau sebesar 98,26%.
      b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

         Sub Kegiatan ini dicapai dengan indicator Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis dengan capaian indicator sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terserap sebesar 21.030.876 atau sebesar 70,10%

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan output jumlah komponen listrik yang disediakan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.331.000 terserap sebesar 1.331.000 atau sebesar 100%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 105.696.322,- terserap sebesar Rp. 105.186.500,- atau sebesar 99,51%.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indicator output jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.6.918.000,- terserap sebesar 6.918.000,- atau sebesar 100%

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 20.310.000,- terserap sebesar Rp. 20.168.700,- atau sebesar 99,30%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000- terserap sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 50%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 160.025.000- terserap sebesar Rp. 158.528.898,- atau sebesar 99,06%.

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa surat menyurat dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan

anggaran sebesar Rp. 42.353.000- terserap sebesar Rp. 39.553.000,- atau sebesar 93.38%

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 21.741.000,- terserap sebesar Rp. 21.401.000,- atau sebesar 98.43%

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 18.700.000,- terserap sebesar Rp. 15.941.483,- atau sebesar 46,35%

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 19.500.000,- terserap sebesar Rp. 18.967.300,- atau sebesar 97,26%

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 44.300.000,- terserap sebesar Rp. 44.200.000,- atau sebesar 99,77%

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Target program pada tahun 2022 adalah 100%, realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program

sebesar 100%. Target anggaran untuk program ini sebesar 666.380.000 dengan realisasi sebesar Rp. 661.484.050 atau sekitar 99,26%.

Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan yaitu:

A. Penataan Pendaftaran Penduduk
   a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan
      Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Pengadaan Dokumen Penduduk dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 244.800.000,- terserap sebesar Rp. 240.414.050,- atau sebesar 98,20%.

B. Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk
   a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
      Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 98% dengan anggaran sebesar Rp. 421.580.000,- terserap sebesar Rp. 421.070.000,- atau sebesar 99,87%.

3. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Indikator Program ini adalah Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Catatan Sipil. Target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dan 1 (satu) sub kegiatanyaitu Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.507.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.507.000,- atau sebesar (100%). Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu:

A. Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan, Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia dengan Capaian Indikator

Kinerja sebesar 100% dengan anggaran Rp. 5.507.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.507.000,- (100%).

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Indikator Program ini adalah Persentase Masyarakat yang memiliki memperoleh informasi Administrasi Kependudukan. Target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar (100%). Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu:

A. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (100%).

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan dilaksanakan oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Indikator Program ini adalah Persentase Profil Kependudukan terkelolah dengan baik. Target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar (100%). Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu:

A. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar

100% dengan anggaran Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- (100%).

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100 % dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026	SKPD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13=6+12*		*14=13/5x 100%*	*15*	
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	
I	Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Berjalan Dengan Baik																					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu																					

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.900.000.000	14	2.475.225.339	14	2.839.983.678	3	379.576.365	4	527.633.937	4	543.194.980	3	987.171.451	14	2.437.576.733	28	4.912.802.072	200	169	Dukcapil
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**14**	**2.437.576.733**					
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Dilayani**																					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	15	20.000.000	15	164.781.000	8	49.805.000	0	0	4	19.860.000	2	13.415.000	2	15.665.000	8	48.940.000	23	213.721.000	153	1069	Dukcapil
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek yang mampu mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan	6	60.000.000	3	20.718.000	6	30.000.000	0	0	0	0	0	0	3	21.030.876	3	21.030.876	6	41.748.876	100	70	Dukcapil
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**5,5**	**34.985.438**					
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Dengan Standar**																					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	5	2.300.000	5	2.231.000	5	1.331.000	0	0	0	0	0	0	5	1.331.000	5	1.331.000	10	3.562.000	200	155	Dukcapil

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8	250.000.000	8	599.924.365	8	105.696.322	0	0	0	0	4	33.904.000	4	71.282.500	8	105.186.500	16	705.110.865	200	282	Dukcapil
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	2.039.000	4	1.809.000	4	6.918.000	0	0	0	0	2	1.198.000	2	5.720.000	4	6.918.000	8	8.727.000	200	428	Dukcapil
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20	13.320.000	8	10.217.100	20	20.310.000	0	0	2	510.000	8	2.763.000	10	16.895.700	20	20.168.700	28	30.385.800	140	228	Dukcapil
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	3.000.000	3	3.000.000	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	5	4.000.000	167	133	Dukcapil
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	80.000.000	30	284.925.490	30	160.025.000	19	50.307.198	2	4.160.000	5	54.982.200	4	49.079.500	30	158.528.898	60	443.454.388	200	554	Dukcapil
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**11,5**	**48.855.516**					
									Predikat kinerja									**SR**	**ST**					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	28.000.000	12	26.263.000	12	42.353.000	0	0	6	6.856.000	3	15.928.000	3	16.769.000	12	39.553.000	24	65.816.000	200	235	Dukcapil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah jasa Komunikasi Sumber Daya Air	12	32.000.000	12	24.591.500	12	19.560.000	3	4.262.400	3	2.664.400	3	5.797.600	3	5.143.064	12	17.867.464	24	42.458.964	200	133	Dukcapil

		Daya Air dan Listrik	Listrik yang dibayarkan																				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	4.000.000	12	361.549.000	12	21.741.000	0	0	6	681.000	3	1.510.000	3	19.210.000	12	21.401.000	24	382.950.000	200	9574	Dukcapil
								Rata-rata capaian kinerja (%)										**12**	**26.273.821**					
									Predikat kinerja									**SR**	**ST**					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara**																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	11	26.068.000	11	18.470.400	11	18.700.000	0	0	2	3.725.000	4	4.631.283	5	7.585.200	11	15.941.483	22	34.411.883	200	132	Dukcapil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	1	36.000.000	1	35.345.900	1	19.500.000	1	3.067.300	0	0	0	8.400.000	0	7.500.000	1	18.967.300	2	54.313.200	200	151	Dukcapil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	19	35.180.000	19	35.180.000	16	44.300.000		0		0	5	3.900.000	11	40.300.000	16	44.200.000	35	79.380.000	184	226	Dukcapil
								Rata-rata capaian kinerja (%)										**9,33**	**26.369.594**					

			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**																					
		Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk Berjalan Dengan Baik**																					
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balngko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan	4	300.000.000	0	0	4	244.800.000	0	0	0	0	3	179.311.000	1	61.103.050	4	240.414.050	4	240.414.050	100	80	Dukcapil
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**4**	**240.414.050**					
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang Dilaksanakan**																					
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30	250.000.000	0	0	30	421.580.000	0	0	10	120.720.000	10	160.580.000	10	139.770.000	30	421.070.000	30	421.070.000	100	168	Dukcapil
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**30**	**421.070.000**					
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					

		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil**																				
		Pelayanan pencatatan Sipil	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil**																				
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balngko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Catatan Sipil yang diadakan	3	20.000.000	0	0	3	5.507.000	0	0	0	0	0	0	3	5.507.000	3	5.507.000	3	5.507.000	100	28	Dukcapil
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**3**	**5.507.000**					
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**					
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**																				
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Penyelenggaraan PIAK**																				
		Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan fasilitasi PIAK	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	200	200	Dukcapil

			Rata-rata capaian kinerja (%)															**1**	**20.000.000**							
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**							
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase Penyajian Data Agregat dan Buku Profil Kependudukan setiap Tahun**																							
		Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah Data Kependudukan yang Diterbitkan**																							
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang diterbitkan	444	70.000.000	30	7.000.000	35	7.000.000	0	0	0	0	0	0	35	7.000.000	35	7.000.000	65	14.000.000	14,6	20	Dukcapil		
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**35**	**7.000.000**							
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			**3.652.602.004**							
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**125**	**3.268.052.153**							
Predikat kinerja																		**ST**	**ST**							

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu meningkatkan tertib kepemilikan administrasi kependudukan.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tan Toraja adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :

1. Kegiatan Pelayanan Di Bidang Pendaftaran Penduduk ;
2. Kegiatan Pelayanan Di Bidang Catatan Sipil;
3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Kegiatan Program penunjang urusan pemerintah daerah;

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indicator sebagai berikut:

1) Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan penduduk;
2) Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran;
3) Persentase pasangan berakta perkawinan;
4) Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5) Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan
6) Persentase Lembaga pengguna yang melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public

7) Persentase Penyajian Profil Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan-urusan yang dilaksanakan Bappelitbangda, dalam hal ini Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
I	**INDIKATOR SASARAN**											
1	Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan Penduduk			84	85	86	87	88	89	100	100	100
2	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran			81	82	83	84	85	86	86	100	100
3	Persentase pasangan berakta perkawinan			40	45	50	55	60	65	100	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)			70	71	72	73	74	75		100	100
	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan			90	91	92	93	94	95		100	100
II	**INDIKATOR PROGRAM**											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											

	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pendaftaran Penduduk											
	Penataan Pendaftaran Penduduk berjalan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Pencatatan Sipil											
	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil berjalan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berjalan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan											
	Persentase Profil Kependudukan tersusun dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3 ISU ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA

Penyelenggaran tugas dan fungsi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja , maupun isu-isu yang bersifan eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya:

1. Masih terdapat Masyarakat yang memiliki NIK ganda Dimana perekaman KTP-EL menggunakan NIK luar Tana Toraja dan NIK Tana Toraja tidak dimohonkan untuk hapus. Untuk permasalahan seperti ini kedepan telah difasilitasi dengan menu non aktif dalam SIAK sehingga kedepan diharapkan permaslahan NIK ganda akan dapat diminimalisir;

2. Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, seperti misalnya layanan rekam KTP-El diperuntukkan untuk semua daerah. Hal ini membutuhkan usaha yang lebih dari sumber daya manusia yang ada, akan tetapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja terkendala dengan jumlah pegawai yang ada karena untuk tahun ini tidak ada perpanjangan SK dari Tenaga Honorer Daerah;

3. Sarana dan Prasarana belum memadai untuk melakukan proses Pelayanan baik di kantor maupun pelayanan keliling di Kecamatan/Kelurahan se Kabupaten Tana Toraja. Untuk itu diperlukan penambahan perangkat untuk memperlancar pelayanan Dokumen Kependudukan kepada Masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di masa yang akan dating, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan tergantung pada kesadaran Masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan
2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi (HP Android) untuk mengakses Dokumen Kependudukan lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD), selain itu masih terdapat wilayah di Tana toraja yang belum diakses oleh jaringan internet.
3. Kendala system (gangguan jaringan dan koneksi internet serta Gangguan teknis Aplikasi SIAK)
4. Kurangnya SDM untuk kegiatan pelayanan di Kecamatan/Kelurahan
5. Sarana dan prasarana yang masih minim
6. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat mengakibatkan adanya kendala dalam mengelola data dan penyusunan laporan kependudukan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Selalu melakukan Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait
2. Adanya komitmen SDM yang tersedia untuk melaksanakan tugas dengan baik
3. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan layanan Dokumen Kependudukan
4. Menggunakan layanan online (WA Dukcapil) bagi Masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN TANA TORAJA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**5.076.000.000,-**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Makale	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Makale	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3.791.000.000	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Kec. Makale	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk berjalan dengan baik	100%		Program Pendaftaran Penduduk	Kec. Makale	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk berjalan dengan baik	100%	950.000.000,-	
3	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Kec. Makale	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil berjalan dengan baik	100%		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Kec. Makale	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil berjalan dengan baik	100%	160.000.000,-	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kec. Makale	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	100%		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kec. Makale	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	100%	125.000.000,-	
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kec. Makale	Cakupan Penyajian Profil Kependudukan berjalan dengan baik	100%		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kec. Makale	Cakupan Penyajian Profil Kependudukan berjalan dengan baik	100%	50.000.000	
					5.076.000.000,-					**5.076.000.000**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja di kecamatan.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah :

- RPJMN

  Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

- Rencana Kerja Pemerintah

  Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

  Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta kebijakan pembangunan Tahun 2024.

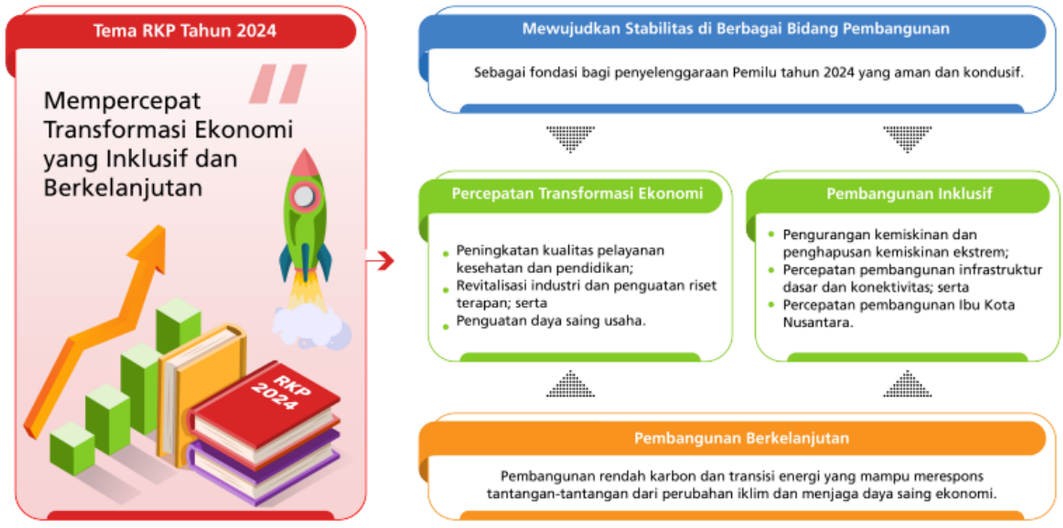
  Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

  Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor

RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar 4.2

Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada dalam Penggalan ke empat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2024 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah : **"Peningkatan Produktivitas melalui Pembangunan yang Merata guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh"**. Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi;
2. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan;
4. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat;
5. Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
6. Menguatkan interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleraan dan saling menghormati.

3.2.1 TUJUAN

A. Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan yang Akuntabel dan Transparan, dimaknai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dapat meningkatkan pelayanan yang baik sesuai Standar Operational Prosedure (SOP) kepada Masyarakat yang melakukan pengurusan Dokumen Kependudukan

3.2.2 INDIKATOR SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Meningkatkan kualitas Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukn yang Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan penduduk waktu	86 %
			Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	83 %
			Persentase pasangan berakta perkawinan	50 %
			Cakupan Penerbiitan Kartu Identitas Anak (KIA)	72%
			Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	92%
		Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna yang melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	100 %
			Persentase Penyajian Profil Kependudukan	100 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja mempunyai 4 rumusan program dan kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Peningatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perUndang-Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau Kenadaraan Dinas Jabaran
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset tetap Lainnya
- Pengadaan Aset tak Berwujud
- Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor –

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung bangunan Kantor atau bangunan lainnya

b. Program Pendaftaran Penduduk

1. Panataan Pendaftaran Penduduk

- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa Kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk

c. Program Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Penyusunan Profil Kependudukan
   - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Bab 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan, tahun 2023 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif bagi perangkat daerah sebagai pelaksanaan program, Renja tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan Menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran pelaksanaan program Pembangunan yang ditetapkan dalam renja tahun 2025 dan kebijakan umum APBD, Prioritas dan palofon anggran sementara APBD Tahun 2025, diharapkan dan yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh Masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam Upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

No.	KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
	Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan					TAGET CAPAIAN KINERJA (%)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	5	6		8	9	10	11	12	12
	2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**5.076.000.000**				**5.272.000.000**
1	**2**	**12**	**01**			**Peningkatan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan berjalan dengan baik**			**3.791.000.000**				**3.892.000.000**
	2	**12**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu**		**80%**	**10.500.000**			**80%**	**10.500.000**
	2	12	01	2.01	02		*Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD*	*Dokumen RKA*	Tana Toraja	1 dok	3.500.000	DAU		1 dok	3.500.000
	2	12	02	2.01	03		*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Dokumen Perubahan RKA*	Tana Toraja	1 dok	3.500.000	DAU		1 dok	3.500.000
	2	12	03	2.01	04		*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Dokumen DPA*	Tana Toraja	1 dok	3.500.000	DAU		1 dok	3.500.000
	2	**12**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		**95%**	**2.800.000.000**			**95%**	**2.807.273.000**
	2	12	02	2.02	01		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Pegawai Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Tana Toraja	*35 org*	*2.800.000.000*	DAU		*40 org*	*2.807.273.000*
	2	**12**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar**		**75%**	**3.500.000**			**75%**	**3.500.000**

2	12	02	2.03	01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-SKPD*	Tana Toraja	*1 dok*	*3.500.000*	DAU		*1 dok*	*3.500.000*
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai PD yang dilayani**		**76%**	**168.000.000**			**76%**	**168.000.000**
2	12	02	2.05	01	*Peningkatan sarana danrasarana Disiplin Pegawai*	*Jumlah Pegawai Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Tana Toraja	*55 org*	*25.000.000*	DAU		*55 org*	*25.000.000*
2	12	03	2.05	02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah pakaian Dinas dan Atribut Yang diadakan*	Tana Toraja	*55 org*	*38.000.000*	DAU		*55 org*	*38.000.000*
2	12	04	2.05	09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Tana Toraja	*1 org*	*25.000.000*	DAU		*1 org*	*25.000.000*
2	12	05	2.05	10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Pegawai yang memahami sosialisasi*	Tana Toraja	*40 org*	*20.000.000*	DAU		*40 org*	*20.000.000*
2	12	06	2.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan*	Tana Toraja	*6 org*	*60.000.000*	DAU		*6 org*	*60.000.000*
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai dengan standar**		**75%**	**481.128.000**			**75%**	**355.659.000**
2	12	02	2.06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Jenis Komponen*	Tana Toraja	*5 jenis*	*2.300.000*	DAU		*5 jenis*	*2.300.000*
2	12	03	2.06	02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	Tana Toraja	*8 jenis*	*355.988.000*	DAU		*8 jenis*	*250.000.000*
2	12	04	2.06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*	Tana Toraja	*4 jenis*	*2.039.000*	DAU		*4 jenis*	*2.039.000*
2	12	05	2.06	04	*Penyediaan bahan Logistik kantor*	*Jumlah bahan logistik yang disediakan*	Tana Toraja	*5 jenis*	*2.000.000*	DAU		*5 jenis*	*2.000.000*
2	12	06	2.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan*	Tana Toraja	*20 eksp*	*13.320.000*	DAU		*20 eksp*	*13.320.000*
2	12	07	2.06	06	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan*	Tana Toraja	*3 jenis*	*3.000.000*	DAU		*3 jenis*	*3.000.000*
2	12	09	2.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah tamu yang difasilitasi*	Tana Toraja	*10 org*	*3.000.000*	DAU		*10 org*	*3.000.000*

2	12	10	2.06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang terselenggara*	Tana Toraja	*1kali*	*89.481.000*	DAU		*1kali*	*80.000.000*
2	12	11	2.06	10	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	-
2	12	12	2.06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	-
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi**		**75%**	**169.672.000**			**75%**	**410.000.000**
2	12	01	2.07	01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan DinasAtau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan*	Tana Toraja	*1 unit*	*25.000.000*	DAU		*1 unit*	*400.000.000*
2	12	01	2.07	02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah kendaraan perorangan operasional atau lapangan yang diadakan*	Tana Toraja	*1 unit*	*25.000.000*	DAU		-	-
2	12	01	2.07	05	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah mebel yang diadakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*60.000.000*	DAU		-	-
2	12	01	2.07	06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*24.672.000*	DAU		*1 paket*	*10.000.000*
2	12	01	2.07	07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*20.000.000*	DAU		*1 paket*	-
2	12	01	2.07	06	*Pengadaan Aset tak Berwujud*	*Jumlah aset tak berwujud yang diadakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*5.000.000*	DAU		-	-
2	12	01	2.07	10	*Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*10.000.000*	DAU		*1 paket*	-
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	Tana Toraja	**75%**	**69.000.000**			**75%**	**65.000.000**
2	12	01	2.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah jasa surat menyurat*	Tana Toraja	*12 bulan*	*28.000.000*	DAU		*12 bulan*	*28.000.000*
2	12	01	2.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah satuan jasa komunikasi jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai*	Tana Toraja	*12 bulan*	*32.000.000*	DAU		*12 bulan*	*32.000.000*
2	12	01	2.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*	Tana Toraja	*12 bulan*	*4.000.000*	DAU		*12 bulan*	-

	2	12	01	2.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	Tana Toraja	*12 bulan*	*5.000.000*	DAU		*12 bulan*	*5.000.000*
	2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**		**82%**	**89.200.000**			**82%**	**72.068.000**
	2	12	01	2.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan*	Tana Toraja	*11 unit*	*15.500.000*	DAU		*11 unit*	*28.068.000*
	2	12	01	2.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan*	Tana Toraja	*1 unit*	*17.700.000*	DAU		*1 unit*	*24.000.000*
	2	12	01	2.09	05	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah paket mebel yang terpelihara*	Tana Toraja	*1 paket*	*1.000.000*	DAU		*1 paket*	-
	2	12	01	2.09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara*	Tana Toraja	*4 paket*	*20.000.000*	DAU		*4 paket*	*20.000.000*
	2	12	01	2.09	07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara*	Tana Toraja	*1 paket*	*4.000.000*	DAU		*1 paket*	-
	2	12	01	2.09	08	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud*	*Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara*	Tana Toraja	*1 paket*	*4.000.000*	DAU		*1 paket*	-
	2	12	01	2.09	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya*	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi*	Tana Toraja	*1 paket*	*25.000.000*	DAU		*1 paket*	-
	2	12	01	2.09	11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung bangunan Kantor atau Bangunan lainnya*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan kantor yang dipelihara/direhabilitasi*	Tana Toraja	*1 paket*	*2.000.000*	DAU		*1 paket*	-
2	**2**	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk**			***950.000.000***				***1.025.000.000***
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terkait Administrasi Kependudukan**		**81%**	**47.500.000**			**81%**	**56.000.000**

2	12	02	2.01	01	*Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*	*Jumlah Penduduk non permanen yang didata*	Tana Toraja	*70 orang*	*20.000.000*	DAU		*70 orang*	*20.000.000*
2	12	02	2.01	02	*Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Dokumen yang diterbitkan*	Tana Toraja	*20000 dok*	*1.000.000*	DAU		*25000dok*	*2.000.000*
2	12	02	2.01	03	*Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Masalah pendaftaran Penduduk yang diselesaikan*	Tana Toraja	*10 dok*	*2.000.000*	DAU		*10 dok*	*2.000.000*
2	12	02	2.01	04	*Peningkatan Pelayanan Pendafataran Penduduk*	*Jumlah perjalanan dinas luar daerah*	Tana Toraja	*26 kali*	*20.000.000*	DAU		*28 kali*	*20.000.000*
2	12	02	2.01	05	*Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	*Jumlah Peristiwa Kependudukan yang dicatatkan dan diterbitkan*	Tana Toraja	*2000 dok*	*2.000.000*	DAU		*25000dok*	*2.000.000*
2	12	02	2.01	06	*Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	*Jumlah Peristiwa Kependudukan yang dicatatkan*	Tana Toraja	*20000 dok*	*1.000.000*	DAU		*25000dok*	*2.000.000*
2	12	02	2.01	07	*Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang diterbitkan*	Tana Toraja	*1200 dok*	*1.000.000*	DAU		*1500 dok*	*4.000.000*
2	12	02	2.01	08	*Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk*	*Jumlah data terkait Pendaftaran dan perkembangan penduduk yang dikumpulkan dan dianalisis*	Tana Toraja	*159 dok*	*500.000*	DAU		*159 dok*	*4.000.000*
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan pendaftaran penduduk**	**Persentase Penataan Pendaftaran penduduk berjalan dengan baik**		**75%**	**301.000.000**			**75%**	**303.000.000**
2	12	02	2.02	01	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiduk Terkait pendaftaran Penduduk*	*Jumlah dokumen yang tersusun*	Tana Toraja	*3 dok*	*1.000.000*	DAU		*3 dok*	*3.000.000*
2	12	02	2.02	02	*Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Dokumen kependudukan yang diadakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*300.000.000*	DAU		*1 paket*	*300.000.000*

2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan**		**75%**	**534.500.000**			**75%**	**592.000.000**
2	12	02	2.03	01	*Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah perjalanan dinas dalam daerah*	Tana Toraja	*1 dok*	*1.000.000*	DAU		*1 dok*	*20.000.000*
2	12	02	2.03	02	*Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah perjalanan dinas Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk*	Tana Toraja	*3 jenis*	*230.000.000*	DAU		*3 jenis*	*230.000.000*
2	12	02	2.03	03	*Fasilitasi Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Pendaftaran Penduduk yang difasilitasi*	Tana Toraja	*1 paket*	*1.000.000*	DAU		*1 paket*	*20.000.000*
2	12	02	2.03	04	*Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah pemanfataan Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*1.000.000*	DAU		*1 paket*	*20.000.000*
2	12	02	2.03	05	*Sosialisasi Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk*	Tana Toraja	*100 org*	*230.000.000*	DAU		*100 org*	*230.000.000*
2	12	02	2.03	06	*Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendafataran Penduduk*	*Jumlah MOU yg diterbitkan*	Tana Toraja	*5 dok*	*20.000.000*	DAU		*5 dok*	*20.000.000*
2	12	02	2.03	07	*Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah masyarakat yang menerima eduksi pendaftaran penduduk*	Tana Toraja	*159 org*	*30.000.000*	DAU		*159 org*	*30.000.000*
2	12	02	2.03	08	*Penyajian Data kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Data Kependudukan yang disajikan*	Tana Toraja	*1 paket*	*21.500.000*	DAU		*1 paket*	*22.000.000*
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pendafataran Penduduk**		**75%**	**67.000.000**			**75%**	**74.000.000**
2	12	02	2.04	01	*Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah dokumen kependudukan yang dilaporkan*	Tana Toraja	*1 paket*	*7.000.000*	DAU		*1 paket*	*14.000.000*

	2	12	02	2.04	02	*Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Lembang/Kelurahan yang dibina terkait pendaftaran penduduk*	Tana Toraja	*159 Lembang/ Kelurahan*	*40.000.000*	DAU		*159 Lembang/Kelurahan*	*40.000.000*
	2	12	02	2.04	03	*Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk*	Tana Toraja	*2 orang*	*20.000.000*	DAU		*2 orang*	*20.000.000*
3	**2**	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil**			***160.000.000***				***165.000.000***
	2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait Pencatatan Sipil**		**81%**	**27.000.000**			**81%**	**27.000.000**
	2	12	03	2.01	01	*Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting*	*Jumlah Pelaporan Peristiwa Penting yang dicatatkan dan diterbitkan*	Tana Toraja	*5 dok*	*2.000.000*	DAU		*5 dok*	*2.000.000*
	2	12	03	2.01	02	*Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*	*Jumlah inovasi pelayanan yang diterapkan*	Tana Toraja	*1 keg*	*2.000.000*	DAU		*1 keg*	*2.000.000*
	2	12	03	2.01	03	*Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil*	*Jumlah data pencatatan sipil yang dikumpulkan dan dianalisis*	Tana Toraja	*3 jenis*	*2.000.000*	DAU		*3 jenis*	*2.000.000*
	2	12	03	2.01	04	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dilaporkan*	Tana Toraja	*3 jenis*	*1.000.000*	DAU		*3 jenis*	*1.000.000*
	2	12	03	2.01	05	*Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan*	*Jumlah Dokumen catatan Sipil yang disediakan*	Tana Toraja	*1 paket*	*20.000.000*	DAU		*1 paket*	*20.000.000*
	2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Berjalan Dengan Baik**		**81%**	**110.000.000**			**81%**	**115.000.000**
	2	12	03	2.02	01	*Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama di Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam*	*Jumlah dokumen perkawinanyang dikordinasikan*	Tana Toraja	*1 dok*	*3.000.000*	DAU		*1 dok*	*3.000.000*

2	12	03	2.02	02	*Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama di Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pelaksanaan Koordinasi*	Tana Toraja	*3 kali*	*1.000.000*	DAU		*3 kali*	*1.000.000*
2	12	03	2.02	03	*Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan pencatatan Sipil*	*Jumlah Pelaksanaan Koordinasi*	Tana Toraja	-	-	DAU		*3 jenis*	*3.000.000*
2	12	03	2.02	04	*Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah Permohonan dokumen Pencatatan Sipil yang diterima dari masyarakat*	Tana Toraja	*3 jenis*	*57.500.000*	DAU		*3 jenis*	*57.500.000*
2	12	03	2.02	05	*Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah dokumen Kependudukan yang diterima*	Tana Toraja	-	-	DAU		*1 dok*	*2.000.000*
2	12	03	2.02	06	*Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah kegiatan fasilitasi pencatatan sipil*	Tana Toraja	*1 keg*	*1.500.000*	DAU		*1 keg*	*1.500.000*
2	12	03	2.02	08	*Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pencatatan Sipil*	Tana Toraja	*19 kecamatan*	*32.000.000*	DAU		*19 kecamatan*	*32.000.000*
2	12	03	2.02	09	*Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah perjalanan dinas dalam daerah*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	*5.000.000*
2	12	03	2.02	10	*Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah kegiatan*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	*5.000.000*
2	12	03	2.02	11	*Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah Data Kependudukan terkait pencatatan Sipil yang diasajikan*	Tana Toraja	*7 data*	*5.000.000*	DAU		*7 data*	*5.000.000*
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	***Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil***		**85%**	**23.000.000**			**85%**	**23.000.000**

	2	12	03	2.03	01	*Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko, Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil*	*Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang dilaporkan*	Tana Toraja	*2 kali*	*1.000.000*	DAU		*1 paket*	*1.000.000*
	2	12	03	2.03	02	*Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah aparat yang dibina*	Tana Toraja	*1 keg*	*1.000.000*	DAU		*19 org*	*1.000.000*
	2	12	03	2.03	03	*Supervisi Bersama dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dan Kabupaten/Kota dan Pengadilan Sagama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai. Dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah dokumen pencatatn sipil*	Tana Toraja	*2 kali*	*1.000.000*	DAU		*1 kali*	*1.000.000*
	2	12	03	2.03	04	*Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil*	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil*	Tana Toraja	*2 orang*	*20.000.000*	DAU		*2 orang*	*20.000.000*
4	**2**	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**			***125.000.000***				***135.000.000***
	2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pemanfataan data**		**85%**	**22.500.000**			**85%**	**22.500.000**
	2	12	04	2.01	01	*Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan*	*Jumlah data kependudukan yang dikelola dan disajikan*	Tana Toraja	*6 jenis*	*12.500.000*	DAU		*6 jenis*	*12.500.000*
	2	12	04	2.01	02	*Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan*	*Jumlah MOU yang diterbitkan*	Tana Toraja	*5 dok*	*5.000.000*	DAU		*5 dok*	*5.000.000*
	2	12	04	2.01	03	*Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Data yang diinventarisasi*	Tana Toraja	*1 paket*	*5.000.000*	DAU		*1 paket*	*5.000.000*
	2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**80%**	**10.000.000**			**80%**	**10.000.000**
	2	12	04	2.02	01	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenmggaraan Adminduk terkait*	*Jumlah Kegiatan*	Tana Toraja	*1 keg*	*10.000.000*	DAU		*1 keg*	*10.000.000*

					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan PIAK**		**75%**	**52.500.000**			**75%**	**67.500.000**
2	12	04	2.03	01	*Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Jumlah dokumen kependudukanyang dikelolah*	Tana Toraja	*6 dok*	*4.500.000*	DAU		*6 dok*	*14.500.000*
2	12	04	2.03	02	*Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri*	*Jumlah data Kependudukanyang diberikan*	Tana Toraja	*1 paket*	*10.000.000*	DAU		*1 paket*	*10.000.000*
2	12	04	2.03	03	*Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi*	Tana Toraja	*1 keg*	*20.000.000*	DAU		*1 keg*	*20.000.000*
2	12	04	2.03	04	*Penyelemggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan*	*Jumlah Kegiatan pemanfaatan data*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	*5.000.000*
2	12	04	2.03	05	*Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Jumlah Kegiatan Sosialisasi*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	*10.000.000*
2	12	04	2.03	06	*Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi*	*Jumlah kegiatan kerjasama*	Tana Toraja	*2 keg*	*2.000.000*	DAU		*2 keg*	*2.000.000*
2	12	04	2.03	07	*Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat*	*Jumlah Kegiatan edukasi*	Tana Toraja	*1 keg*	*5.000.000*	DAU		*1 keg*	*5.000.000*
2	12	04	2.03	08	*Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan*	*Jumlah Kegiatan penyajian data*	Tana Toraja	*1 keg*	*1.000.000*	DAU		*1 keg*	*1.000.000*
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan PIAK**		**75%**	**40.000.000**			**75%**	**35.000.000**
2	12	04	2.04	01	*Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Jumlah lembang/Kelurahan yang mendapat pembinaan PIAK*	Tana Toraja	*159 Lembang/ Kelurahan*	*10.000.000*	DAU		*159 Lembang/Kelurahan*	*5.000.000*

	2	12	04	2.04	02		*Supervisi bersama dengan Kantor kementrian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan*	*Jumlah Data Kependudukan*	Tana Toraja	*1 paket*	*10.000.000*	DAU		*1 paket*	*10.000.000*
	2	12	04	2.04	03		*Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data kependudukan*	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis PIAK*	Tana Toraja	*2 orang*	*20.000.000*	DAU		*2 orang*	*20.000.000*
5	**2**	**12**	**04**				**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase Penyajian Data angregat dan buku Profil Kependudukan setiap Tahun**			***50.000.000***				***55.000.000***
	2	**12**	**04**	**2.01**			**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase data Kependudukan yang diterbitkan**		**90%**	**50.000.000**			**90%**	**55.000.000**
	2	12	04	2.01	01		*Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan*	Tana Toraja	*2 jenis*	*1.000.000*	DAU		*2 jenis*	*5.000.000*
	2	12	04	2.01	02		*Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain*	*Jumlah Dokumen Profil kependudukan yang disusun*	Tana Toraja	*444 buku*	*49.000.000*	DAU		*444 buku*	*50.000.000*
	J U M L A H										**5.076.000.000**				**5.272.000.000**

Bab 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan yang mendasar dan oerientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, penyusunan Renja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khusunya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renja 2024 ini. Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Makale, 04 Agustus 2023

Kepala Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil

ANDARIAS SARANGA, S.Pi

NIP. 19780310 200312 1 007

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TANA TORAJA

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja dapat diselesaikan dengan baik.Rencana Kerja PD merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama satu tahun anggaran.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat Pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 dari skema RPJP Daerah Kab. Tana Toraja 2005-2025,oleh karena itu dalam penyusunan Rencana kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah Kab.Tana Toraja 2021-2026 dan membangun sinergitas serta konsistensi dengan RPJP Daerah Kab. Tana Toraja 2005-2025,RPJMD Prov.Sulawesi Selatan dan RPJMN Nasional.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja ini,maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan Pelaksanaan ini akan sangat tergantung pada komitmen penuh dari aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Makale, 03 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

T.B.RANDA,S.Sos,MH
NIP.196909122003122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 23
2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 24
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 35
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 39
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANA TORAJA 40
BAB IV PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja s/d Tahun 2023 13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja 23

Tabel 2.3 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja 27

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja 34

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Dengan mempedomani Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005-2025. Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang memiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka disusunlah Renja Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Tana Toraja merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja sebagai penyelenggaraan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi khususnya dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja. Hal ini tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.19 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan

masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD,Renstra PD,dan RPJMD.Rencana Kerja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) membantu Bupati Tana Toraja dalam hal penyelenggaraan pemerintah dalam urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mereleasasikan pencapaian tujuan peningkatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Sejalan dengan hal tersebut, eksistensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja berupaya melaksanakan program sesuai kebutuhan daerah.

Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja disususn melalui proses yang sisitematis dan berkelanjutan, dengan pemerintah daerah, sehingga pada pencapaian tujuan.Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan, disusun berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan (buttom-up) yang dipadukan dengan usulan dari masing-masing bidang/program serta program prioritas dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Demikian juga dengan adanya demokratisasi di segala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan Ketenagakerjaaan dan ketransmigrasian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tana Toraja ;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 ;
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tahun 2024 untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun serta menggambarkan capaian kinerja PD pada tahun sebelumnya. Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab.Tana Toraja tahun 2024. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review)terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan(tahun -1).

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanl

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan,uraian gasir besar mengenai rekafitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik didalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tidak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja menurut Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi serta bidang energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penempatan, dan pelatihan tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penempatan, dan pelatihan tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penempatan, dan pelatihan tenaga kerja, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing – masing sebagai berikut :

a. Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan program kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

(1) Perumusan kebijakan teknis tugas Sub Bagian Program & Evaluasi, Sub Bagian Umum lingkup dinas;
(2) Pengoordinasian kebijakan teknis program kegiatan Sekretariat Dinas;
(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Evaluasi serta Sub bagian Umum;
(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Sekretariat;

(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu:

(1) Sub Bagian Umum & Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang membantu Sekretaris menyusun rencana,menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan penyusunan Program Kegiatan Urusan umum dan Kepegawaian, administrasi keuangan dan pengelolaan Surat Menyurat

(2) Subbagian Program dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program dan evaluasi

b. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat fungsional pada bidang tenaga kerjayakni Pengantar Kerja Ahli Muda, Adapun rincian tugas seorang kepala bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

(3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

(4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

(5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

(6) Merumuskan kebijakan teknis penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, keterampilan dan kesempatan kerja serta data dan informasi ketenagakerjaan;

(7) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta monitoring evaluasi bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja;

(8) Melaksanakan pembinaan lembaga, sarana pelatihan, menyusun program pelatihan keterampilan/pemagangan tenaga kerja skala kabupaten dan kapasitas dalam rangka pengembangan produktifitas tenaga kerja;

(9) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelatihan manajemen dan produktivitas tenaga kerja serta melaksanakan pengukuran produktivitas skala Kabupaten;

(10) Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan perizinan, sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga skala kabupaten;
(11) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan tenaga kerja;
(12) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
(13) Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai peraturan perUndang-Undangan;
(14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral

Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka perumusanpedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat fungsional pada bidang Hubungan Industrial & Energi Sumber Daya MIneral yakni Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, Adapun rincian tugas seorang kepala bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
(2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
(3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan
(4) Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
(5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
(6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
(7) Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis penyelesaian perselisihan industrial, pembinaan pekerja, usaha dan serikat pekerja, perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja dan anak, serta energi sumber daya mineral;
(8) Melaksanakan kebijakan teknis penyelesaian perselisihan industrial, pembinaan pekerja, usaha dan serikat pekerja, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan anak, dan energi sumber daya mineral;

(9) Menangani penyelesaian perselisihan industrial berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, dengan pihak-pihak yang berselisih untuk sidang mediasi;
(10) Memeriksa risalah Berita Acara, Perjanjian Bersama, dan Anjuran atas penyelesaian perselisihan industrial;
(11) Memantau dan menyelesaikan mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
(12) Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha melalui laporan atau kunjungan untuk mengetahui perkembangannya;
(13) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pekerja, usaha dan serikat pekerja;
(14) Melaksanakan fasilitas rekomendasi perizinan ketenagalistrikan, energi terbarukan, migas, data dan sumber daya mineral dan kegiatan penambangan dan air tanah sesuai dengan ketentuan, untuk proses perizinan selanjutnya;
(15) Melaksanakan koordinasi dan kosultasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
(16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
(17) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja, dan
(18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalm merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang teknis bidang Transmigrasi, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat fungsional pada bidang Transmigrasi yakni Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Adapun rincian tugas seorang kepala bidang Transmigrasi sebagai berikut:

(1) Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan Bidang Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
(2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
(3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
(4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
(5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

(6) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang transmigrasi, pembinaan warga transmigrasi, pengendalian dan pengawasan transmigrasi;
(7) Merencanakan dan mempersiapkan lahan bangunan, lahan pemukiman transmigran dan pengembangan masyarakat dan kawasan pemukiman transmigrasi;
(8) Menyiapkan administrasi pelaksanaan penempatan para transmigran di tempat permukiman yang sudah siap huni;
(9) Memberikan pembinaan, keterampilan, keahlian, dan penyuluhan ekonomi dan sosial budaya bagi warga transmigrasi di lokasi pemukiman di kabupaten;
(10) Memantau dan mengevaluasi perkembangan warga transmigrasi;
(11) Membuat laporan pengembangan fisik pemukiman sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
(12) Melaksanakan pembagian lahan usaha kepada warga transmigrasi di lokasi pemukiman yang telah ditentukan untuk siap garap;
(13) Memberikan pelayanan kesehatan dan pengurusan surat-surat bagi warga transmigrasi untuk mendapatkan pelayanan yang memadai bagi warga transmigrasi di lokasi pemukiman;
(14) Menyusun perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
(15) Melaksanakan pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan warga transmigrasi;
(16) Melaksanakan perencanaan teknis tata ruang pembangunan kawsan transmigrasi;
(17) Melaksanakan pembinaan teknis, supervisi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang pembangunan pemukiman transmigrasi;
(18) Memfasilitasi perpindahan dan penempatan warga transmigrasi melalui kerjasama antar daerah;
(19) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
(20) Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perUndang-Undangan;
(21) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
(22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigras, untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, meliputi:
    1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral;
e. Bidang Transmigrasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur Organiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun -tahun sebelumnya.

Evaluasi memiliki peran penting dalam proses analisis kebijakan, karena berfungsi untuk berbagai tujuan strategis. Melalui evaluasi, diharapkan kebijakan yang diterapkan di masa depan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai tujuannya, atau justru mengalami kegagalan. Salah satu tujuan utama lainnya adalah untuk memastikan adanya akuntabilitas publik. Dengan mengevaluasi kinerja kebijakan, pemerintah menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang membiayai sekaligus merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, evaluasi juga bertujuan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama dalam implementasi kebijakan berikutnya. Oleh karena itu, hasil evaluasi sangat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja s/d Tahun 2023:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**
2.07.01.2.02	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25	16	21	21	100%	17	17	68%
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	735	90	110	110	100%	130	330	44,90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD yang terselenggara	900	118	157	157	100%	147	470	52%
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	326	37	40	35	88%	39	111	34%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air, dan Listrik	**3**	1	**2**	**2**	**100%**	**3**	**3**	**100%**
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	3	3	3	100%	4	8	50%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	0	3	3	100%	3	6	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang urusan Perangkat Daerah yang terpelihara**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**100%**	**100%**
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	8	7	5	5	100%	7	18	225%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	4	3	3	100%	7	12	150%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	19	-	-	-	0%	6	6	32%
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVTAS TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	205	10	14	14	100%	50	74	36%
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Terlaksananya Pendataan Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**100%**		**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	2750	-	-	-	**-**	225	225	8,2%
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan PP/PKB**	**50%**	-	-	-	**-**	**20%**	**20%**	**20%**
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendfaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan**	**100%**	-	-	-	**-**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Infromasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans	170	**-**	-	-	-	**170**	**170**	**100%**
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi untuk Mencegah Perselisihan	6	1	1	1	100%	1	3	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
3.32	**URURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Transmigran yang Berkompeten**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang dilatih	175	-	25	25	100%	20	45	26%

Sumber Data: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional serta pemukiman yang berkualitas bagi trasmigran di Kabupaten Tana Toraja, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu mementingkan kepentingan masyarakat.

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100	100	100	100	80,09	100	100	80,09	100	100
2	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	88	88	88	88	70,79	20,4	13,28	80,44	23,18	15,09
3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100	100	100
5	Prosentase penempatan transmigrasi	75	75	75	75	100	87,5	58,33	133,33	116,67	77,77

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan data capaian kinerja perangkat daerah dari tahun 2020 hingga 2022, secara umum terjadi pencapaian yang bervariasi terhadap target yang telah ditetapkan. Indikator seperti *persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi* dan *persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan* menunjukkan capaian optimal dengan rasio 100% setiap tahun. Indikator *klarifikasi tata batas kawasan hutan pada lokasi transmigrasi* juga menunjukkan konsistensi capaian 100%. Namun demikian, *persentase pencari kerja yang ditempatkan* menunjukkan kinerja yang jauh di bawah target, dengan rasio capaian antara 13% hingga 23%, yang mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas program penempatan kerja. Sementara itu, *persentase penempatan transmigrasi* mengalami fluktuasi, dengan capaian melampaui target di awal tetapi menurun signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun beberapa program telah berjalan dengan baik, masih ada indikator kinerja yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut agar target strategis dapat tercapai secara merata.

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi.

Analisis internal dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan serta transmigrasi di tingkat kabupaten. Sementara itu, analisis eksternal mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis yang berpotensi menjadi peluang maupun tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun mendatang.

Rumusan isu strategis ini disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi dapat menjawab permasalahan yang ada, sekaligus merespons dinamika eksternal yang berkembang di masyarakat dan dunia kerja. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kompetensi tenaga kerja belum memadai	Banyak pencari kerja belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja	- Kurangnya akses dan kualitas pelatihan kerja; - Keterampilan teknis dan soft skills pencari kerja masih rendah; - Perubahan kebutuhan industri tidak diimbangi oleh pembaruan kompetensi pencari kerja; - Terbatasnya lapangan kerja formal.
2	Tingginya angka pengangguran	Banyak pencari kerja tidak terserap oleh dunia kerja	- Mismatch antara kemampuan pencari kerja dan kebutuhan industri; - Kurangnya informasi dan akses terhadap peluang kerja.
3	Penempatan tenaga kerja belum optimal	Layanan penempatan kerja belum berjalan dengan baik	- Banyak perusahaan belum aktif melaporkan lowongan kerja; - Jumlah pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja; - Informasi lowongan dan program kerja/magang ke luar negeri belum tersosialisasi dengan baik; - Pembinaan terhadap proses penempatan kerja masih minim; - Pemantauan tenaga kerja asing belum berjalan; - Implementasi UU Disabilitas belum maksimal di perusahaanPenyuluhan jabatan belum menjangkau sekolah, kampus, dan lembaga pelatihan secara luas.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Rendahnya kesadaran hubungan industrial	Banyak pekerja dan pengusaha belum paham hak dan kewajiban dalam hubungan kerja	- Minimnya sosialisasi dan pembinaan ketenagakerjaan; - Kurangnya perlindungan kerja jangka panjang; - Kurangnya peran aktif serikat pekerja dan pengusaha dalam menciptakan hubungan kerja yang adil; - Minimnya dialog sosial dalam penyelesaian konflik kerja; - Ketidakstabilan ekonomi dan efisiensi perusahaan.
5	Kawasan transmigrasi belum berkembang optimal	Pembangunan kawasan transmigrasi berjalan lambat	- Proses identifikasi lahan untuk pemukiman transmigrasi masih kurang cermat; - Penempatan warga transmigrasi masih minim dan belum merata.

Sumber Data: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 melalui analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian target Renstra.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**2.621.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**2.621.000.000**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	2.246.000.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	2.246.000.000	
1.	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**95%**	**1.660.000.000**	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**95%**	**1.660.000.000**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tana Toraja	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	16	1.660.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tana Toraja	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	16	1.660.000.000	
2.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	**158.400.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	**158.400.000**	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Kab. Tana Toraja	Jumlah Paket Instalasi Listrik yang Disediakan	13	1.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Kab. Tana Toraja	Jumlah Paket Instalasi Listrik yang Disediakan	14	1.400.000	
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	145	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	145	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-Undangan	12	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-Undangan	12	2.000.000	
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tana Toraja	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Terselenggara	180	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tana Toraja	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Terselenggara	180	130.000.000	
3.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**90%**	**315.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**90%**	**315.000.000**	
a.	Pengadaan Kendaraan Operasional	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan	1	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Operasional	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan	1	300.000.000	
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tana Toraja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tana Toraja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	15.000.000	
4.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	**65.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	**65.600.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tana Toraja	Jumlah Jasa Surat – Menyurat yang Tersedia	40	23.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tana Toraja	Jumlah Jasa Surat – Menyurat yang Tersedia	40	23.000.000	
b.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tana Toraja	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang DIpakai	2	35.000.000	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tana Toraja	Jumlah Jasa Satuan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang DIpakai	2	35.000.000	
c.	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kab. Tana Toraja	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	7.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kab. Tana Toraja	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	7.000.000	
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tana Toraja	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tana Toraja	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	600.000	
5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Perangkat Daerah yang terpelihara**	**95%**	**47.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Perangkat Daerah yang terpelihara**	**95%**	**47.000.000**	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1	42.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Dinas Jabatan					
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	2.000.000	
c.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tana Toraja	Jumlah Mebel yang Terpelihara	21	1.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tana Toraja	Jumlah Mebel yang Terpelihara	21	1.000.000	
d.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Tana Toraja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	7	2.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Tana Toraja	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	2.000.000	
B.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVTAS TENAGA KERJA**		**Presentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100%**	**150.000.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVTAS TENAGA KERJA**		**Presentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100%**	**150.000.000**	
1.	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi**	**40**	**150.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi**	**40**	**150.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
a.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tana Toraja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	40	150.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tana Toraja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	40	150.000.000	
C.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan**	**100%**	**175.000.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan**	**100%**	**175.000.000**	
1.	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**550**	175.000.000	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**550**	175.000.000	
a.	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Tana Toraja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	550	175.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Tana Toraja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	550	175.000.000	
D.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase Perusahaan yang Menerapkan PP/PKB**	**50%**	**50.000.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase Perusahaan yang Menerapkan PP/PKB**	**50%**	**50.000.000**	
1.	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendfaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam1 (satu) Daerah**		**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan**	**100%**	**15.000.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendfaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk**		**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan**	**100%**	**15.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota					**Perusahaan yang hanya beroperasi dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
a.	Penyelenggaraan Pendataan dan Infromasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans	160	15.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Infromasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans	160	15.000.000	
2.	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**100%**	**35.000.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**100%**	**35.000.000**	
a.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kegiatan Sosialisasi untuk Mencegah Perselisihan	1	35.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan	Kab. Tana Toraja	Jumlah Kegiatan Sosialisasi untuk Mencegah Perselisihan	1	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kabupaten/Kota					Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**95.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**95.000.000**	
A.	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**100%**	**95.000.000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**100%**	**95.000.000**	
1.	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Transmigran Lokal yang Berkompeten**	**35**	**95.000.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Transmigran Lokal yang Berkompeten**	**35**	**95.000.000**	
a.	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Tana Toraja	Jumlah Transmigran Lokal yang Berkompeten	35	**95.000.000**	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Tana Toraja	Jumlah Transmigran Lokal yang Berkompeten	35	**95.000.000**	
	JUMLAH				**2.716.0000.000**	**JUMLAH**				**2.716.000.000**	

Sumber Data: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dijelaskan hasil kajian terhadap berbagai usulan program atau kegiatan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari kelompok masyarakat terkait pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi atau berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari perangkat daerah provinsi melalui kegiatan penelitian lapangan serta pengamatan terhadap pelaksanaan Musrenbang di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tana Toraja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Sumber Data: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja

BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2020–2024, tujuan pembangunan jangka menengah periode tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Upaya ini menekankan pada pembentukan struktur perekonomian yang tangguh dan berdaya saing, yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

"***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong***".

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2. membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang Bersih,efektif demokratis dan terpercaya
3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakuakan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Mengacu pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi pelaksanaan misi

Nawacita serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut meliputi: pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Adapun penjabaran masing-masing arahan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan ditribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan memepercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang cipta lapangan kerja. Kedua, Undang-Undang pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memperhatikan juga perencanaan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun Kementerian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

a. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

1) Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2) Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar

negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;

3) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang;
4) Mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
5) Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
6) Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
7) Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

b. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah sasaran strategis, sebagai berikut:

1) Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan Indeks SPBE.

2. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas

Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
3) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4) Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
6) Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1) Berkembangnya status pembangunan desa;
2) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan;
3) Menurunnya kemiskinan di perdesaan;
4) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
5) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma);
6) Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
7) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
8) Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal;
9) Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal;

10) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
11) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi;
12) Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi.
13) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi;
14) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Toraja dilakukan secara teknokratik melalui penelaahan terhadap arah kebijakan dan sasaran utama RPJMD Kabupaten Tana Toraja, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Tujuan tersebut kemudian disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja terpilih, sehingga menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Tana Toraja hingga tahun 2024.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan potensi sumber daya kawasan transmigrasi;
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebgai berikut:

1. Meningkatnya perluasan, penempatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja serta transmigrasi;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANA TORAJA

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja merancang Program Dan Kegiatan Prioritas, yang terkait secara langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana dalam Renja Tahun 2024 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja merencanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 2.716.000.000,-.

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		**95%**	**1.939.106.160**	**APBD**		**95%**	**2.051.000.000**
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**		**95%**	**1.682.845.160**	**APBD**		**95%**	**1.700.000.000**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kab. Tana Toraja	16	1.682.845.160	APBD		18	1.700.000.000
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**		**-**	**-**	**APBD**		**95%**	**40.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat Berdasarkan Tusi	Kab. Tana Toraja	-	-	APBD		2	40.000.000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**		**95%**	**158.400.000**	**APBD**		**95%**	**188.400.000**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Isntalasai Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik yang Disediakan	Kab. Tana Toraja	13	1.400.000	APBD		14	1.000.000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tana Toraja	-	-	APBD		9	10.000.000
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Tana Toraja	-	-	APBD		2	2.000.000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tana Toraja	145	25.000.000	APBD		155	23.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab.Tana Toraja	12	2.000.000	APBD		12	2.000.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	Kab. Tana Toraja	180	130.000.000	APBD		190	150.000.000
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**		**95%**	**315.000.000**	**APBD**		**95%**	**10.000.000**
					Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan	Kab. Tana Toraja	1	300.000.000	APBD		-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tana Toraja	6	15.000.000	APBD		-	-
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Kab.Tana Toraja	-	-	APBD		1	10.000.000
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**		**95%**	**65.600.000**	**APBD**		**95%**	**64.600.000**
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat-menyurat yang tersedia	Kab. Tana Toraja	65	23.000.000	APBD		70	23.000.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Dipakai	Kab. Tana Toraja	3	35.000.000	APBD		3	35.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Satuan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Kab. Tana Toraja	4	7.000.000	APBD		4	6.000.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tana Toraja	5	600.000	APBD		5	600.000
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang urusan Perangkat Daerah yang terpelihara**		**95%**	**47.000.000**	**APBD**		**95%**	**48.000.000**
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kab. Tana Toraja	1	42.000.000	APBD		1	42.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tana Toraja	6	2.000.000	APBD		6	3.000.000
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Kab. Tana Toraja	21	1.000.000	APBD		23	1.000.000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Kab. Tana Toraja	7	4.000.000	APBD		7	2.000.000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVTAS TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**		**100%**	**150.000.000**	**APBD**		**100%**	**175.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi**		**40**	**150.000.000**	**APBD**			**175.000.000**
2	**07**	**03**	**2.01**	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Kab. Tana Toraja	40	150.000.000	APBD		50	175.000.000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan**		**100%**	**175.000.000**	APBD		**100%**	**195.000.000**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan**		**550**	**175.000.000**	**APBD**		**600**	**195.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Kab. Tana Toraja	550	175.000.000	APBD		600	195.000.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan PP/PKB**		**50%**	**50.000.000**	APBD		**50%**	**55.000.000**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendfaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan**		**50%**	**15.000.000**	**APBD**		**50%**	**15.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**07**	**05**	**2.01**	**03**	Penyelenggaraan Pendataan dan Infromasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans	Kab. Tana Toraja	160	15.000.000	APBD		160	15.000.000
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**		**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.000.000**
2	**07**	**05**	**2.02**	**01**	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi untuk Mencegah Perselisihan	Kab. Tana Toraja	1	35.000.000	APBD		1	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Penempatan Transmigrasi**		**100%**	**95.000.000**	**APBD**		**100%**	**100.000.000**
3	**32**	**01**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Transmigran Lokal yang Berkompeten**		**35**	**95.000.000**	**APBD**		**40**	**100.000.000**
3	32	01	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran Lokal yang Berkompeten	Kab. Tana Toraja	35	95.000.000	APBD		40	100.000.000
JUMLAH									**2.716.000.000**				**2.576.000.000**

Sumber Data: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis (Renstra)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan beriorentasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana kerja memuat tujuan dan sasaran,program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran oerganisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja.

Rencana kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja, penyusunan Renja diharapakan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembanangan lingkungan strategis baik diintern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja maupun dilingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semu pihak,dan mampu mendorong pencapain prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2024.

Makale, 03 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

T.B.RANDA,S.Sos,MH
Nip:196909122003122006



2024

(RENJA)

Rencana Kerja

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunianya, Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat tersusun.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024 yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya yang telah ditetapkan.

Tana Toraja, Agustus 2023
Kepala Dinas ,

EDWAD SAKKA ALLORERUNG, SE
PEMBINA TK.1 IV/b
NIP. 19801201 200312 1 004

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	Pendahuluan	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Landasan Hukum	I – 2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
	1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Dinas Perangkat Daerah Tahun Lalu	II - 7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 14
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III - 17
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 17
	3.2 Program dan Kegiatan	III - 17
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV - 25
BAB V	Penutup	V - 28

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2 . 1 . Evaluasi Pelaksaan Renja Tahun 2023 dan capaian RENSTRA 8

Tabbel 2 . 2 . Realisasi anggaran Pelaksanaan APBD tahun 2023 13

Tabel 2 . 3 . Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

Tabel 4 . 1 . Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Dearah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renja ***Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024*** seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD 2021-2026. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah**, dalam penyusunan Renja ***Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024*** juga berpedoman pada **dokumen penunjang perencanaan OPD**.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD

untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan hasil evaluasi **Renstra** OPD yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka ***Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian*** menyusun Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024, disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan menteri dalam Negeri Republik indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 38).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA ***Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024*** adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini ***Dinas Koperasi UKM,***

Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang handal dan berdaya saing khususnya yang akan dilaksanakan tahun 2024.

b. Sebagai pedoman ***Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024*** dalam penyusunan RKA – OPD Tahun 2024.

c. Sebagai tolok ukur OPD/Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tana Toraja dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Merupakan ***Bab Pendahuluan*** yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen Renja.

BAB II Merupakan ***Bab Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu*** yang memuat analisis capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis faktor – faktir penyebab keberhasilan atau kegagalan serta penyajian implikasi terhadap capaian program dan kebijakan yang perlu di ambil.

BAB III Merupakan ***Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*** yang akan memuat Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, sasaran yang ditetapkan serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut.

BAB IV Merupakan ***Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang*** memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ***Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024*** dalam kurun waktu tahun 2024.

BAB V Merupakan ***Bab Penutup***, yang memuat Catatatan Penting, Kaidah - kaidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Sebelumnya

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh kerena itu Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Tabel berikut akan menyajikan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2026	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar																				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	12	3.450.000	0	-	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Koperasi , UKM Kabupaten Tana Toraja tepat waktu																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	13.632.294.850	37	4.086.726.712	27	3.863.569.000	0	-	27	1.556.538.764	0	871.207.854	0	980.463.920	27	3.408.210.538	64	7.494.937.250,00	54,98	457,14
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	88,21				
									Predikat kinerja									ST	T				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Tana Toraja																				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	12	230.000.000	0	-	12	3.500.000	0	-	0	-	0	-	12	2.735.000	12	2.735.000	12	2.735.000,00	100,00	1,19
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	78,14				
									Predikat kinerja									ST	T				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar																				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	47.614.000	24	15.465.000	12	15.170.000		-	2	2.830.000	5	4.700.000	5	7.639.000	12	15.169.000	24	30.634.000,00	100,00	64,34
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	21.460.000	24	1.500.000	12	2.210.000		-	5	810.000	2	360.000	5	720.000	12	1.890.000	36	3.390.000,00	150,00	15,80
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	1.102.315.000	24	417.495.640	12	278.760.000		-	4	63.212.200	4	107.681.386	4	104.989.344	12	275.882.930	36	693.378.570,00	150,00	62,90
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	94,83				
									Predikat kinerja									ST	ST				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia																				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24	188.380.000	24	45.368.500	12	31.738.500		-	0	-	6	23.139.500	6	8.424.000	12	31.563.500	36	76.932.000,00	150,00	40,84
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	219.000.000	12	36.000.000	12	600.000		-	0	-	0	-	12	358.500	12	358.500	24	36.358.500,00	100,00	16,60
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	20.615.000	12	12.346.000	12	52.200.000		-	2	5.111.000	1	400.000	9	45.100.000	12	50.611.000	24	62.957.000,00	200,00	305,39
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	98,20				
									Predikat kinerja									ST	ST				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	185.096.000	12	50.218.460	12	27.000.000	0	-	4	8.946.988	4	8.113.816	4	9.892.596	12	26.953.400	12	77.171.860,00	50,00	41,69
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	120.070.000	12	15.131.175	12	77.500.000	0	-	4	7.680.847	4	38.696.238	4	28.616.734	12	74.993.819	12	90.124.994,00	50,00	75,06
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah mesin liannya yang terpelihara	24	127.000.000		6.600.000	18	14.200.000	0	-	0	-	9	5.720.000	9	8.480.000	16	14.200.000		20.800.000,00	0,00	16,38
									Rata-rata capaian kinerja (%)									96,30	98,86				
									Predikat kinerja									ST	ST				
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														

II	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten Tana Toraja																						
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Koperasi yang diperiksa yang mandiri, tangguh dan sehat serta akuntabel																						
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa yang mandiri, tangguh dan sehat serta akuntabel	96	1.582.645.500	64	362.111.800	25	120.785.000		-	0	-	15	97.079.000	10	21.846.200	25	118.925.200	89	481.037.000,00	92,71	30,39
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	98,46				
									Predikat kinerja									ST	ST				
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														
III		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase koperasi dengan Kategori sehat																						
		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinja/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam kabupaten kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya																						
		Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi kewenangan kabuapaten/ kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat	96	140.000.000	32	164.076.000	37	216.442.000		0	4	24.000.000	3	18.000.000	30	166.692.800	37	208.692.800	69	372.768.800,00	71,88	266,26
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	96,42				
									Predikat kinerja									ST	ST				
									Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-
									Predikat kinerja														
IV		POGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan tentang Perkoperasian																						
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkaan Pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan tentang Perkoperasian																						
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	54	1.599.426.000	68	544.126.400	22	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	68	544.126.400,00	125,93	34,02
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														
									Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-
									Predikat kinerja														
V		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus dan Pelaku UKM anggota Koperasi																						
		Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus dan Pelaku UKM anggota Koperasi																						
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang diberdayakan demi peningkatan produktifitas dan Akses Pasar	31	1.241.548.500	70	365.508.400	19	90.560.000	0	-	0	-	0	-	19	90.461.105	19	90.461.105	89	455.969.505,00	287,10	36,73
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	99,89				
									Predikat kinerja									ST	ST				
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														
VI		PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase Pengetahuan dan Keterampilan para Pelaku UKM dalam pengembangan usaha																						
		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan SkalaUsaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase meningkatnya Pelaku UKM dan Anggota Koperasi																						
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan dilatih untuk peningkatan usaha dan Pendapatan	28	1.276.684.000	75	501.446.000	63	249.621.500	0	-	0	-	43	150.924.500	20	78.855.500	63	229.780.000	138	731.226.000,00	492,86	57,28
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	92,05				
									Predikat kinerja									ST	ST				

VII		PROGRAM PEMBERDAYAAN UKM	Persentase UKM yang diberdayakan																						
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, Penguatan kelembagaan, dan kkordinasi dengan pemangku kepentingan	Persentase usaha mikro yang didata kemitraan, kemudahan perizinan dan penguatan kelembagaan																						
		Pendataan Potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	28	105.000.000	70	131.928.800	127	448.347.000	0	-	55	93.313.000	12	10.390.000	60	96.100.000	127	199.803.000	197	331.731.800,00	703,57	315,94
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100	44,56				
									Predikat kinerja									ST	SR				
VIII	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Laju pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan																				
		1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan																				
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terbangun	23	285.000.000	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	73,91	0,00
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														
		2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok pedagang																				
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dibina	2871	35.000.000	1278	17.600.000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278	17.600.000	44,51	50,29
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														
IX		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perusahaan yang memiliki Izin																				
		1. Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Izin																				
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pengurusan ijin	295	610.000.000	125	77.380.000	2047	22.500.000	-	-	-	-	-	-	2047	22.190.000	2.047	22.190.000	2.172	99.570.000	736,27	16,32
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	98,62				
									Predikat kinerja									ST	ST				
X		PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok																				
		1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah dengan harga yang terkendali																				
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	1461	1.750.000.000	562	1.539.321.688	350	269.690.000	-	-	-	-	150	11.650.000	150	17.730.000	300	29.380.000	862	1.568.701.688	59,00	89,64
									Rata-rata capaian kinerja (%)									85,71	10,89				
									Predikat kinerja									T	SR				
XI		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang di tera																				
		1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pasar tertib ukur																				
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang di tera	1429	165.000.000	721	70.520.000	250	29.925.000	-	-	-	-	-	-	238	29.925.000	238	29.925.000	959	100.445.000	67,11	60,88
									Rata-rata capaian kinerja (%)									95,20	100,00				
									Predikat kinerja									ST	ST				
XII	Meningkatnya pertumbuhan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kelompok industri yang terfasilitasi																				
		1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok industri yang terfasilitasi																				
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah rencana pembangunan industri	1	225.000.000	1	99.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99.913.000	100	44,41
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sentra binaan industri kecil dan menengah	96	2.600.000.000	34	340.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	35	355.000.000	36,46	13,65
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Jumlah pengrajin yang dibina	692	3.400.000.000	348	3.510.142.720	15	83.861.000	-	-	-	-	15	70.354.760	-	10.729.877	15	81.084.637	363	3.591.227.357	52,46	105,62
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	98,34				
									Predikat kinerja									ST	ST				
XIII		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan yang dipasarkan																				
		1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jenis produk unggulan yang dipasarkan																				
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis produk yang dipromosikan	44	205.000.000	18	267.625.916	8	192.500.000	8	57.269.785	-	85.000.000	-	26.099.600	-	21.942.000	8	190.311.385	26	457.937.301	59,09	223,38
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	98,86				
									Predikat kinerja									ST	ST				

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2023 mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 6.105.679.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.5.118.120.814,- sisa anggaran sebesar Rp. 987.558.816,- telah memiliki presentase sebesar 83.83 %. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi Rp. 6.067.690.000,- dengan realisasi Rp. 5.353.527.199,- dengan presentase 88,23 dan Belanja Modal sebesar Rp. 37.989.000,- dengan realisai Rp. 36.400.000,- dengan presentase 95,82%

Realisasi Program Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2023 yaitu:

- Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi Pagu anggaran sebesar Rp. 120.785.000,- terealisasi sebesar Rp. 118.925.200,- (98,46%)
- Program Penilaian kesehatan KSP/KSU Koperasi Pagu anggaran sebesar Rp. 216.442.000,- terealisasi sebesar Rp. 208.962.800,- (96,42%)
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pagu anggaran sebesar Rp. 90.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.461.105,- (99,89%)
- Program Pengembangan UMKM Pagu anggaran sebesar Rp.

249.621.500,- terealisasi sebesar Rp. 229.780.000,- (92,05%)

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Pagu anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.190.000,- (98,62%)
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Pagu anggaran sebesar Rp. 29.925.000, terealisasi sebesar Rp. 29.925.000,- (100,00%)
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Pagu anggaran sebesar Rp. 192.500.000, terealisasi sebesar Rp. 190.311.385,- (98,86%)
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pagu anggaran sebesar Rp. 98.861.000,- terealisasi sebesar Rp. 96.084.637,- (97,19%)

Adapun rincian realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan APBD Tahun 2023

No	NO. REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	
				KEUANGAN	%
1	2	3	7	10	11
1		**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**	**6.105.679.000**	**5.118.120.814**	**83,83%**
	2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL**	**5.492.203.000**	**4.750.229.792**	**86,49%**
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.366.447.500**	**3.902.567.687**	**89,38%**
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**3.863.569.000**	**3.408.210.538**	**88,21%**
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.863.569.000	3.408.210.538	88,21%
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**3.500.000**	**2.735.000**	**78,14%**
	2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.500.000	2.735.000	78,14%
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**296.140.000**	**292.941.930**	**98,92%**
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.170.000	15.169.000	99,99%
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.210.000	1.890.000	85,52%
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP9	278.760.000	275.882.930	98,97%
	2.17.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**84.538.500**	**82.533.000**	**97,63%**
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	31.738.500	31.563.500	99,45%
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000	358.500	59,75%
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	52.200.000	50.611.000	96,96%
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**118.700.000**	**116.147.219**	**97,85%**
	2.17.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	27.000.000	26.953.400	99,83%
	2.17.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	77.500.000	74.993.819	96,77%
	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14.200.000	14.200.000	100,00%
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**120.785.000**	**118.925.200**	**98,46%**
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan**	**120.785.000**	**118.925.200**	**98,46%**
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.785.000	118.925.200	98,46%
	2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**216.442.000**	**208.692.800**	**96,42%**
	2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan**	**216.442.000**	**208.692.800**	**96,42%**
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	216.442.000	208.692.800	96,42%
	2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**90.560.000**	**90.461.105**	**99,89%**
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang**	**90.560.000**	**90.461.105**	**99,89%**
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90.560.000	90.461.105	99,89%
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,**	**448.347.000**	**199.803.000**	**44,56%**
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui**	**448.347.000**	**199.803.000**	**44,56%**
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	123.347.000	106.103.000	86,02%
	2.17.07.2.01.03	Fasilitas kemudahan Perizinan Usaha Mikro	44.450.000	38.000.000	85,49%
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	100.960.000	-	0,00%
	2.17.07.2.01.05	Koordinasi Dan Sikronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	179.590.000	55.700.000	31,02%
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**249.621.500**	**229.780.000**	**92,05%**
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan**	**249.621.500**	**229.780.000**	**92,05%**
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	249.621.500	229.780.000	92,05%

No	NO. REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	
				KEUANGAN	%
1	2	3	7	10	11
1		**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**	**6.105.679.000**	**5.118.120.814**	**83,83%**
	3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**514.615.000**	**271.806.385**	**52,82%**
	3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**22.500.000**	**22.190.000**	**98,62%**
	3.30.02.2.02	**Penerbitan tanda daftar gudang**	**22.500.000**	**22.190.000**	**98,62%**
	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar gudang	22.500.000	22.190.000	98,62%
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN**	**269.690.000**	**29.380.000**	**10,89%**
	3.30.04.2.02	**Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan**	**269.690.000**	**29.380.000**	**10,89%**
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota	269.690.000	29.380.000	10,89%
	3.30.06	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**29.925.000**	**29.925.000**	**100,00%**
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan**	**29.925.000**	**29.925.000**	**100,00%**
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan / Penyuluhan metrologi legal	29.925.000	29.925.000	100,00%
	3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM**	**192.500.000**	**190.311.385**	**98,86%**
	3.30.07.2.01	**Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan**	**192.500.000**	**190.311.385**	**98,86%**
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan promosi dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	192.500.000	190.311.385	98,86%
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**98.861.000**	**96.084.637**	**97,19%**
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**98.861.000**	**96.084.637**	**97,19%**
	3.30.02.2.01	**Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri**	**98.861.000**	**96.084.637**	**97,19%**
	3.30.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	15.000.000	15.000.000	100,00%
	3.30.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	83.861.000	81.084.637	96,69%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tugas pokok yang dititik beratkan pada sasaran dan program strategisnya dengan indikator masing-masing.

TABEL 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET	REALISASI
			2023	2023
1	Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM	%	62	52
		%	8	7,46
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan	%	37,84	47,83
3	Meningkatnya pertumbuhan industri	%	24,23	5,57

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yaitu :

   a) **Permasalahan di Bidang Koperasi dan UKM**

   - ✓ Kualitas dan jumlah SDM (Aparatur) pada sektor Koperasi dan UKM belum memadai;
   - ✓ Data dan informasi koperasi dan UKM belum cukup memadai dan akurat;
   - ✓ Keterbatasan akses koperasi dan ukm terhadap sumber daya produktif, khususnya sumber daya pembiayaan dan kredit perbankan;
   - ✓ Informasi tentang iklim usaha serta fasilitas permodalan melalui KUR masih cenderung belum optimal.

   b) **Permasalahan di Bidang Perindustrian**

   - ✓ Mutu dan kualitas serta jumlah produksi di hasilkan oleh pelaku usaha belum memenuhi standar produksi;
   - ✓ Usaha yang dikembangkan oleh masyarakat belum terorganisir dengan baik seperti sentra industry;

c) **Permasalah di Bidang Perdagangan**

- ✓ Belum tersedianya kawasan perdagangan yang refresentatif;
- ✓ Mutu dan kualitas serta jumlah produksi yang belum standar produksi regional maupun untuk ekspor
- ✓ Kurangnya pengembangan usaha dan pemberdayaan pelaku usaha dimasa depan;

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

- ➢ Masih banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan, koperasi UKM dan perindustrian yang perlu ditingkatkan;
- ➢ Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan dalam pelayanan public dan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- ➢ Kompentensi sumber daya manusia yang terbuka luas sehingga memungkinkan sumber daya local kita tidak mampu bersaing secara kualitatif;
- ➢ Tuntutan akan pelestarian lingkungan hidup membaea aplikasi perlunya pengembangan teknologi ramah lingkungan, konservatif, penerapan tata ruang yang konsisten, penerapan teknologi tepat guna sederhana dan mutakhir;
- ➢ Tuntutan global akan kebutuhan rumah yang layak huni sebagai kebutuhan dasar manusia dan membebaskan lingkungan kecamatan maupun desa dari kawasan kumuh;
- ➢ Masih banyaknya angka pengangguran tiap tahun dan kurang sumber daya manusia dalam pengembangan usaha – usaha maupun menciptakan lapangan kerja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci kebersihan. Tujuan dan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dan sasaran organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Memperluas akses Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usaha produktif;
2. Meningkatkan kontribusi industri rumah tangga dan perdagangan terhadap perekonomian;
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tana Toraja.

Sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya pertumbuhan industri
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
4. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Indikator Tujuan/Sasaran

1. Persentase koperasi aktif

2. Persentase pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Persentase pasar yang termanfaatkan dengan baik
4. Persentase industri yang berkembang

3.2. Sasaran dan Program Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tana Toraja.

Program ini dilengkapi dengan indikator yang terukur dalam pencapaian hasilnya. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Rencana Program dan Kegiatan**

Urusan Bidang Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
   - Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
     - Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
     - Sub Keg. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Sub Keg. Penyediaan Peralatan rumah tangga,
     - Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

- Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
- Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-
  - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan;
  - Sub Keg. Pemeliharaan Mebel;
  - Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   - Keg. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam

Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Keg. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   - Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
     - Sub Keg. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
     - Sub Keg. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   - Keg. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
     - Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
     - Sub Keg. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   - Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
     - Sub Keg. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Keg. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - Sub Keg. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - Sub Keg. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - Sub Keg. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
  - Sub Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

8. Program Pengembangan UMKM

- Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - Sub Keg. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Urusan Bidang Perdagangan

9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   - Keg Penerbitan Tanda Daftar Gudang
     - Sub Keg. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Keg Pembagunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      - Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Keg Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
      - Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

11. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    - Keg Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
      - Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

12. Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen
    - Keg Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan
      - Sub Keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

- Keg Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - Sub Keg. P elaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Urusan Bidang Perindustrian

14. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
    - Keg Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
      - Sub Keg. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
      - Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
      - Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

➢ Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Sekretaris

Program (Outcome) :

1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

Kegiatan (output)

1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
2. Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu
3. Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar
4. Persentase Pegawai PD yang dilayani
5. Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar
6. Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi
7. Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia
8. Persentase barang milik daerah yang terpelihara

Bidang Koperasi dan UMKM

Program (Outcome) :

1. Presentase koperasi yang difasilitasi untuk diberdayakan

Kegiatan (output)

2. Jumlah Koperasi yang diberdayakan

Program (Outcome) :

1. Persentase Koperasi simpan pinjam yang difalitasi izin usahanya

Kegiatan (output)

1. Jumlah KSP yang mengurus perizinan

Program (Outcome) :

1. Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi

Kegiatan (output)

1. Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang dilatih

Program (Outcome) :

1. Persentase koperasi dalam pemeriksaan dan pengawasan

Kegiatan (output)

1. Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi

Program (Outcome) :

1. Persentase koperasi dengan kategori sehat

Kegiatan (output)

1. Jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya.

Program (Outcome) :

1. Persentase Persentase UMKM yang terfasilitasi pengembangan usahanya

Kegiatan (output)

1. Peresentase usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil.

Program (Outcome) :

1. Persentase Persentase UMKM yang diberdayakan

Kegiatan (output)

1. Persentase Usaha Mikro yang didata, kemitraan,

kemudahan, perizinan dan penguatan kelembagaan

Bidang Perdagangan

Program (Outcome) :

1. Persentase Persentase Perusahaan yang memiliki Izin.

Kegiatan (output)

1. Jumlah perusahanan yang telah memiliki izin

Program (Outcome) :

1. Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok

Kegiatan (output)

1. Jumlah wilayah dengan harga yang terkendali.

Program (Outcome) :

1. Persentase Persentase UTTP yang di tera

Kegiatan (output)

1. Jumlah pasar tertib ukur

Bidang Perindustrian Program (Outcome) :

1. Persentase kelompok industri yang terfasilitasi

Kegiatan (output)

1. Jumlah kelompok industri yang terfasilitasi.

Program (Outcome) :

1. Persentase produk unggulan yang dipasarkan

Kegiatan (output)

1. Jenis produk unggulan yang dipasarkan.

- **Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran program dan kegiatan yang menjadi fokus terdiri dari:

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Akuntabel dan Berkinerja Baik.

b. Meningkatnya industri kecil dan menengah dan pelayanan sektor perindustrian

c. Meningkatnya Pelayanan dan kualitas Sistem Perdagangan

d. Berkembangnya volume usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus mampu merumuskan nilai yang akan dianut bersama dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah organisasi yang akan dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang tentunya akan berkaitan erat dengan mutu pelayanan, oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi dalam mencapai tujuan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program program untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah ditentukan. Strategi yang sudah ditentukan selanjutnya diuraikan dalam berbagai arah kebijakan, yang masing-masing arah kebijakan akan diuraikan menjadi sebuah program-program.

Strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026.

Strategi dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran, tidak terlepas dari pengaruh Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah mencakup analisis dalam lingkungan organisasi yang terdiri dari Sumber daya manusia, kapabilitas, sarana prasaranan, maupun kompetensi

yang dimiliki organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sector

Koperasi dan UMKM, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, maka perlu dilakukan analisa lingkungan internal, berdasarkan analisa terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan antara lain :

1. Kekuatan Internal

   Kekuatan dari dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

   a. Tersedianya jumlah dan kualitas pegawai yang cukup
   b. Adanya kelembagaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
   c. Adanya dokumen, Renstra, Renja, RKA, DPA sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Tana Toraja.
   d. Adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah
   e. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam usaha Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian cukup tinggi.

2. Kelemahan

   Kelemahan dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabuapten Tana Toraja yang dapat diidentifikasi adalah :

   a. Terbatasnya Anggaran yang tersedia
   b. Sarana dan prasarana yang belum memadai
   c. Letak geografis yang kurang menguntungkan
   d. Tingkat partisipasi dan produktifitas Koperasi dan UMKM, dan Industri yang masih rendah.

B. Lingkungan Eksternal

Analisa terhadap lingkungan eksternal Dinas Koperasi,

UKM, Perdagangan dan Perindustrian dilakukan untuk mengidentifikasi factor dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang telah ditetapkan, adapun peluang dan tantangan eksternal sebagai berikut :

1. Peluang

Peluang bagi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
b. Tersedianya peluang usaha dan investasi
c. Adanya dukungan peraturan perundang undangan yang berlaku
d. Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

2. Tantangan

Tantangan bagi dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai tujuan dan Sasaran adalah:

a. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi dan era digitalisasi teknologi.
b. Daya saing dari produk UMKM dan IKM yang masih rendah
c. Sulitnya membuka lapangan usaha baru dan Wira usaha pemula
d. Seringnya terjadi perubahan produk hukum nasional
e. Semakin banyaknya penyedia jasa keuangan
f. Rendahnya kualitas SDM koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2024 yang memuat indikator kinerja setiap program dan kegiatan, serta rincian alokasi pendanaan untuk setiap kegiatan, sesuai target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Periode 2021 - 2026, disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			RENCANA T.A 2025	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	17	18
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	17					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
2	17	01				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	*96%*	*2.990.000.000*	*APBD*	*97%*	*3.100.000.000*
2	17	01	2.01			**1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Tana Toraja	*96%*	*600.000*	APBD	*97%*	*700.000*
2	17	01	2.01	06		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tana Toraja	3	600.000	APBD	3	700.000
2	17	01	2.02			**2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Kab. Tana Toraja	*100%*	*2.600.000.000*	APBD	*100%*	*2.700.000.000*
2	17	01	2.02	01		- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Kab. Tana Toraja	28	2.600.000.000	APBD	29	2.700.000.000
2	17	01	2.05			**3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penunjang Kepegawaian perangkat daerah yang dilayani	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	*95%*	*36.000.000*	APBD	*95%*	*37.000.000*
2	17	01	2.05	02		- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelenngkapanya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atributnya	Kab. Tana Toraja	29	36.000.000	APBD	30	37.000.000
2	17	01	2.05	09		- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tusi	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja		-	APBD		-
2	17	01	2.06			**4). Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penunjang Adminsitrasi Umum perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	*95%*	*205.800.000*	APBD	*95%*	*207.700.000*
2	17	01	2.06	03		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan RT PD yang disediakan	Kab. Tana Toraja	11	6.500.000	APBD	13	7.000.000
2	17	01	2.06	05		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disedikan dan digandakan	Kab. Tana Toraja	6	8.700.000	APBD	6	9.000.000
2	17	01	2.06	06		- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis bahan bacaan dan perundangan disediakan	Kab. Tana Toraja	2	3.600.000	APBD	2	3.700.000
2	17	01	2.06	09		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	200	187.000.000	APBD	230	188.000.000
2	17	01	2.07			**5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Tana Toraja	*95%*	-	APBD	*95%*	-
2	17	01	2.07	11		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Tana Toraja		-	APBD		-
2	17	01	2.08			**6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang yang tersedia	Kab. Tana Toraja	*96%*	*71.600.000*	APBD	*97%*	*73.700.000*
2	17	01	2.08	01		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Kab. Tana Toraja	45	31.500.000	APBD	50	33.000.000
2	17	01	2.08	02		- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Kab. Tana Toraja	1	36.500.000	APBD	1	37.000.000
2	17	01	2.08	04		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Tana Toraja	5	3.600.000	APBD	5	3.700.000
2	17	01	2.09			**7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD-PD yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	*96%*	*76.000.000*	APBD	*97%*	*80.900.000*
2	17	01	2.09	01		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Tana Toraja	2	27.000.000	APBD	2	28.400.000
2	17	01	2.09	02		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Tana Toraja	9	16.000.000	APBD	9	17.000.000
2	17	01	2.09	05		- Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	20	7.000.000	APBD	22	7.500.000
2	17	01	2.09	06		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	3	26.000.000	APBD	3	28.000.000

2	17	02				**2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi izin usahanya	Kab. Tana Toraja	0,90%	Rp	35.000.000	APBD	0,90%	Rp	40.000.000
2	17	02	2.01			**1). Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah KSP yang mengurus perizinan	Kab. Tana Toraja	1	Rp	35.000.000	APBD	1	Rp	40.000.000
2	17	02	2.01	01		- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP yang baru	Kab. Tana Toraja	1		35.000.000	APBD	1		40.000.000
2	17	03				**3.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi dalam pemeriksaan dan pengawasan	Kab. Tana Toraja	6,90%	Rp	75.000.000	APBD	5,75%	Rp	80.000.000
2	17	03	2.01			**1). Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Tana Toraja	12	Rp	75.000.000	APBD	10	Rp	80.000.000
2	17	03	2.01	01		- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang kuat sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel	Kab. Tana Toraja	20	Rp	60.000.000	APBD	20	Rp	60.000.000
2	17	03	2.01	02		- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Tana Toraja	35	Rp	15.000.000	APBD	37	Rp	20.000.000
2	17	04				**4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi dengan kategori sehat	Kab. Tana Toraja	15,43%	Rp	30.000.000	APBD dan DAK	17,14%	Rp	30.000.000
2	17	04	2.01			**1). Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	Kab. Tana Toraja	4	Rp	30.000.000	APBD dan DAK	6	Rp	30.000.000
2	17	04	2.01	01		- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	Kab. Tana Toraja	20	Rp	10.000.000	APBD dan DAK	22	Rp	15.000.000
2	17	04	2.01	02		- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP sehat yang mendapat penghargaan	Kab. Tana Toraja	3	Rp	20.000.000	APBD dan DAK	5	Rp	15.000.000
2	17	05				**5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentasi Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	Kab. Tana Toraja	15%	Rp	145.000.000	APBD	15%	Rp	155.000.000
2	17	05	2.01			**1). Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengurus dan pengelola koperasi yang memiliki kompetensi dan profesional	Kab. Tana Toraja	90	Rp	145.000.000	APBD	95	Rp	155.000.000
2	17	05	2.01	01		- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang dilatih	Kab. Tana Toraja	90	Rp	145.000.000	APBD	95	Rp	155.000.000
2	17	06				**6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang difasilitasi untuk diberdayakan	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	15,52%	Rp	80.000.000	APBD	17,24%	Rp	80.000.000
2	17	06	2.01			**1). Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah**	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	27	Rp	80.000.000	APBD	30	Rp	80.000.000
2	17	06	2.01	01		- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat produktivitasnye, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan managemen dan restrukturisasi usaha	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	27	Rp	80.000.000	APBD	30	Rp	80.000.000
2	17	07				**7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	Kab. Tana Toraja	2,90%	Rp	100.000.000	APBD	3,86%	Rp	115.000.000
2	17	07	2.01			**1). Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**	Persentase Usaha Mikro yang didata, kemitraan, kemudahan, perizinan dan penguatan kelembagaan	Kab. Tana Toraja	2,90%	Rp	100.000.000	APBD	3,86%	Rp	115.000.000
2	17	07	2.01	01		- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Kab. Tana Toraja	230	Rp	20.000.000	APBD	240	Rp	25.000.000
2	17	07	2.01	02		- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	Kab. Tana Toraja	550	Rp	20.000.000	APBD	600	Rp	20.000.000
2	17	07	2.01	03		- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang mendapat izin usaha	Kab. Tana Toraja	650	Rp	20.000.000	APBD	700	Rp	20.000.000
2	17	07	2.01	04		- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang berpotensi untuk dikembangkan	Kab. Tana Toraja	80	Rp	20.000.000	APBD	90	Rp	25.000.000
2	17	07	2.01	05		- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang berkoordinasi dengan pemangku kepentigan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kab. Tana Toraja	5%	Rp	20.000.000	APBD	6%	Rp	25.000.000
2	17	08				**8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase UMKM yang terfasilitasi pengembangan usahanya	Kab. Tana Toraja	1,93%	Rp	95.000.000	APBD dan DAK	2,17%	Rp	100.000.000
2	17	08	2.01			**1).Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi**	Peresentase usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Kab. Tana Toraja	1,20%	Rp	95.000.000	APBD dan DAK	1,30%	Rp	100.000.000
2	17	08	2.01	01		- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase produk usaha mikro yang berkembang dalam pengolahan produksi pemasaran, SDM,modal usaha dan disain teknologi	Kab. Tana Toraja	3%	Rp	95.000.000	APBD dan DAK	3%	Rp	100.000.000
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	30					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										
3	30	02				**1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase Perusahaan yang memiliki Izin	Kab. Tana Toraja	32,86	Rp	125.000.000	APBD	34,83	Rp	150.000.000
3	30	02	2.02			**1). Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Jumlah yang memiliki izin	Kab. Tana Toraja	861	Rp	125.000.000	APBD	923	Rp	150.000.000
3	30	02	2.02	01		- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pengurusan ijin	Kab. Tana Toraja	56		125.000.000	APBD	62		150.000.000

3	30	03				**2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Laju pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tana Toraja	2,31	Rp	70.000.000	APBD dan DAK	2,87	Rp	70.000.000
3	30	03	2.01			**1). Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kab. Tana Toraja	975	Rp	55.000.000	APBD dan DAK	1003	Rp	70.000.000
3	30	03	2.01	01		- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terbangun	Kab. Tana Toraja	21	Rp	55.000.000	APBD dan DAK	22	Rp	70.000.000
3	30	03	2.02			**2). Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	Cakupan bina kelompok pedagang	Kab. Tana Toraja	9,95	Rp	15.000.000	APBD	11,25	Rp	-
3	30	03	2.02	01		- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dibina	Kab. Tana Toraja	555	Rp	15.000.000	APBD	630	Rp	-
3	30	04				**3. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	Kab. Tana Toraja	78,95	Rp	400.000.000	APBD	84,21	Rp	450.000.000
3	30	04	2.02			**1). Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah wilayah dengan harga yang terkendali	Kab. Tana Toraja	15	Rp	400.000.000	APBD	16	Rp	450.000.000
3	30	04	2.02	01		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	Kab. Tana Toraja	292	Rp	400.000.000	APBD	296	Rp	450.000.000
3	30	06				**4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase UTTP yang ditera	Kab. Tana Toraja	21,75	Rp	30.000.000	APBD	25	Rp	35.000.000
3	30	06	2.01			**1). Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera**	Jumlah pasar tertib ukur	Kab. Tana Toraja	8	Rp	30.000.000	APBD	8	Rp	35.000.000
3	30	06	2.01	02		- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang di tera	Kab. Tana Toraja	284	Rp	30.000.000	APBD	329	Rp	35.000.000
3	30	07				**5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	55,56	Rp	40.000.000	APBD	55,56	Rp	45.000.000
3	30	07	2.01			**1). Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jenis produk unggulan yang dipasarkan	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	5	Rp	40.000.000	APBD	5	Rp	45.000.000
3	30	07	2.01	01		- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk yang dipromosikan	Kab. Tana Toraja, Luar Kab. Tana Toraja	9	Rp	40.000.000	APBD	9	Rp	45.000.000
3	31					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3	31	02				**1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase kelompok industri yang terfasilitasi	Kab. Tana Toraja	35,29	Rp	1.450.000.000	APBD dan DAK	41,18	Rp	1.450.000.000
3	31	02	2.01			**1). Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah kelompok industri yang terfasilitasi	Kab. Tana Toraja	6	Rp	1.450.000.000	APBD dan DAK	8	Rp	1.450.000.000
3	31	02	2.01	01		- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah rencana pembangunan industri	Kab. Tana Toraja	1	Rp	50.000.000	APBD	1	Rp	50.000.000
3	31	02	2.01	04		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sentra binaan industri kecil dan menengah	Kab. Tana Toraja	19	Rp	575.000.000	APBD dan DAK	20	Rp	575.000.000
3	31	02	2.01	05		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pengrajin yang dibina	Kab. Tana Toraja	137	Rp	825.000.000	APBD dan DAK	145	Rp	825.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.

RENJA Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

RENJA Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Sekian dan terima kasih

Tana Toraja, Agustus 2023
Kepala Dinas ,

EDWAD SAKKA ALLORERUNG, SE
PEMBINA TK.1 IV/b
NIP. 19801201 200312 1 00

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA



RENCANA KERJA
(R E N J A)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undngan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024, sebagai konsinstensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh upaya yang sudah kita lakukan dan tetap melimpahkan karuania-Nya kepada kita Semua ini.

Makale, Juni 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANA TORAJA

NIRUS NIKOLAS S.P., S.Sos., M.Si
NIP. 196908281995031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENJA OPD 4
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD 4
BAB II 6
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 20
2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 22
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 22
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 24
BAB III 25
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 25
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 26
3.1.1 TUJUAN 27
3.1.2 INDIKATOR SASARAN 27
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 28
BAB IV 30
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30
BAB V 41
PENUTUP 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu penyusunan Renja DLH dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DLH, evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DLH.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2021- 2026;

22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENJA OPD

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan DLH tahun 2024
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup.
5. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja selama 1 (satu) tahun ini dengan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Sistematika Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DLH, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang;

Memuat tentang Renja DLH, proses Penyusunan Renja DLH, keterkaitan antara Renja DLH dengan Dokumen RKPD dan Renstra DLH.

1.2. Landasan Hukum;

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja DLH Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DLH.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja OPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DLH, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja DLH Tahun lalu (tahun n– 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahu n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLH

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang Menyangkut Arah dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi DLH

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DLH Menjelaskan Mengenai Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH;

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2024. Pada tahun 2023 DLH Kabupaten Tana Toraja melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp.6.525.523,00 (Enam milyar lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.6.189.581.305,00 (Enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tuga ratus lima rupiah) atau sebesar 94,85%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program DLH Tahun 2023 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja DLH Kabupaten Tana Toraja. Indikator Kinerjanya adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal DLH dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.916.553.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.634.827.765,00 (92,81%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

   A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

         Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah ASN DLH yang

dibayarkan gaji dan tunjangannya dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.473.523.000,- terserap sebesar Rp.3.193.123.265,- atau sebesar 91,93 %.

B. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 2.606.000,- terserap sebesar Rp.2.606.000,- atau sebesar 100%.

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.892.000,- terserap sebesar Rp. 3.892.000,- atau sebesar 100 %.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DLH yang terselenggara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 261.100.000- terserap sebesar Rp.261.095.100,- atau sebesar 100 %.

C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Mebel yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terserap sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.52.000.000,- terserap sebesar Rp. 51.746.500,- atau sebesar 99,51 %.

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa surat menyurat

dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.20.572.000- terserap sebesar Rp. 20.572.000,- atau sebesar 100%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- terserap sebesar Rp. 805.000,- atau sebesar 59,63%

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- terserap sebesar Rp. 600.000,- atau sebesar 100%.

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terserap sebesar Rp. 29.987.000,- atau sebesar 99,96%

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terserap sebesar Rp. 9.982.900,- atau sebesar 99,81%

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 9.110.000,- terserap sebesar Rp. 8.905.000,- atau sebesar 97,75%

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah gedung kantor dan

bangunan lainnya yang terpelihara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 41.800.000,- terserap sebesar Rp.41.513.000,- atau sebesar 99,31%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan dengan target program sebesar 50% dengan realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi kinerja program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabuopaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.250.000.000,- (100%).

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan indikator Indeks Kualitas lingkungan Hidup program sebesar 72,03 dengan realisasi fisik sebesar 70,38 dan realisasi kinerja program sebesar 98,26%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/auat Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) Kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.198.740,- (94,92%).

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

   Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan Indikator Kinerja Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi kinerja program sebesar 20%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan ini sebesar Rp. 95.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 91.600.000,- (95,92%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan pada 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hiijau (RTH)

Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator luas RTH yang dikelola dengan target 10 Ha dan capaian indikator kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.600.000,- (93,55%)

b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator Luas Taman Hutan Raya yang ditata dengan target 4600 Ha dan capaian indikator kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.00.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (100%)

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan Indikator Kinerja cakupan lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target program sebesar 28,57% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi kinerja program sebesar 28,57%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.042.000,- (100%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target 2 kelompok dan capaian indikator kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.800.000,- (100%)

b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan

Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan dan capaian indikator kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.242.000,- (97,54%)

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan indikator

cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi kinerja program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) Kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.7.175.000,- (71,75%).

7. Program Pengelolaan Persampahan

   Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R dengan target program sebesar 16,80% dengan realisasi fisik sebesar 33,78% dan realisasi kinerja program sebesar 5%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah dan 2 (dua) sub kegiatan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan ini sebesar Rp.2.208.050.000,- terealisasi sebesar Rp.2.161.737.800,- (97,90%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

      Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator jumlah sampah yang dikumpulkan, diangkut, diolah di TPA/TPST/SPA dengan target 12.000 ton dan capaian indikator kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.152.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.105.837.800,- (97,85%)

   b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

      Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator jumlah sampah yang tertangani dengan target 16,80% dan capaian indikator kinerja 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.900.000,- (99,73%)

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Dinas Lingkungan Hidup telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100 % dapat dikatakan dalam kategori berhasil. Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN TANA TORAJA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	*6*	*7*	*8*	*9*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**95%**	**100%**	**100%**	**3.916.643.000**	**100%**	**3.634.917.765**	**100,00 %**	**92,81%**	**100%**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tepat Waktu**	**95%**	**100%**	**100%**	**3.473.523.000**	**100%**	**3.193.123.265**	**147,37 %**	**91,93%**	**100%**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup	19 ASN	100%	19	3.473.523.000	28	3.193.123.265	147,37 %	91,93%	100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup berjalan sesuai standar**	**95%**	**100%**	**100%**	**267.688.000**	**100%**	**267.683.100**	**100,00 %**	**100,00%**	**100%**		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	100%	20	2.606.000	20	2.606.000	100,00 %	100,00%	100%		
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	1	100%	1	3.982.000	1	3.982.000	100,00 %	100,00%	100%		

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Lingkungan Hidup yang terselenggara	100	100%	100	261.100.000	100	261.095.100	100,00 %	100,00%	100%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang yang terpenuhi**	**95%**	**100%**	**95%**	**62.000.000**	**100%**	**61.746.500**	**100,00 %**	**99,59%**	**100%**		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1	100%	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00 %	100,00%	100%		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1	100%	3	52.000.000	3	51.746.500	100,00 %	99,51%	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**95%**	**100%**	**100%**	**22.522.000**	**100%**	**21.977.000**	**100,00 %**	**97,58%**	**100%**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	49	100%	49	20.572.000	49	20.572.000	100,00 %	100,00%	100%		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	2	100%	2	1.350.000	2	805.000	100,00 %	59,63%	100%		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	100%	1	600.000	1	600.000	100,00 %	100,00%	100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**95%**	**100%**	**100%**	**90.910.000**	**100%**	**90.387.900**	**100,00 %**	**99,43%**	**100%**		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	100%	1	30.000.000	1	29.987.000	100,00 %	99,96%	1		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	9	100%	9	10.000.000	9	9.982.900	100,00 %	99,83%	9		

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5	100%	1	9.110.000	1	8.905.000	100,00 %	97,75%	5		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	100%	1	41.800.000	1	41.513.000	100,00 %	99,31%	1		
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**100%**	**100%**	**100%**	**250.000.000**	**2**	**250.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**	**100%**		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**100%**	**100%**	**100%**	**250.000.000**	**2**	**250.000.000**	**100,00 %**	**100,00%**	**100%**		
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1	100%	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00 %	100,00%	100%		
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Udara dan tanah	**73,04**	**100%**	**73,04**	**18.120.000**	**70,78**	**17.198.740**	**98,26%**	**94,92%**	**100%**		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**	**73,04**	**100%**	**72,03**	**18.120.000**	**70,78**	**17.198.740**	**98,26%**	**94,92%**	**100%**		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	73,04	100%	72,03	18.120.000	70,78	17.198.740	98,26%	94,92%	100%		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)**	**100%**	**100%**	**100%**	**95.500.000**	**100%**	**91.600.000**	**100,00 %**	**95,92%**	**100%**		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	100%	100%	100%	95.500.000	100%	91.600.000	100,00 %	95,92%	100%		
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpenuhinya RTH Publik	100%	100%	100%	60.500.000	100%	56.600.000	100,00 %	93,55%	100%		

2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Lainnya	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	100%	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100,00 %	100,00%	100%		
5	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**28,57%**	**100%**			3				**100%**		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	**28,57%**	**100%**	**3**	**27.300.000**	**3**	**27.042.000**	**100,00 %**	**99,05%**	**100%**		
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	100%	2	16.800.000	2	16.800.000	100,00 %	100,00%	100%		
2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1	100%	1	10.500.000	1	10.242.000	100,00 %	97,54%	100%		
6	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	**1000%**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**7.175.000**	**100,00 %**	**71,75%**	**1000%**		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**7.175.000**	**100,00 %**	**71,75%**	**100%**		
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	10.000.000	100%	7.175.000	100,00 %	71,75%	100%		

7	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R**	**15,30%**	**15,30%**	**14,80%**	**2.208.050.000**	**5,00%**	**2.161.737.800**	**33,78%**	**97,90%**	**17,64%**		
	Pengelolaan Sampah	**Persentase Jumlah Sampah yang tertangani**	**15,30%**	**20,90%**	**14,80%**	**2.208.050.000**	**5,00%**	**2.161.737.800**	**33,78%**	**97,90%**	**17,64%**		
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang tertangani	12000 ton	20,90%	12000	2.152.000.000	13.880	2.105.837.800	115,67 %	97,85%	100%		
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang tertangani	20,90%	100%	16,80%	56.050.000	16,80%	55.900.000	99,73%	99,73%	100%		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DLH Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan DLH meliputi :

1. Penerbitan Izin Lingkungan ;
2. Pengawasan lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan;
3. Pengelolaan Sampah dan limbah
4. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
7. Penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Upaya DLH dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Tersedianya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup;
2) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
3) Meningkatnya persentase pengelolaan keanekaragaman hayati;
4) Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
5) Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
6) Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
7) Meningkatnya persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan DLH meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

DLH Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Urusan Lingkungan Hidup sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja DLH Kabupaten Tana Toraja terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN OPD DLH KABUPATEN TANA TORAJA

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian 2023	Proyeksi 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	100	100	100	100	100	50	100
2	Indeks kualitas air	Nilai	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	58,89	53,10
3	Indeks kualitas udara	Nilai	86,87	86,97	87,07	87,17	87,27	87,37	90,40	87,37
4	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	25	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	20,00	70,00
5	Cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi	%	17,86	18,00	20,14	21,86	22,00	25,71	33,33	25,71
6	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	%	25,81	26,00	28,00	29,00	30,00	32,00	21,74	32,00
7	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	%	0	4,70	9,52	14,28	19,04	23,86	0,00	23,86
8	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	%	14,28	28,57	42,85	57,14	71,42	100,00	71,42	100,00

9	Jumlah penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup	Orang/ Lembaga	0	1	1	1	1	1	0	5
10	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	%	10,38	12,32	14,80	15,30	17,64	20,00	5,00	20,00

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Masih rendahnya persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati
2. Masih rendahnya hasil pengukuran Indeks Kualitas Air
3. Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
4. Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang tertangani
5. Masih rendahnya persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dituangkan dalam ***"Toraya Mala'bi'"*** yang merupakan titian menuju ***Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru*.**

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN TANA TORAJA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tana Toraja	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3.772.367.000,-	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,04	1.600.000.000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,04	47.740.000,-	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Tana Toraja	Persentase tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	60.000.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Tana Toraja	Persentase tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	142.525.000,-	
4	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan LH yang ditindaklanjuti	100%	30.000.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan LH yang ditindaklanjuti	100%	12.000.000,-	
5	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Tana Toraja	Persentase Jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	15,30%	15,30 %	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Tana Toraja	Persentase Jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	15,30%	2.420.664.000,-	
										6.395.296.000,-	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja di kecamatan.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah dari masyarakat yaitu :

1. Pengadaan Bibit Pohon
2. Sosialisasi Program Kampung Iklim
3. Fasilitasi Sekolah Adiwiyata
4. Program Kali Bersih
5. Pelatihan Paendauran Ulang Sampah
6. Pengadaan Kontainer Sampah
7. Pengadaan Bank Sampah
8. Pengadaan Mesin Pencacah Organik
9. Pengadaan Motor Roda Tiga
10. Pengadaan Arm Roll Truck

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah :

- RPJMN

  Penyusunan Renja DLH mengacu pada Renstra DLH dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

- Rencana Kerja Pemerintah

  Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

  Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta kebijakan pembangunan Tahun 2024.

  Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

  Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun

2024 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada dalam Penggalan ke empat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2024 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah : **"Peningkatan Produktivitas melalui Pembangunan yang Merata guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh"**. Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi;
2. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan;
4. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat;
5. Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
6. Menguatkan interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleraan dan saling menghormati.

3.1.1 TUJUAN

Tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkuaitas**,** dimaknai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja dengan terpeliharanya kualitas Lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim.

3.1.2 INDIKATOR SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpaduserta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Persentase Tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja mempunyai 5 rumusan program. Berikut adalah rangkaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada DLH Kabupaten Tana Toraja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilakukan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Koat
   - Pengelolaan Ruang Ternuka Hijau
   - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman

d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

e. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah
   - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
   - Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah DLH Kabupaten Tana Toraja secara detail kami sajikan pada Tabel 4.1.

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

No.	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	2	11													
	2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Tana Toraja	95%	3.545.019.000	APBD		95%	3.131.423.500
	5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Tana Toraja	1	11.500.000	APBD		1	11.790.000
	5	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	1 dokumen	11.500.000	APBD		1 dokumen	11.790.000

	2	**11**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tepat Waktu**	**Kab. Tana Toraja**	**100%**	**1.886.000.000**	**APBD**		**100%**	**1.933.560.000**
	2	11	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	47	1.886.000.000	APBD		47	1.933.560.000
	2	**11**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Dinas Lingkungan Hidup yang dilayani**	**Kab. Tana Toraja**	**95%**	**92.000.000**	**APBD**		**95%**	**94.320.000**
	5	01	01	2.05	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup yang berdisiplin baik	Kab. Tana Toraja	47	9.200.000	APBD		47	9.432.000
	5	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kab. Tana Toraja	47	23.000.000	APBD		26	23.580.000
	2	11	02	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan Tupoksi	Kab. Tana Toraja	47	59.800.000	APBD		47	61.308.000
	2	**11**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup berjalan sesuai standar**	**Kab. Tana Toraja**	**100%**	**149.500.000**	**APBD**		**100%**	**153.270.000**
	5	01	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen Listrik	Kab. Tana Toraja	10	5.232.500	APBD		10	5.364.450
	5	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tana Toraja	10	5.232.500	APBD		10	5.364.450
	5	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tana Toraja	20	5.232.500	APBD		20	5.364.450
	5	01	01	2.06	04		Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah barang logistik yang disediakan	Kab. Tana Toraja	1	5.232.500	APBD		1	5.364.450

	5	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Kab. Tana Toraja	1	5.232.500	APBD		1	5.364.450
	2	11	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	Kab. Tana Toraja	1	5.232.500	APBD		1	5.364.450
	2	11	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Tana Toraja	1	5.232.500	APBD		1	5.364.450
	2	11	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Lingkungan Hidup yang terselenggara	Kab. Tana Toraja	100	107.640.000	APBD		100	110.354.400
	2	11	01	2.06	11		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	Kab. Tana Toraja	1	5.232.500	APBD		1	5.364.450
	2	**11**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang yang terpenuhi**	**Kab. Tana Toraja**		**817.944.000**				**348.944.000**
	5	01	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Kab. Tana Toraja	1	8.972.000	APBD		1	9.672.000
	5	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kab. Tana Toraja	1	500.000.000	APBD		1	25.000.000
	5	01	01	2.07	04		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat yang diadakan	Kab. Tana Toraja	5	300.000.000	APBD/DAK		5	300.000.000
	5	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Tana Toraja	1	8.972.000	APBD		1	9.672.000
	2	11	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Tana Toraja	1	4.486.000	APBD		1	4.600.000
	2	11	01	2.07	07		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Kab. Tana Toraja	1	4.486.000	APBD		1	4.600.000

	2	**11**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Kab. Tana Toraja**	**95%**	**46.000.000**	**APBD**		**95%**	**47.160.000**
	2	11	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Kab. Tana Toraja	49	16.100.000	APBD		49	16.506.000
	2	11	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Kab. Tana Toraja	2	16.100.000	APBD		2	16.506.000
	2	11	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tana Toraja	1	6.900.000	APBD		1	7.074.000
	5	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Tana Toraja	1	6.900.000	APBD		1	7.074.000
	2	**11**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Kab. Tana Toraja**	**95%**	**542.075.000**	**APBD**		**95%**	**542.379.500**
	5	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Tana Toraja	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
	2	11	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Tana Toraja	22	500.000.000	APBD		22	500.000.000
	5	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	1	4.025.000	APBD		1	4.126.500
	2	11	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	5	4.025.000	APBD		1	4.126.500
	2	11	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	1	4.025.000	APBD		1	4.126.500

	2	11	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	1	4.025.000	APBD		1	4.126.500
	2	11	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	Kab. Tana Toraja	1	4.025.000	APBD		1	4.126.500
	2	**11**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Kab. Tana Toraja**	**100%**	**82.500.000**				**82.500.000**
	2	**11**	**02**				**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Kab. Tana Toraja**	**100%**	**82.500.000**	**APBD**		**100%**	**82.500.000**
	2	11	02				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Tana Toraja	100%	66.000.000	APBD		100%	66.000.000
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Tana Toraja	100%	16.500.000	APBD		100%	16.500.000
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Kab. Tana Toraja**	**100%**	**165.000.000**		APBD	100%	**165.000.000**
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Tana Toraja	100%	82.500.000		APBD	100%	82.500.000
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Tana Toraja	100%	49.500.000		APBD	100%	49.500.000
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Tana Toraja	100%	33.000.000		APBD	100%	33.000.000

	2	11	03				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Udara dan tanah	Kab. Tana Toraja		473.300.000				400.100.000
	2	**11**	**03**	**2.01**			**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**	**Kab. Tana Toraja**	**72,03%**	**373.300.000**			**73.04%**	**400.100.000**
	2	11	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Kab. Tana Toraja	73.04%	93.300.000		APBD/DAK	75.03%	106.700.000
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	73.04%	93.300.000		APBD/DAK	75.03%	106.700.000
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	73.04%	186.700.000		APBD/DAK	75.03%	186.700.000
	2	**11**	**03**	**2.02**			**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Data Indeks Kualitas Air**	**Kab. Tana Toraja**		**100.000.000**				
	2	11	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	73.04%	980.000.000		APBD/DAK	75.03%	124.500.000
	2	11	03	2.02			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	73.04%	420.000.000		APBD/DAK	75.03%	53.300.000
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Indeks kualitas Lingkungan Hidup**	**Kab. Tana Toraja**	**73.04%**	**140.000.000**		**APBD**	75.03%	**17.700.000**
							Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	73.04%	140.000.000		APBD	77.00%	17.700.000

	2	11	04				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)**	**Kab. Tana Toraja**		**64.000.000**				**69.000.000**
	2	11	04	**2.01**			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terpenuhinya RTH Publik	Kab. Tana Toraja		64.000.000				69.000.000
	2	11	04	**2.01**			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	Kab. Tana Toraja	100%	3.000.000		APBD	100%	3.750.000
	2	11	04	**2.01**	04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpenuhinya RTH Publik	Kab. Tana Toraja	100%	40.000.000		APBD	100%	48.000.000
					05		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati Lainnya		100%	12.000.000		APBD	100%	12.000.000
					07		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman HayatiLainnya	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	Kab. Tana Toraja	100%	9.000.000		APBD	100%	9.000.000
	2	11	05				**PROGRAM Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) yang tertangani**	**Kab. Tana Toraja**	**63,11%**	**34.000.000**			**79.51%**	**34.000.000**
							Penyimpanan sementara Limbah B3	**Cakupan Limbah B3 Fasusm/ Fasos/ Usaha yang Diawasi**	**Kab. Tana Toraja**	**63,11%**	**14.000.000**			**79.51%**	**14.000.000**
							Verivikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Cakupan Limbah B3 Fasusm/ Fasos/ Usaha yang Diawasi**	Kab. Tana Toraja	63,11%	14.000.000		APBD	79.51%	14.000.000

	2	**11**	**05**	**2.02**			**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Limbah B3 yang tertangani**	**Kab. Tana Toraja**		**20.000.000**		**APBD**		**20.000.000**
	2	11	05	**2.02**	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan , pemanfatan, pengelolaan dan / atau Penimbunan	Tertanganinya limbah B3 yang ada	Kab. Tana Toraja	63,11%	20.000.000		APBD	79.51%	20.000.000
	2	11	06				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan**	**Kab. Tana Toraja**		**40.000.000**				**40.000.000**
	2	**11**	**06**	**2.01**			**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengaduan Msyarakat Di bidang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup**	**Kab. Tana Toraja**		**40.000.000**				**40.000.000**
							Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Tana Toraja	63.11%	4.000.000	APBD		79.51%	4.000.000
	2	11	06	**2.01**	03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat di bidang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang tertangani	Kab. Tana Toraja	63,11%	40.000.000	APBD		79.51%	40.000.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	Kab. Tana Toraja	63,11%	8.000.000	APBD		79.51%	8.000.000
	2	11	07				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA**	**Kab. Tana Toraja**		**30.000.000**				**35.000.000**

	2	11	07	**2.01**			**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA**	**Kab. Tana Toraja**		**30.000.000**				**35.000.000**
	2	11	07	**2.01**	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau PengetahuanTradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	Kab. Tana Toraja		30.000.000	APBD			35.000.000
	2	11	08				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tana Toraja		10.500.000				6.000.000
	2	11	08	**2.01**			**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	**Kab. Tana Toraja**		**10.500.000**				**6.000.000**
	2	11	08	**2.01**	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tana Toraja	42,86%	6.000.000			71.43%	6.000.000
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tana Toraja	42,86%	4.500.000			71.43%	4.500.000
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tana Toraja	42,86%	450.000.000			71.43%	450.000.000

	2	**11**	**10**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**Kab. Tana Toraja**		**20.000.000**				**20.000.000**
	2	11	10	**2.01**			**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**Kab. Tana Toraja**	**63%**	**20.000.000**			**79.51%**	**20.000.000**
	2	11	10	**2.01**	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Kab. Tana Toraja	63,11%	16.000.000	APBD		79.51%	16.000.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Kab. Tana Toraja	63,11%	4.000.000	APBD		79.51%	4.000.000
	2	**11**	**11**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Jumlah Sampah yang tertangani**	**Kab. Tana Toraja**	**63,11%**	**2.060.000.000**				**2.060.000.000**
	2	11	11	**2.01**			**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Jumlah Sampah yang tertangani**	**Kab. Tana Toraja**		**2.060.000.000**				**2.060.000.000**
							Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota tentang Penanganan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Kab. Tana Toraja	20,90%	15.000.000	APBD		26.68%	15.000.000
							Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	Kab. Tana Toraja	20,90%	15.000.000	APBD		26.68%	15.000.000
					03		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Kab. Tana Toraja	20,90%	2.000.000.000	APBD		26.68%	2.000.000.000

					04		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang tertangani	Kab. Tana Toraja	16,80%	15.000.000	APBD		26.68%	15.000.000
					07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Kab. Tana Toraja	16,80%	15.000.000	APBD		26.68%	15.000.000
	2	11					**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup**	**Kab. Tana Toraja**	**63,11%**	**45.000.000**				**45.000.000**
	2	11					**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabuopaten/Kota**	**Jumlah Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup**	**Kab. Tana Toraja**		**45.000.000**				**45.000.000**
							Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Plantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Tana Toraja	1	45.000.000	APBD		1	45.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, penyusunan Renja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

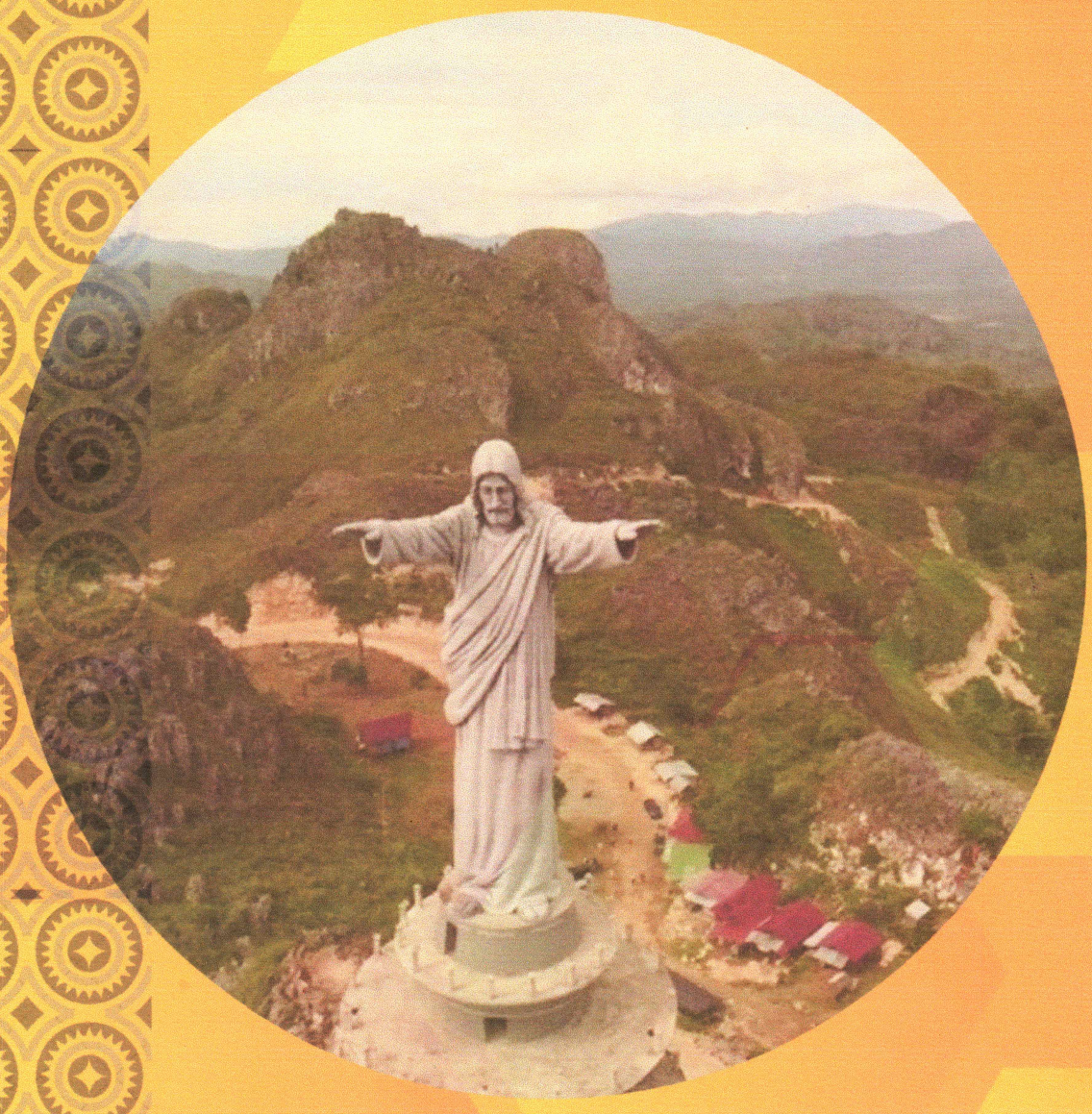
Rencana Kerja yang telah tersusun ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 serta menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Makale, Juni 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tana Toraja

NIRUS NIKOLAS S. P., S.Sos., M.Si.
NIP : 196908231995031009



RENCANA KERJA
(R E N J A)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2024

bpbdtator@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024, sebagai konsinstensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini disadari dengan sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan dapat menjadi bahan acuan sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 ini.

Makale, Agustus 2023

PLT. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TANA TORAJA,

CHRISTIAN BATARA SAKKUNG, S.P.
NIP. 19761227 200901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA OPD..... 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA OPD..... 5

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 17

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH..... 20

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 21

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... 23

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 24

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 24

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 26

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 27

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 30

BAB V : PENUTUP..... 38

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2021- 2026;
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENJA OPD

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini adalah:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Mengarahkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja selama 1 (satu) tahun ini dengan mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Sistematika Penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang;

Memuat Tentang Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Proses Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Keterkaitan Antara Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dokumen Rkpd Dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. Landasan Hukum;

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja OPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang Menyangkut Arah dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menjelaskan Mengenai Tujuan dan Sasaran Didasarkan

Atas Rumusan Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 2.157.188.371,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 2.032.415.671,- (Dua Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 94,2%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

   Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Indikator Kinerjanya adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi

anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.584.748.371,- terealisasi sebesar Rp. 1.473.849.671,- (93%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, antara lain sebagai berikut :

A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibayarkan gajinya dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.157.188.371,- terserap sebesar Rp. 1.120.505.668,- atau sebesar 96,8%.

B. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- terserap sebesar Rp. 22.000.000,- atau sebesar 100%.

   b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 7.890.000,- terserap sebesar Rp. 4.087.600,- atau sebesar 51,8%.

   c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terselenggara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 281.600.000,- terserap sebesar Rp. 228.496.340,- atau sebesar 81,1%.

C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa surat menyurat dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 25.385.000,- terserap sebesar Rp. 19.327.813,- atau sebesar 76,1%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik yang terlaksana dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- terserap sebesar Rp. 1.200.000,- atau sebesar 100%

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.645.000,- terserap sebesar Rp. 3.645.000,- atau sebesar 100%

D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 72.320.000,- terserap sebesar Rp. 71.389.250,- atau sebesar 98,7%

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran

sebesar Rp. 13.520.000,- terserap sebesar Rp. 3.198.000,- atau sebesar 23,7%

2. **Program Penanggulangan Bencana.**

Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan indikator Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan ini sebesar Rp. 572.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 558.566.000,- (97,6%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

A. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang dilaksanakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 28.750.000,- terserap sebesar Rp. 28.000.000,- atau sebesar 97,4%.

b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terorganisir dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran

sebesar Rp. 198.000.000,- terserap sebesar Rp. 198.000.000,- atau sebesar 100%.

B. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Korban bencana yang terselamatkan dan di evakuasi dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 265.540.000,- terserap sebesar Rp. 265.216.000,- atau sebesar 99,9%.

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 80.150.000,- terserap sebesar Rp. 67.350.000,- atau sebesar 84%.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN TANA TORAJA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BPBD TANA TORAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG ANGGARAN	PRESENTASE (%)
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.584.748.371**	**1.473.849.671**	**110.898.700**	**93,0%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**1.157.188.371**	**1.120.505.668**	**36.682.703**	**96,8%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**311.490.000**	**254.583.940**	**56.906.060**	**81,7%**
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	22.000.000	22.000.000	-	100,0%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.890.000	4.087.600	3.802.400	51,8%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	281.600.000	228.496.340	53.103.660	81,1%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**30.230.000**	**24.172.813**	**6.057.187**	**80,0%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.385.000	19.327.813	6.057.187	76,1%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	1.200.000	1.200.000	-	100,0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.645.000	3.645.000	-	100,0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**85.840.000**	**74.587.250**	**11.252.750**	**86,9%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.320.000	71.389.250	930.750	98,7%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.520.000	3.198.000	10.322.000	23,7%

1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**572.440.000**	**558.566.000**	**13.874.000**	**97,6%**
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	**226.750.000**	**226.000.000**	**750.000**	**99,7%**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.750.000	28.000.000	750.000	97,4%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	198.000.000	198.000.000	-	100,0%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**345.690.000**	**332.566.000**	**13.124.000**	**96,2%**
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	265.540.000	265.216.000	324.000	99,9%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.150.000	67.350.000	12.800.000	84,0%
	SURPLUS/DEFISIT	**2.157.188.371**	**2.032.415.671**	**124.772.700**	**94,2%**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan di daerah, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana di tingkat Pemerintah Kabupaten Tana Toraja maupun dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci Jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbagi ke dalam tiga fase utama penanggulangan bencana, antara lain meliputi :

1. **Pelayanan pada tahap pra-bencana**
   Fase ini berfokus pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
   - **Penyusunan kebijakan dan rencana penanggulangan bencana**: Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta rencana teknis untuk penanggulangan bencana di daerah.
   - **Mitigasi bencana**:
     Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak bencana. Contohnya, membangun infrastruktur penahan banjir atau melakukan reboisasi di wilayah rawan longsor.
   - **Peningkatan kesiapsiagaan**:
     Melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tanggap dan siap menghadapi bencana.
   - **Pengembangan sistem peringatan dini**:
     Membangun dan mengelola sistem untuk memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi bencana.
   - **Edukasi dan sosialisasi**:
     Memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di wilayahnya.
2. **Pelayanan pada tahap tanggap darurat**
   Fase ini meliputi tindakan cepat untuk menangani dampak langsung bencana.
   - **Kajian cepat dan tepat**:
     Melakukan penilaian darurat terhadap lokasi, tingkat kerusakan, kerugian, dan sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.

- **Penyelamatan dan evakuasi**:
  Menyelamatkan korban dan mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana ke tempat yang lebih aman.
- **Pemenuhan kebutuhan dasar**:
  Menyediakan bantuan logistik, seperti makanan, minuman, sandang, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi.
- **Manajemen bantuan**:
  Mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan bantuan logistik dan dana dari berbagai pihak kepada korban bencana.
- **Pelayanan kesehatan**:
  Memberikan layanan medis darurat kepada korban bencana melalui posko-posko kesehatan.

3. **Pelayanan pada tahap pasca-bencana**
   Fase ini bertujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal setelah bencana.
   - **Rehabilitasi**:
     Memulihkan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak bencana. Ini mencakup pemulihan sosial-ekonomi, psikologis, dan budaya.
   - **Rekonstruksi**:
     Membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, seperti rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
   - **Pemantauan dan evaluasi**:
     Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana untuk perbaikan di masa depan.

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
3) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

4) Meningkatnya intensitas koordinasi di tingkat Kabupaten Tana Toraja oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang transtibumlinmas;
2) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
I	**INDIKATOR SASARAN**											
1	Persentase Penyusunan dan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Implementasi rencana kelitbangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100
II	**INDIKATOR PROGRAM**											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah											
	Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani			100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3 ISU ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;

3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
4. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dituangkan dalam ***"Toraya Mala'bi'"*** yang merupakan titian menuju ***Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru.***

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja di kecamatan.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2024 adalah :

- RPJMN

  Penyusunan Renja BPBD mengacu pada Renstra BPBD dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

- Rencana Kerja Pemerintah

  Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

  Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta kebijakan pembangunan Tahun 2024.

  Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

  Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke

dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan

koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada dalam Penggalan ke empat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2024 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah : **"Peningkatan Produktivitas melalui Pembangunan yang Merata guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh"**. Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi;
2. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan;

4. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat;
5. Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
6. Menguatkan interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleraan dan saling menghormati.

3.2.1 TUJUAN

A. Terlaksananya Penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dimaknai BPBD Kabupaten Tana Toraja untuk dapat menciptakan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana yang didukung oleh anggaran yang dibutuhkan dengan Meningkatkan kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana saat terjadi bencana dan pascabencana.

3.2.2 INDIKATOR SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu dan menyeluruh	Meningkatkan pelayanan dan penanganan korban bencana	Meningkatkan kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana saat terjadi bencana dan pascabencana	100 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan BPBD Kabupaten Tana Toraja mempunyai 2 rumusan program. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan

Sub Kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada BPBD Kabupaten Tana Toraja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian
   - Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
   - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   - Koordinasi Penanganan Pascabencana
   - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pescabencana (R3P) Kab/Kota

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tana Toraja secara detail kami sajikan pada Tabel Berikut ini

Unit Organisasi: 1.05.0.00.0.00.02.00000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**													
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.000.000.000**					**3.000.000.000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		BPBD Tana Toraja		1 Tahun		2.000.000.000	APBD				3.000.000.000

1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**50.000.000**					**100.000.000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya		BPBD Tana Toraja		50 Orang		50.000.000	APBD				100.000.000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.530.000.000**					**2.050.000.000**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				BPBD Tana Toraja		20 Buah		10.000.000	APBD				20.000.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		BPBD Tana Toraja		5 Unit		500.000.000	APBD				1.000.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		BPBD Tana Toraja		12 Bulan		20.000.000	APBD				30.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD		BPBD Tana Toraja		12 Bulan		1.000.000.000	APBD				1.000.000.000
2	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1.380.000.000**					**2.250.000.000**
2	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		BPBD Tana Toraja		1 Unit		1.000.000.000	APBD				1.500.000.000

							Jabatan yang tersedia												
2	0 5	0 1	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		BPBD Tana Toraja		5 Unit		250.000.000	APBD				500.000.000
2	0 5	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang tersedia		BPBD Tana Toraja		5 Unit		30.000.000	APBD				50.000.000
2	0 5	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Pelatan Mesin lainnya yang tersedia		BPBD Tana Toraja		5 Unit		100.000.000	APBD				200.000.000
2	**0 5**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**51.500.000**					**82.000.000**
2	0 5	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		BPBD Tana Toraja		12 Bulan		30.000.000	APBD				50.000.000
2	0 5	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		BPBD Tana Toraja		12 Bulan		1.500.000	APBD				2.000.000

2	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		BPBD Tana Toraja		12 Bulan		20.000.000	APBD				30.000.000
2	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1.400.000.000**					**2.100.000.000**
2	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		BPBD Tana Toraja		2 Unit		100.000.000	APBD				150.000.000
2	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		BPBD Tana Toraja		16 Unit		1.000.000.000	APBD				1.500.000.000
2	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diPelihara		BPBD Tana Toraja		12 Bulan		100.000.000	APBD				150.000.000

2	0 5	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/Direhabilitasi		BPBD Tana Toraja		1 Unit		200.000.000	APBD				300.000.000
1	**0 5**	**0 3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**													
1	**0 5**	**0 3**	**2.0 1**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**1.000.000.000**					**1.000.000.000**
1	0 5	0 3	2.0 1	0 1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		BPBD Tana Toraja		1 Dokumen		500.000.000	APBD				500.000.000
1	0 5	0 3	2.0 1	0 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		19 Kecamatan		3 Jenis		500.000.000	APBD				500.000.000
1	**0 5**	**0 3**	**2.0 2**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**3.650.000.000**					**4.000.000.000**
1	0 5	0 3	2.0 2	0 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan		BPBD Tana Toraja		1 Dokumen		300.000.000	APBD				300.000.000

							Bencana yang Dilegalisasi												
1	0 5	0 3	2.0 2	0 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		19 Kecamatan		19 Kecamatan		1.900.000.000	APBD				2.000.000.000
1	0 5	0 3	2.0 2	0 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas		BPBD Tana Toraja		5 Unit		500.000.000	APBD				500.000.000
1	0 5	0 3	2.0 2	0 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		BPBD Tana Toraja		20 Orang/Bulan		300.000.000	APBD				500.000.000
1	0 5	0 3	2.0 2	0 9	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Bencana yang Dilegalisasi		BPBD Tana Toraja		2 Jenis		500.000.000	APBD				500.000.000

1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang terlaksana		19 Kecamatan		19 Kecamatan		2.000.000.000	APBD				3.000.000.000
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**5.500.000.000**					**5.500.000.000**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang dilegalisir		BPBD Tana Toraja		1 Dokumen		500.000.000	APBD				500.000.000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kejadian Pasca bencana yang tertangani		19 Kecamatan		19 Kecamatan		5.000.000.000	APBD				5.000.000.000
												TOTAL	**23.561.500.000**					**30.582.000.000**

Plt. Kepala Pelaksana BPBD

CHRISTIAN BATARA SAKKUNG, S.P.
NIP. 19761227 200901 1 004

BAB 5 PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja, penyusunan Renja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini, masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terimakasih dengan tersusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Makale, Agustus 2023

Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tana Toraja,

CHRISTIAN BATARA SAKKUNG, S.P.
Pangkat : Pembina
NIP : 19761227 200901 1 008

RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga Rencana Kerja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan dapat disusun dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024, sebagai konsinstensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini disadari dengan sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan dapat menjadi bahan acuan sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024.

Makale, 04 Agustus 2023

KEPALA SATUAN,

Drs. ANTHON TODING, MH

NIP. 19650814 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penyusunan Renja 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 18

2.3 Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20

2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 26

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB 5 PENUTUP 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasisfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja, evaluasi pelaksanaan Renja

Bappelitbangda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan. Selanjutnya Renja Satpol.PP, Damkar dan PenyelamatanKabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol.PP, Damkar dan PenyelamatanKabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024 didasarkan pada peraturan-peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 3 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2021- 2026;
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENJA OPD

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan

arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan tahun 2024;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses penyusunan renja, Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Hukum;

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja OPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL.PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun lalu (tahun n–2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1)

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan tahun lalu dan capaian renstra;

2.2. Analisis kinerja pelayanan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan;

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan;

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD;

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol.PP , Damkar dan Penyelamatan;

3.2. Tujuan dan sasaran renja menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi satpol.pp, damkar dan penyelamatan;

3.3. Program dan kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan serta menentuakan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan dan merinci kebutuhan dan alokasi pendanaan untuk setiap kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana Pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian renstra Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Perubahan Tahun 2022 sejumlah Rp. 6.392.305.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 6.005.221.007 (Enam Milyar Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujug Rupiah) atau sebesar 94%. Pelaksanaan Program Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Indikator Kinerjanya adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan Realisasi kinerja program sebesar 95,49 %. Program ini terdiri 5 (lima) Kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.040.507.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.813.316.383,- (95,49%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada program penunjang tersebut sebagai berikut :

A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah ASN Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja yang dibayarkan gajinya dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 4.589.107.000,- terserap sebesar Rp. 4.405.109.325 ,- atau sebesar 95,99 %.

B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah Pengadaan Pakaian dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 8.900.000 terserap sebesar Rp. 8.900.000,- atau sebesar 100%.

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.11.200.000,- terserap sebesar Rp. 10.827.300,- atau sebesar 96,67%.

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 99,68% dengan anggaran sebesar Rp. 119.800.00,- terserap sebesar Rp. 113.822.400,- atau sebesar 95%.

D. Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan anggaran sebesar Rp. 26.500.000- terserap sebesar Rp. 26.298.500,-

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 15.800.000- terserap sebesar Rp. 15.770.000,- atau sebesar 99,81%.

b. Penyediaan Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan Listrik yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 10.800.000- terserap sebesar Rp. 4.795.834,- atau sebesar 44,40%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 139.500.000,- terserap sebesar Rp. 111.600.000,- atau sebesar 100%.

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 114.000.000,- terserap sebesar Rp. 111.326.841,- atau sebesar 97,65%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan Capaian Indikator Kinerja

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 4.900.000,- terserap sebesar Rp. 4.866.183,- atau sebesar 99,30%

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kab. Tana Toraja. Program ini dilaksanakan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Target program pada tahun 2023 adalah 100%, realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 98,95%. Target anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.176.525.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.164.264.982.000,- atau sebesar 98,95%.

Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu:

A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota

a. Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Persentase Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 551.525.000,- terserap sebesar Rp. 549.454.282,- atau sebesar 99,62%.

b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah jumklah dokumen pemberdayaan perlindungan Masyarakat dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 72% dengan anggaran sebesar Rp.25.000.00,- terserap sebesar Rp. 18.003.000,- atau sebesar 72%.

b. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output Jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disediakan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 99,42% dengan anggaran sebesar Rp. 391.400.000,- terserap sebesar Rp. 389.160.800,- atau sebesar 99,42%.

B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

a. Sosiualisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output jumlah sosialisasi Perda/Perkada dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 18.050.000,- terserap sebesar Rp. 17.647500,- atau sebesar 97,77%.

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan ini dicapai dengan indikator output jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 99,71% dengan anggaran sebesar Rp. 190.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.999.400,-

3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Bidang Pemadam Kebakaran. Indikator Program ini adalah Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dicapai dengan indikator output persentase pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dan realisasi 104.210.135,- atau sebesar 99,24%.

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ kota

Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator output persentase pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupate/kota dengan capaian 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 86.850.000,- dan realisasi Rp. 86.320.000,- atau sebesar 99,38 %.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sub kegiatan ini dicapai dengan indicator output persentase pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupate/kota dengan capaian 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 21.175.000,- dan realisasi Rp. 19.698.000,- atau sebesar 93 %.

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 99 % dalam kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dgn Renja Perangkat Lalu 2022		Target Kinerja & Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 =6+12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	001	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar**	60	53.021.600.000	12	5.004.817.979	12	5.040.507.000	3	814.669.485	6	1.346.744.053	9	1.224.731.080	12	1.418.271.765	12	4.813.316.383	12	9.566.913.362	20	1.172	Sat.Pol.PP, Damkar dan Penyelamatan
	01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**	60	30.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	60	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-	
			Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR	
	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	60	30.000.000.000	12	4.492.709.458	12	4.589.107.000	3	786.696.113	6	1.300.526.851	9	1.081.070.067	12	1.236.816.294	12	4.405.109.325	12	8.897.818.783	20	30	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	30.000.000.000	12	4.492.709.458	12	4.589.107.000	3	786.696.113	6	1.300.526.851	9	1.081.070.067	12	1.236.816.294	12	4.405.109.325	12	8.897.818.783	20	30	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															12	4.405.109.325			20,00	29,66	
			Predikat kinerja															SR	ST			SR	SR	
	03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	60	1.923.500.000	-	242.321.000		8.900.000	3	-	6	-	9	-	12	8.900.000	12	8.900.000	129	251.221.000	-	20	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	60	1.248.500.000	0	242.321.000	12	8.900.000	3	-	6	-	9	-	12	8.900.000	12	8.900.000	129	251.221.000		20	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 org	675.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
			Rata-rata capaian kinerja (%)															6	4.450.000			-	20,12	
			Predikat kinerja															SR	ST			SR	SR	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	3	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan dengan Baik**	60	3.479.600.000	12	161.539.560	12	131.000.000	3	16.208.000	6	12.355.000	12	29.834.000	12	66.252.700	12	124.649.700	12	286.189.260	40	51	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	117.550.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan dan Penggandaan	60	73.000.000	12	20.832.800	12	11.200.000	3	-	6	1.970.000	9	2.634.000	12	6.223.300	12	10.827.300	12	31.660.100	20	43	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Expl Bacaan dan Perundangan yang disediakan	60	25.000.000	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	60	3.381.600.000	12	140.706.760	12	119.800.000	3	16.208.000	6	10.385.000	9	27.200.000	12	60.029.400	12	113.822.400	12	254.529.160	20	8	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**6**	**31.162.425**			**13,33**	**16,97**	
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**			**SR**	**SR**	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD yang terpenuhi**	60	17.592.000.000	12	-	0	26.500.000	0	3.485.000,00	0	-	0	22.813.500	0	0	0	26.298.500	12	26.298.500	20	19	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	60	17.399.000.000	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	-	20	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	60	58.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	60	135.000.000	12	-	0	26.500.000	0	3.485.000	0	-	0	22.813.500	0	-	0	26.298.500	12	26.298.500	20	19	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**-**	**8.766.166,67**			**20,00**	**9,74**	
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**			**SR**	**SR**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia**	60	335.700.000	12	13.259.000	12	166.100.000	3	-	6	5.528.514	9	67.326.400	12	59.310.920	12	132.165.834	12	145.424.834	60	1.016	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	60	142.000.000	12	12.584.000	12	15.800.000	3	-	6	5.036.000	9	2.952.000	12	7.782.000	12	15.770.000	12	28.354.000	20	20	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah satuan Jasa Komunikasi, jasa sumber daya air dan listrik yang dipakai	60	182.400.000	12	-	0	10.800.000	0	-	0	492.514	0	1.574.400	0	2.728.920	0	4.795.834	12	4.795.834	20	3	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	11.300.000	12	675.000	12	139.500.000	3	-	6	-	9	62.800.000	12	48.800.000	12	111.600.000	12	112.275.000	20	994	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**8**	**44.055.278**			**20,00**	**338,73**	
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**			**SR**	**ST**	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	3	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Penunjang Urusan yang terpelihara**	60	807.150.000	12	94.988.961	12	118.900.000	3	8.280.372	6	28.333.688	9	23.687.113	12	55.891.851	12	116.193.024	12	211.181.985	60	56	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	193.150.000	12	18.600.918	12	-	3	-	6	-	9	-	12	-	12	-	12	18.600.918	20	10	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	533.440.000	12	71.488.952	12	114.000.000	3	8.280.372	6	27.046.870	9	23.039.204	12	52.960.395	12	111.326.841	12	182.815.793	20	34	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	80.560.000	12	4.899.091	12	4.900.000	3	-	6	1.286.818	9	647.909	12	2.931.456	12	4.866.183	12	9.765.274	20	12	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**12**	**38.731.008**			**20,00**	**18,67**	
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**			**SR**	**SR**	
2	002	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kab. Tana Toraja	**60**	-	12	445.710.000	12	1.176.525.000	3	61.474.282	6	130.175.000	9	143.860.000	12	828.755.700	12	1.164.264.982	12	1.609.974.982	20	#DIV/0!	
	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	**60**	-	12	445.710.000	12	967.925.000	3	61.474.282	6	130.175.000	9	143.860.000	12	621.108.800	12	956.618.082	12	1.402.328.082	20	#DIV/0!	
	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Pegawai Yang Menerima Uang Makan, Jumlah Pengamanan HUT/Hari Besar Keagamaan, dan Pengamanan Tempat Penting/Objek Vital	**60**	3.568.000.000	12	445.710.000	12	551.525.000	3	61.474.282	6	130.175.000	9	143.860.000	12	213.945.000	12	549.454.282	12	995.164.282	20	28	
	02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pengadaan Pakaian Satlinmas Kelurahan, Satlinmas yang mengikuti Pelatihan dan yang dikukuhkan/dilamtik	**60**	742.000.000	12	-	0	25.000.000	0	-	0	-	0	-	12	18.003.000	12	18.003.000	12	18.003.000	20	2	
	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		**60**	-	12	-	0	391.400.000	0	-	0	-	0	-	12	389.160.800	12	389.160.800	12	389.160.800	20	2	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															**12**	**318.872.694**			**20,00**	**10,77**	
			Predikat kinerja															**SR**	**ST**			**SR**	**SR**	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	3	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	60	-	12	-		208.600.000	0	-	0	-	0	-	0	207.646.900	0	207.646.900	0	207.646.900	0		
	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Perda Trantibum	60	200.000.000	12	-	0	18.050.000	0	-	0	-	0	-	0	17.647.500	0	17.647.500	0	17.647.500	0	9	
	02	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		60	-	12	-	0	190.550.000	0	-	0	-	0	-	0	189.999.400	0	189.999.400	0	189.999.400	0		
			Rata-rata capaian kinerja (%)															-	189.999.400,00			-	#DIV/0!	
			Predikat kinerja															SR	ST			SR	#DIV/0!	
3	003	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran**	60	1.775.000.000	12	554.693.028	36	213.025.000	3	2.581.727	6	36.868.510	12	31.547.590	12	139.230.308	12	210.228.135	12	764.921.163	20	43	
	2'01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	60	1.775.000.000	12	554.693.028	36	213.025.000	3	2.581.727	6	36.868.510	12	31.547.590	12	139.230.308	12	210.228.135	12	764.921.163	20	135	
	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	655.000.000	12	109.685.828	12	105.000.000	3	2.581.727	6	24.968.510	9	16.857.590	12	59.802.308	12	104.210.135	12	213.895.963	20	33	
	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman & Pengendalian Kebakaran	60	600.000.000	12	51.257.200	12	86.850.000	3	-	6	11.900.000	9	14.690.000	12	59.730.000	12	86.320.000	12	137.577.200	20	23	
	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarpras Penanganan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	60	520.000.000	12	393.750.000	12	21.175.000	0	-	0	-	0	-	12	19.698.000	12	19.698.000	12	413.448.000	20	80	
			Rata-rata capaian kinerja (%)															12	70.076.045			20,00	45,03	
			Predikat kinerja															SR	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**54.796.600.000**		**6.005.221.007**		**6.430.057.000**		**878.725.494**		**1.513.787.563**		**1.400.138.670**		**2.386.257.773**		**6.187.809.500**					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		**6**	**78.457.002**					
Predikat kinerja																		**SR**	**ST**					

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Bab III pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokoknya Adalah menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat sedangkan uraian tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 7 antara lain: melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah.

Secara rinci jenis program/kegiatan prioritas dan penunjang urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran
3. Kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehingga pengukuran kinerja kegiatan

mendasar pada tolak ukur dan idikator kinerja tersebut. Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

a) Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan;
b) Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan;
c) Persentase Penanganan Penanggulangan Kebakaran
d) Waktu Time (Respon Time) Penanganan kebakaran

Secara lengkap pencapaian target kinerja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian/Target Kinerja Pelayanan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Tahunan						Realisasi Capaian	Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Indikator Kinerja Sasaran**											
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran			21	20	18	15	15	15	24,26	22	15
II	**Indikator Kinerja Program**											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kab. Tana Toraja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 ISU ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SAT.POLPP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA

Penyelenggaran tugas dan fungsi Pada Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya :

1. Sarana dan Prasarana operasional belum memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan;
2. Kurangnya SDM Satpol.PP dan Damkar.
3. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap kepatuhan Perda/Perkada,

Pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan. Satpolpp dan Damkar perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dengan lebih responsive dan profesional dalam menangani berbagai kejadian;
2. Menghadapi tantangan dilapangan. Satpol.PP dan Damkar harus siap menghadapi berbagai tantangan dilapangan, baik dalam penegakan Perda/Perkada maupun penanggulangan bencana kebakaran atau darurat lainnya.
3. Peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia. Satpol.PP dan Damkar perlu meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
4. Peningkatan sinergi dan koordinasi. Satpolpp dan Damkar perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan bencana.

5. Menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Satpol.PP dan Damkar perlu siap untuk menghadapi perubahan iklim dan bencana alam yang dapat meningkatkan resiko kebakaran dan bencana lainnya.

Sedangkan peluang Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Meningkatkan pelatihan dan Pendidikan bagi personal Satpol.PP dan Damkar untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dengan lebih responsife dan professional;
4. Mengembangkan Strategi dan inovasi baru dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan efektifitas danefisiensi pelayanan;
5. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan layanan Penegakan Perda dan Pencegahan, Penanggulangan Bencana kebakaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja, dengan arahan

kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Reviuw Rerhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan					**Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan**					
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	100%	Rp 5.005.883.640,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	100%	Rp5.774.951.640,00	
02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kab. Tana Toraja	100%	Rp 675.000.000,00	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kab. Tana Toraja	100%	Rp1.929.677.000,00	
03	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Rp 583.445.000,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Rp 672.705.000,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja di kecamatan. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : " Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja".

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sesuai dengan Renstra 2021-2026 adalah : "Meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif".

. Adapun sasaran dari Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten TanaToraja.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan
Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Tahun 2023
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif			
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten TanaToraja	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%
			Waktu Tanggap (respon time) penanganan kebakaran	15

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja mempunyai 3 (tiga) rumusan program dan kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan¬ Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;

2.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif bagi perangkat daerah sebagai pelaksanaan program. Renja tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran pelaksanaan program Pembangunan yang ditetapkan dalam renja tahun 2023 dan kebijakan umum APBD, Prioritas dan palofon anggran sementara APBD Tahun 2023, diharapkan dan yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

NO	KODE REK.					PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN PENTING	PARKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
	URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	**1**	**05**	**01**				**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**5.005.883.640**	**DAU**		**100%**	**11.034.500.000**
	1	05	01	2.02	01		**1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tepat waktu**	**Kabupaten Tana Toraja**	**-**	**-**	**DAU**		**0%**	**3.500.000**
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tana Toraja	-	-	DAU		0%	3.500.000
	1	**05**	**01**	**2.02**			**1). Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**4.764.328.640**	**DAU**		**100%**	**6.100.000.000**
	1	05	01	2.02	01		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Kabupaten Tana Toraja	14 bln 59 org	4.764.328.640	DAU		14 bln 59 org	6.100.000.000
	1	**05**	**01**	**2.05**			**1). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Dilayani**	**Kabupaten Tana Toraja**	**-**	**-**	**DAU**		**100%**	**384.700.000**
							1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Kabupaten Tana Toraja	-	-	DAU		114 Stel	249.700.000
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Tana Toraja	-	-	DAU		-	135.000.000
	1	**05**	**01**	**2.06**			**3). Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**92.454.000**	**DAU**		**100%**	**798.550.000**
	1	05	01	2.06	05		1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	-	-	DAU		-	15.000.000

	1	05	01	2.06	05			2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan dan Penggandaan	Kabupaten Tana Toraja	-	7.654.000	DAU		-	16.000.000
	1	05	01	2.06	06			3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	Kabupaten Tana Toraja	-	-	DAU		-	5.000.000
	1	05	01	2.06	09			4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	Kabupaten Tana Toraja	240	84.800.000	DAU		240	762.550.000
	1	**05**	**01**	**2.07**				**4).**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**Kabupaten Tana Toraja**		**-**	DAU		**100%**	**3.500.000.000**
	1	01	01	2.07	02			1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Kabupaten Tana Toraja		-	DAU		1 unit mobil Double Cabin	3.500.000.000
	1	01	01	2.07	05			2.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan	Kabupaten Tana Toraja		-	DAU			-
	1	05	01	2.07	06			3.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kabupaten Tana Toraja		-	DAU			-
	1	**05**	**01**	**2.08**				**5)**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**32.651.000**	**DAU**		**100%**	**69.000.000**
	1	05	01	2.08	01			1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tana Toraja	12 bulan	19.541.000	DAU		12 bulan	30.000.000
	1	05	01	2.08	02			2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Kabupaten Tana Toraja	12 bulan	11.400.000	DAU		12 bulan	36.480.000
	1	05	01	2.08	04			3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kabupaten Tana Toraja	12 bulan	1.710.000	DAU		12 bulan	2.520.000
	1	**05**	**01**	**2.09**				**6)**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**116.450.000**	**DAU**		**100%**	**178.750.000**
	1	05	01	2.09	01			1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Tana Toraja		-	DAU			38.630.000

	1	05	01	2.09	02			2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tana Toraja	3 Unit Kend. Roda 4, 30 Unit Kend. Roda 2	112.000.000	DAU		3 Unit Kend. Roda 4, 30 Unit Kend. Roda 2	122.110.000
	1	05	01	2.09	06			3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Tana Toraja	4 Unit Kmputer/Laptop, 7 Unit Printer	4.450.000	DAU		4 Unit Kmputer/Laptop, 7 Unit Printer	18.010.000
2.	**1**	**05**	**02**				**2.**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kabupaten**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**1.733.875.000**	**DAU dan Pajak Rokok**		**100%**	**2.471.000.000**
	1	**05**	**02**	**2.01**			**1**	**Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**	**Kabupaten Tana Toraja**	**12 bulan**	**1.435.760.000**	DAU dan Pajak Rokok		**12 bulan**	**1.971.000.000**
	1	05	**02**	2.01	01			1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kabupaten Tana Toraja	12 bulan	1.435.760.000	Pajak Rokok dan DAU		12 bulan	880.000.000
									Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyaraksat	Jumlah Dokumen hasil pelaksaan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat tingkat kabupten/kota							81.000.000
	1	05	02	2.01	04			2.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Tana Toraja	0		DAU		1 Dok	210.000.000
								3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	Kabupaten Tana Toraja	0	-		-	0	800.000.000

	1	**05**	**02**	**2.02**				**2.**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang terselesaikan**	**Kabupaten Tana Toraja**	**12 bulan**	**298.115.000**	Pajak Rokok		**12 bulan**	**500.000.000**
	1	05	02	2.02	01			1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda	Kabupaten Tana Toraja	1 Lap	17.475.000	Pajak Rokok		1 Lap	150.000.000
								2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Tana Toraja	1 Lap	280.640.000	Pajak Rokok		1 Lap	350.000.000
3.	**1**	**05**	**04**				**3.**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran**	**Kabupaten Tana Toraja**	**100%**	**625.565.000**	**DAU**		**100%**	**375.000.000**
	1	**05**	**04**	**2.01**				**1.**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	**Kabupaten Tana Toraja**	**12 bulan**	**625.565.000**	DAU		**12 bulan**	**375.000.000**
	1	05	04	2.01	01			1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	Kabupaten Tana Toraja	1 Dok	96.000.000	DAU		1 Dok	135.000.000
	1	05	04	2.01	02			2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tana Toraja	1 Lap	454.565.000	DAU		1 Lap	130.000.000
	1	05	04	2.01	03			3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untu pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kabupaten Tana Toraja	1 Paket	75.000.000	DAU		1 Paket	110.000.000
JUMLAH													**7.365.323.640**				**13.880.500.000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertbian dan ketentraman serta perlindungan Masyarakat Rencana Kerja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja,

Makale, 04 Agustus 2023

Kepala Satuan,

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Drs. Anthon Toding, MH

NIP : 19650814 199312 1 001